



# KATALOG REFERENSI PEMBANGUNAN DAERAH

# **DAFTAR ISI**

<b>DAFTAR ISI</b>	<b>ii</b>
<b>KATALOG DALAM TERBITAN</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>iv</b>
<b>Aparatur dan Kelembagaan Pemerintah DAERAH</b>	<b>1</b>
<b>Jurnal</b>	<b>2</b>
<b>Ringkasan Kajian</b>	<b>70</b>
<b>Laporan</b>	<b>72</b>
<b>Keuangan Daerah</b>	<b>75</b>
<b>Buku</b>	<b>76</b>
<b>Jurnal</b>	<b>78</b>
<b>Laporan</b>	<b>144</b>
<b>Ringkasan Kajian</b>	<b>146</b>
<b>Perdesaan</b>	<b>148</b>
<b>Artikel</b>	<b>149</b>
<b>Buku</b>	<b>152</b>
<b>Jurnal</b>	<b>162</b>
<b>Laporan</b>	<b>208</b>
<b>Perkotaan</b>	<b>212</b>
<b>Buku</b>	<b>213</b>
<b>Jurnal</b>	<b>218</b>

# KATALOG DALAM TERBITAN

Judul Buku	: Katalog Referensi Sektor Pembangunan Daerah
Pengarah	: 1. Mohammad Irfan Saleh 2. Randy Rizang Wrihatnolo 3. Suhartatik 4. Retno Amarwati 5. Suharna
Penulis	: 1. Amalia Nur Hasanah 2. Damar Nastiti Dananjaya 3. Fara Nadhifatuz Zulfa 4. Hutomo Pangestu 5. Madinar 6. Muhammad Eka Kusuma 7. Rakha Naufal Ferdiansyah 8. Titan Andriansyah 9. Very Yanto 10. Yasinta Kurnia Kusumaningrum
Desain	: Hutomo Pangestu
Penerbit	: Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)
Halaman	: 281
Tahun Terbit	: 2021
Ukuran	: 14,8 cm x 21 cm

## KATA PENGANTAR

Informasi dan pengetahuan merupakan aset yang sangat berharga bagi organisasi atau lembaga. Pengetahuan adalah informasi yang mengubah sesuatu atau seseorang, karena informasi menjadi dasar untuk bertindak. Mengingat pentingnya informasi dan pengetahuan, serta banyaknya informasi dan pengetahuan yang tercipta di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas, kami berusaha untuk mengelola informasi dan pengetahuan tersebut dengan baik.

Berdasarkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 14 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PPN/Bappenas yang salah satu tugas dan fungsi Pusdatinrenbang adalah pengelolaan informasi dan pengetahuan. Maka dari itu kami mencoba mengumpulkan referensi baik berupa jurnal, kajian, laporan, dan sebagainya terkait Sektor Pembangunan Daerah yang merupakan salah satu sektor di Kementerian PPN/Bappenas dan disusun sebagai katalog referensi. Katalog referensi ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu referensi bagi unit kerja dalam membuat/menyusun kajian/laporan atau *policy paper* dan sebagainya.

Tak lupa, kami mengucapkan terima kasih kepada Tim yang berkontribusi dan memberikan ide-ide sehingga terwujudnya penyusunan katalog referensi. Tentunya katalog referensi yang kami susun, masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami mengharapkan masukan, kritik dan saran dalam rangka penyempurnaan katalog referensi ini.

Jakarta, 29 November 2021

Plt. Kepala Pusat Data dan Informasi Renbang  
Kementerian PPN/Bappenas

Mohammad Irfan Saleh

# **APARATUR DAN KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH**

# JURNAL

## Otonomi Daerah dan Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah Tingkat II

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	352.63.ABD.o
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Aparatur dan Kelembagaan Pemerintah Daerah
Penerbit	<i>Economic Journal of Emerging Markets</i>
Pengarang	Abdul Hakim
Tahun Terbit	1997
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	<p>Pelaksanaan otonomi daerah sudah lama dicita-citakan dengan diberlakukannya UU No. 5 Tahun 1974. Tetapi karena berbagai kendala, maka pelaksanaan otonomi tersebut tertunda selama kurang lebih 20 tahun (tahun 1974 sampai dengan tahun 1995). Diantara berbagai kendala yang ada, factor kemampuan aparatur pemerintah dianggap merupakan kendala utama dan bersifat substansial, yaitu merupakan tumpuan bagi kendala-kendala yang lain.</p>

## Disiplin Kerja Aparatur Pemerintah Bappeda Daerah Istimewa YOGYAKARTA

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	352.63.ROS.d
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Aparatur dan Kelembagaan Pemerintah Daerah
Penerbit	Jurnal Penelitian Humaniora UNY
Pengarang	Rosidah Rosidah
Tahun Terbit	2002
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	Penelitian disiplin aparatur bertujuan untuk mengetahui tingkat kedisiplinan serta faktor dominan yang mempengaruhinya, dengan mengambil kasus di Bappeda DIY. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi dalam perencanaan sumber daya manusia demi peningkatan pembangunan yang berkelanjutan. Pendekatan penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan analisis kualitatif, ditemukan bahwa aparatur pemerintah di Bappeda Yogyakarta menunjukkan tanggung jawab yang tinggi, dan komitmen yang tinggi dalam mencapai tujuan organisasi.

## Perilaku Organisasional Aparatur dalam Akselerasi Pembangunan Daerah

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	352.63.DJI.p
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Aparatur dan Kelembagaan Pemerintah Daerah
Penerbit	Efisiensi
Pengarang	Djihad Hisyam
Tahun Terbit	2005
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	<p>Aparatur pemerintah merupakan salah satu faktor yang perlu mendapat perhatian dalam rangka pembangunan daerah. Mereka adalah sumber daya yang harus diberdayakan dalam kapasitasnya untuk membangun suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa untuk akselerasi pembangunan diperlukan perilaku organisasional dari aparatur yang mendukung pada tujuan tersebut. Sehingga bentuk bentuk penyelewengan negara dan berbagai penyakit birokrasi perlu direduksi dan dihindari.</p>

## Peningkatan Kapasitas Aparatur Daerah dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	352.63.DES.p
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Aparatur dan Kelembagaan Pemerintah Daerah
Penerbit	Jurnal Borneo Administrator
Pengarang	Desi Fernanda
Tahun Terbit	2006
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	<p>Tujuan utama otonomi daerah adalah memberikan yang lebih baik, lebih cepat, lebih murah dan mendekatkan pelayanan publik serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan gesit memberikan pelayanan publik yang berkualitas, baik aparatur pemerintah maupun masyarakat anggota perlu memahami konsep dasar dan ruang lingkup layanan, dan prinsip-prinsip pengukuran kinerja tentang penyampaian publik melayani. Selain itu, landasan filosofis mengapa pemerintah harus melaksanakan tugas pelayanan publik benar-benar penting untuk diakui. Berdasarkan seperti itu pemahaman umum, makalah ini menawarkan beberapa strategi mengenai peningkatan kapasitas bagi penyedia layanan, yaitu aparatur pemerintah.</p>

## Studi Kasus Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Kabupaten Sragen

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	320.TIT.s
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Aparatur dan Kelembagaan Pemerintah Daerah
Penerbit	Jurnal Ilmu Sosial
Pengarang	Titik Djumiarti Rihandoyo Rihandoyo
Tahun Terbit	2007
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	Reformasi diartikan sebagai suatu proses Perubahan baik secara drastis maupun inkremental dan komprehensif menuju suatu kondisi yang lebih baik dari sebelumnya. Kabupaten Sragen telah menjadi pioneer dalam melakukan reformasi birokrasi melalui pengembangan kapasitas yang meliputi tiga bidang yaitu pengembangan SDM Aparatur, penataan kelembagaan dan penataan sistem melalui inovasi dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.

## Penataan Kelembagaan Pemerintahan Daerah

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	321.RAS.p
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Aparatur dan Kelembagaan Pemerintah Daerah
Penerbit	Jurnal Administrasi dan Kebijakan Kesehatan Indonesia
Pengarang	Rasyid Thaha
Tahun Terbit	2009
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	<p>Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui gambaran penataan kelembagaan pada pemerintah daerah. Hasil tulisan ini menunjukkan bahwa penataan kelembagaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah guna mewujudkan <i>Good Governance</i> masih relevan dengan pelaksanaan dan pembagian kewenangan dalam pola strukturisasi hal ini bisa dilihat dan dikaji dari hasil analisis dan pembahasan sebelumnya yang menurut sebagian besar responden. Kemudian dalam hal penerapan dan pengadaan fasilitas teknologi mendapat perhatian responden bahwa masih layak dan mampu menjadi penunjang dalam operasional.</p>

## **Pengaruh Jabatan, Pengembangan Karier dan Kepemimpinan terhadap Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah**

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	352.63.AND.p
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Aparatur dan Kelembagaan Pemerintah Daerah
Penerbit	Jurnal WACANA
Pengarang	Andhy Hendro Wijaya Trilaksono dkk
Tahun Terbit	2009
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Apakah ada hubungan antara analisis jabatan terhadap profesionalisme aparatur Pemerintah Daerah; (2) Apakah ada hubungan antara pengembangan karir dengan profesionalisme aparat Pemerintah Daerah; (3) Apakah ada hubungan antara kepemimpinan dengan profesionalisme aparat Pemerintah Daerah; (4) Apakah ada hubungan antara analisis jabatan, pengembangan karir dan kepemimpinan secara simultan terhadap profesionalisme aparat Pemerintah Daerah sebagai tuntutan pelaksanaan otonomi daerah.

## Pengembangan Sumberdaya Aparatur sebagai Upaya Meningkatkan Kinerja

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	352.63.AMR.p
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Aparatur dan Kelembagaan Pemerintah Daerah
Penerbit	Jurnal WACANA
Pengarang	Amri
Tahun Terbit	2009
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	Adanya penyerahan urusan dan kewenangan, khususnya urusan Kepegawaian ke daerah sehingga terjadi penambahan atau pengalihan aparatur ke tubuh pemerintah daerah akan membawa akibat terhadap pengembangan aparatur mulai dari masuknya sampai dengan pensiun. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara mendalam, dokumentasi, dan observasi.

## **Penguatan Kelembagaan Gotong Royong dalam Perspektif Sosio Budaya Bangsa; suatu Upaya Revitalisasi Adat Istiadat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan**

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	575.6.TRI.p
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Aparatur dan Kelembagaan Pemerintah Daerah
Penerbit	Forum Penelitian Agro Ekonomi
Pengarang	Tri Pranadji
Tahun Terbit	2009
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	Indonesian Gotong royong adalah modal sosial yang ditemukan di sebagian besar sub-budaya Indonesia. Dalam lembaga gotong royong kita menemukan nilai-nilai sosial, semangat kolektif, saling percaya kolektif, dan organisasi yang ditujukan untuk kemajuan bersama. Peran gotong royong sangat signifikan dalam mengentaskan Indonesia dari keterbelakangan ekonomi kebutuhan pokok dan dominasi asing. Revitalisasi kelembagaan gotong royong perlu dilakukan dengan melibatkan masyarakat melalui partisipasi yang mendalam dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

## Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah dalam Pelayanan Publik (Studi Pada Kantor Camat Peudada Kabupaten Bireuen)

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	352.63.RAH.p
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Aparatur dan Kelembagaan Pemerintah Daerah
Penerbit	<i>International Journal of Government and Social Science</i>
Pengarang	Rahmad
Tahun Terbit	2009
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	Fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat, maka pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan. Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah harus membudayakan kapasitas SDM yang handal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui profil umum kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam pelayanan publik di Kecamatan Peudada, tingkat kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam pelayanan publik di Kecamatan Peudada, faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam pelayanan publik di Kecamatan Peudada. Serta mengetahui upaya yang dilakukan oleh camat kecamatan Peudada dalam meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam pelayanan publik di Kecamatan Peudada.

## Profesionalisme Aparatur Polisi Pamong Praja di Kabupaten Minahasa Tenggara dalam Pelaksanaan Tugas Penegakkan Peraturan Daerah

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	352.63.FEB.p
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Aparatur dan Kelembagaan Pemerintah Daerah
Penerbit	Jurnal Ilmiah Society
Pengarang	Febry Lasut Marthen Kimbal Grace Waleleng
Tahun Terbit	2009
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	Penelitian ini bertujuan untuk menilai profesionalisme aparat kepolisian pamong praja dalam pelaksanaan tugas penegakan peraturan daerah. Dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa Profesionalisme Aparat satpol PP Minahasa Tenggara dalam rangka Penegakan Peraturan Daerah didukung oleh aspek-aspek profesionalisme tersebut; Kompetensi (dalam hal rekrutmen dan pendidikan formal), Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (pola rekrutmen), Sistem Penggajian, Aparatur Diklat, Reward and Punishment, Kreativitas, Motivasi, Inovasi dan daya tanggap.

## Faktor-Faktor Penghambat Pengembangan Sumberdaya Aparatur Pemerintah Daerah

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	352.63.EKO.f
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Aparatur dan Kelembagaan Pemerintah Daerah
Penerbit	Jurnal Ilmu Administrasi
Pengarang	Eko Budi Sulistio
Tahun Terbit	2010
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	Otonomi daerah di Indonesia digulirkan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat daerah, setelah sekian lama dipinggirkan oleh Pemerintah Otoriter Orde Baru. Namun harapan besar tersebut, rupanya masih merupakan mimpi besar dan sulit terwujud. Salah satunya karena masalah sumber daya aparatur. Berbagai cara dan upaya telah banyak dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya aparatur tersebut. Namun sayangnya pemerintah daerah melupakan penyebab rendahnya kualitas sumber daya aparatur tersebut.

## **Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, dan Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan**

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	352.63.MED.p
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Aparatur dan Kelembagaan Pemerintah Daerah
Penerbit	Majalah Ekonomi Universitas Airlangga
Pengarang	Mediaty Mediaty
Tahun Terbit	2010
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh partisipasi penyusunan anggaran dan gaya kepemimpinan terhadap kinerja pejabat pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Populasi dalam penelitian ini adalah pejabat setingkat kepala unit dan kepala sub unit di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemda Provinsi Sulawesi Selatan 746 orang. Sampel terdiri dari 185 unit dan sub-unit. Data diperoleh melalui kuesioner.

## Pengembangan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah Daerah

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	352.63.HAR.p
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Aparatur dan Kelembagaan Pemerintah Daerah
Penerbit	Jurnal Ilmu dan Budaya
Pengarang	Harry Suderajat
Tahun Terbit	2010
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	Sumber Daya Manusia merupakan bagian penting dalam suatu organisasi, termasuk organisasi pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan metode perbandingan antara kondisi aktual dengan pengelolaan Sumber Daya Manusia yang ideal dalam perspektif manajemen strategis Sumber Daya Manusia. Akibatnya, selama ini pengelolaan SDM di pemerintah daerah masih bersifat administratif dan belum mencapai pengelolaan SDM strategis.

## Profesionalitas Aparatur Sekretariat Daerah di Kabupaten Sumbawa Besar

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	352.63.KHA.p
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Aparatur dan Kelembagaan Pemerintah Daerah
Penerbit	Jurnal Studi Pemerintahan
Pengarang	Khairy Juanda
Tahun Terbit	2010
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui profesionalitas aparat Sekda Kabupaten Sumbawa dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan fungsi dan <i>job description</i> . Selain itu, penelitian ini mencoba untuk mengetahui beberapa kendala dan mencari solusi untuk meningkatkan profesionalitas aparatur di Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa. Judul penelitian ini adalah Profesionalitas Aparatur di Sekda Sumbawa.

## Optimalisasi Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah dalam Perspektif Kualitas Sumber Daya Aparatur

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	322.IWA.o
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Aparatur dan Kelembagaan Pemerintah Daerah
Penerbit	Publica
Pengarang	Iwan Satibi
Tahun Terbit	2011
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	<p>Peningkatan kinerja aparatur pemerintah merupakan suatu keharusan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Urgensi peningkatan kinerja ini dapat dipahami seiring dengan meningkatnya tuntutan terhadap pelayanan aparatur pemerintah yang dinilai oleh banyak pakar dan hasilnya masih mengecewakan. Salah satu upaya strategis yang dapat dilakukan adalah melalui peningkatan kualitas sumber daya personel. Oleh karena itu sejauh mana penguatan kebijakan peningkatan kualitas sumber daya aparatur dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kinerja organisasi satuan wilayah.</p>

## Analisis Faktor Profesionalisme Aparatur Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Besar (Studi pada Faktor Kemampuan dan Performansi)

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	352.63.RAH.a
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Aparatur dan Kelembagaan Pemerintah Daerah
Penerbit	Jurnal Ilmiah Sains dan Teknologi
Pengarang	Rahmad Abdul Wahab
Tahun Terbit	2013
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	Penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian Profesionalisme Aparatur Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Besar (Studi Pada Faktor Kemampuan dan Performansi) dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Metode penelitian yang dipakai adalah metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. <i>Profesionalisme</i> aparatur pemerintah ini mencakup kemampuan dan performansi yang dilakukan oleh aparatur di Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Besar dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, serta fungsi dan tanggung jawabnya sebagai pilar pemerintah dalam mencapai tujuan pemerintahan.

## Analisis Potensi Pendapatan Asli Daerah dan dana Perimbangan Kabupaten Rokan Hilir

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	336.24.RIT.a
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Aparatur dan Kelembagaan Pemerintah Daerah
Penerbit	Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan
Pengarang	Rita Yani Iyan R. Putra Samad
Tahun Terbit	2013
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	Berhasil atau tidaknya percepatan pembangunan sejalan dengan tuntutan otonomi daerah dan dinamika masyarakat, akan sangat tergantung kepada kemampuan daerah dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) mengidentifikasi bentuk dan jumlah PAD dan Dana Perimbangan yang ada, (2) mengkaji kebijakan-kebijakan dalam optimalisasi potensi penerimaan PAD dan Dana Perimbangan, dan (3) mendapatkan gambaran jelas tentang kinerja aparatur pemerintah daerah, khususnya aparatur yang terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan keuangan daerah kabupaten Rokan Hilir.

## Implementasi Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Pasuruan

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	321.MUH.i
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Aparatur dan Kelembagaan Pemerintah Daerah
Penerbit	Jurnal WACANA
Pengarang	Muhammad Agung Zulkarnain Bambang Supriyono Irwan Noor
Tahun Terbit	2013
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	Meskipun dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah berbagai upaya yang diarahkan pada peningkatan indikator kualitas sumber daya manusia telah ditetapkan, namun kualitas sumber daya manusia yang rendah masih menjadi persoalan bagi pemerintah daerah Kabupaten Pasuruan. Terkait hal itu dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi perencanaan pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Pasuruan beserta faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukungnya.

## Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Berdasarkan PP 412007

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	321.WEN.p
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Aparatur dan Kelembagaan Pemerintah Daerah
Penerbit	Universitas Negeri Gorontalo
Pengarang	Weny Almoravid Dunga
Tahun Terbit	2013
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	Dalam penataan kelembagaan perlulah terlebih dahulu dilihat semua faktor kemungkinan yang ada, baik itu kesempatan, peluang maupun tantangan serta hambatan apa yang ada dalam era otonomi ini serta penataan lembaga dalam organisasi-organisasi yang akan dibuat haruslah pula dapat menjawab serta memenuhi kehendak pelanggan yaitu masyarakat di daerah yang memerlukan pelayanan secara optimal agar tercipta suatu keadaan yang menggambarkan <i>good governance</i> .

## ***Planning and Budgeting in Community-based Forest Management Through Community Forestry and Village Forest Scheme***

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	322.THE.p
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Aparatur dan Kelembagaan Pemerintah Daerah
Penerbit	<i>The Partnership for Governance Reform</i>
Pengarang	<i>The Partnership for Governance Reform</i>
Tahun Terbit	2013
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	Policy Paper ini dilatarbelakangi oleh masih rendahnya realisasi Hutan Kemasyarakatan (HKM), dan Hutan Desa (HD) secara nasional. Salah satu penyebabnya adalah rendahnya komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam mengembangkan tindakan kolektif dan mengalokasikan anggaran untuk implementasi kebijakan tersebut. Karena tindakan kolektif dan alokasi anggaran terjadi melalui pembagian kewenangan, kelembagaan dan proses perencanaan, maka <i>policy paper</i> ini menganalisis perencanaan dan penganggaran dalam konteks kelembagaan hubungan pusat dan daerah.

## Proses Rekrutmen Sumber Daya Aparatur Dinas Pendidikan (Studi Kasus Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang)

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	352.6.ELG.p
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Aparatur dan Kelembagaan Pemerintah Daerah
Penerbit	Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya
Pengarang	Elga Septhinna
Tahun Terbit	2013
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	Proses Rekrutmen Sumber Daya Aparatur Dinas Pendidikan. Penelitian ini bertemakan proses rekrutmen bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya personel di bidang pendidikan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian deskriptif-kualitatif yang menggunakan metode analisis Miles Huberman. Latar belakang penelitian ini diangkat untuk melihat bagaimana proses rekrutmen SDM oleh Badan Kepegawaian Daerah Depdiknas yang secara umum bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses rekrutmen SDM Depdiknas.

## **Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe Menggunakan Metode *Value for Money***

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	336.24.HAR.a
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Aparatur dan Kelembagaan Pemerintah Daerah
Penerbit	Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi
Pengarang	Harry Saputra Liando David Paul Elia Saerang Inggriani Elim
Tahun Terbit	2014
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	Kinerja keuangan merupakan sangat penting untuk dikaji dalam organisasi sektor publik termasuk pemerintahan. Sejak diterapkan penganggaran berbasis kinerja, pemerintah daerah dituntut untuk mampu menghasilkan kinerja keuangan secara baik. Meningkatnya tuntutan pelaksanaan akuntabilitas publik oleh organisasi sektor publik seperti pemerintah pusat dan daerah, unit-unit kerja pemerintah, departemen dan lembaga negara diharapkan dapat mengurangi terjadinya pemborosan, kebocoran dana dan mendeteksi program-program yang tidak layak secara ekonomi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe tahun 2012 sampai 2013 dengan metode analisis deskriptif kuantitatif.

## Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Aparatur pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	352.6.ACH.p
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Aparatur dan Kelembagaan Pemerintah Daerah
Penerbit	Jurnal Administrasi Negara STIA LAN Makassar
Pengarang	Achep Saputra Sudirman Sudirman
Tahun Terbit	2014
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	Pelaksanaan asas penyelenggaraan Pemerintah daerah yang baik telah mengalami beberapa perbaikan-perbaikan, terakhir adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dimana dalam Pasal 58 menjelaskan ada 10 asas penyelenggaraan pemerintahan, tentu hal ini bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat secara adil dan merata sesuai dengan cita-cita otonomi daerah. Namun dalam pengimplementasiannya masih terdapat banyak distorsi-distorsi sehingga perlu segera direformasi dari segi kelembagaan dan tatalaksana, sumber daya manusia dan personalia, sampai dengan akuntabilitas dan pelayanan publik sehingga dapat mewujudkan pemerintahan yang baik.

## **Pengaruh Kepemimpinan, Budaya Organisasi dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Aparatur Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar**

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	352.63.SUS.p
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Aparatur dan Kelembagaan Pemerintah Daerah
Penerbit	<i>Journal Economy and Currency Study</i>
Pengarang	Susi Hendriani Yuli Artati
Tahun Terbit	2014
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara kepemimpinan, budaya organisasi dan disiplin kerja terhadap kinerja aparatur pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei, sedangkan populasi di dalam penelitian ini adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar yang berjumlah 274 orang. Sehubungan jumlah populasi relatif besar, maka sampel ditetapkan sebanyak 73 orang atau 27 % dari total populasi 274 orang.

## **Pengaruh Pendidikan dan Latihan Terhadap Peningkatan Sumber Daya Aparatur Pemerintah Daerah (Studi Di Kantor Badan Pendidikan dan Pelatihan Propinsi Sulawesi Utara)**

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	352.63.MAX.p
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Aparatur dan Kelembagaan Pemerintah Daerah
Penerbit	Jurnal Administrasi Bisnis
Pengarang	Maxi Egeten
Tahun Terbit	2014
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	<p>Pentingnya mengikuti pendidikan dan latihan bagi seorang PNS yaitu dalam rangka meningkatkan kinerja guna menunjang perwujudan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan umum kepada masyarakat. tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Apakah Diklat dapat mempengaruhi Sumber Daya Aparatur / pegawai yang ada di Kantor Badan Diklat Provinsi Sulut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisis. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh Pegawai Negeri Sipil yang ada di Badan Pendidikan dan Pelatihan. Provinsi Sulawesi Utara yang berdasarkan data ada sebanyak 63 orang.</p>

## Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Aparatur melalui Penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Kabupaten Magetan

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	352.63.INC.p
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Aparatur dan Kelembagaan Pemerintah Daerah
Penerbit	Jurnal WACANA
Pengarang	Inci Abdul Yatim Bambang Supriyono Imam Hardjanto
Tahun Terbit	2014
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	Pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan sektor publik yang efektif dan efisien membutuhkan sumber daya aparatur pemerintah yang profesional, memiliki kompetensi dan jumlah yang tepat, namun hal tersebut belum sepenuhnya terwujud. Untuk itu diperlukan perbaikan dalam pengelolaan kepegawaian ke arah yang lebih baik terutama perencanaan untuk formasi pegawai. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) Perencanaan sumber daya aparatur; dan (2) Faktor-faktor yang berkaitan dengan penyusunan formasi Pegawai Negeri Sipil.

## Analisis Hukum Kewenangan Pemerintahan Daerah dan Kualitas Aparatur Daerah

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	352.63.LAO.a
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Aparatur dan Kelembagaan Pemerintah Daerah
Penerbit	Jurnal Hukum Volkgeist
Pengarang	Laode Haniru
Tahun Terbit	2015
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah adalah merupakan konsep yang dilaksanakan bersama-sama. Pada masa sekarang dikenal dengan ungkapan, pusat adalah pusatnya daerah dan sementara daerah adalah daerahnya pusat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kewenangan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kualitas aparatur daerah di Kota Baubau dan faktor-faktor apa yang ikut mempengaruhi upaya peningkatan kualitas aparatur daerah sejak diberlakukan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan kuantitatif yang disertakan dengan analisis <i>field research</i> (penelitian lapangan).

## **Analisis Kinerja Aparatur Pemerintah Menggunakan Pendekatan *Balanced Scorecard* (Studi Kasus pada Aparatur Pemerintah di Kampung Yanggandur)**

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	352.63.DIN.a
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Aparatur dan Kelembagaan Pemerintah Daerah
Penerbit	Jurnal Ilmu Ekonomi & Sosial Unmus
Pengarang	Dina Fitri Septarini, Erni Dwita Silambi
Tahun Terbit	2015
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	Aparatur kampung merupakan bagian dari struktur pemerintahan yang paling bawah yang mengetahui secara pasti segala kondisi dan permasalahan yang ada di wilayahnya yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu target pengukuran kinerja harus berorientasi kepada masyarakat. Pengukuran kinerja pada organisasi publik yang hanya menitikberatkan pada sektor keuangan saja cenderung mengabaikan kinerja non keuangan seperti kepuasan masyarakat, efektivitas dan SDM yang berkemampuan dan berkomitmen tinggi.

## Analisis Pentingnya Profesionalisme Aparatur Pemerintah Desa

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	352.63.ALI.a
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Aparatur dan Kelembagaan Pemerintah Daerah
Penerbit	Jurnal Sosio Sains
Pengarang	Alimuddin Ramli
Tahun Terbit	2015
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui pengaruh kapasitas sumberdaya manusia terhadap kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Buton. (2) Untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Buton. (3) Untuk mengetahui pengaruh kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Buton.

## **Gaya Kepemimpinan Camat dalam Meningkatkan Disiplin Kerja Aparatur Pemerintah di Kecamatan Wanea**

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	320.8.SUK.g
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Aparatur dan Kelembagaan Pemerintah Daerah
Penerbit	Jurnal Ilmu Politik
Pengarang	Sukegawa Yoriko Mamalu
Tahun Terbit	2015
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	Kecamatan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia dibawah kabupaten atau kota. Kecamatan terdiri atas desa-desa atau kelurahan kelurahan. Dalam konteks otonomi daerah di Indonesia, Kecamatan merupakan SKPD Kabupaten atau Kota yang mempunyai wilayah kerja tertentu yang dipimpin oleh seorang Camat. Sebagai seorang pemimpin, Camat harus memiliki jiwa kepemimpinan dan semangat kerja untuk mengawali proses pembangunan di kecamatan.

## Kinerja Badan Kepegawaian Daerah dalam Meningkatkan Kerja Aparatur Pemerintah (suatu Studi di Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara)

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	352.63.TEL.k
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Aparatur dan Kelembagaan Pemerintah Daerah
Penerbit	Jurnal Ilmu Politik
Pengarang	Telma Timumu
Tahun Terbit	2015
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	Dalam undang-undang nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara mengatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dibangun aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Minahasa dalam Meningkatkan Sumber Daya Manusia Aparatur

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	352.63.CHA.k
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Aparatur dan Kelembagaan Pemerintah Daerah
Penerbit	Jurnal Ilmu Politik
Pengarang	Chandra Mukuan
Tahun Terbit	2015
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	Peningkatan sumber daya aparatur untuk meningkatkan kinerja merupakan sesuatu yang penting untuk dilakukan. Untuk itu seluruh instansi pemerintah wajib memiliki program untuk meningkatkan kualitas aparatur di kantor mereka masing-masing. Terkait dengan permasalahan ini kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Minahasa memiliki beberapa program yang direncanakan sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja para pegawai di kantor ini. Berbagai Upaya tersebut akan coba digambarkan dalam penelitian.

## Pelimpahan Wewenang Bupati Kepada Camat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	322.AGU.p
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Aparatur dan Kelembagaan Pemerintah Daerah
Penerbit	Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tribhuwana Tunggaladewi
Pengarang	Agung Wara Laksana Bambang Supriyono Sarwono Sarwono
Tahun Terbit	2015
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	Secara fundamental inti pelaksanaan otonomi daerah adalah keleluasaan pemerintah daerah ( <i>discretionary power</i> ) menyelenggarakan pemerintahan sendiri atas dasar prakarsa, kreativitas dan partisipasi masyarakat dalam memajukan daerahnya. Refleksi Perubahan keleluasaan kewenangan menuntut adanya penataan kembali kelembagaan pemerintahan, termasuk kelembagaan Kecamatan yang berubah status dari lingkungan administrasi pemerintahan menjadi wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten/kota.

## Pemberdayaan Aparatur Pemerintah Daerah dalam

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	352.63.ANG.p
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Aparatur dan Kelembagaan Pemerintah Daerah
Penerbit	Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan
Pengarang	Angga Dewi Fitriyani
Tahun Terbit	2015
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	Penelitian ini bertujuan untuk melihat gambaran Untuk mengetahui gambaran kinerja pegawai pada Dinas Pariwisata Kabupaten Musi Rawas Pengadaan Pegawai, dinas pariwisata sudah selektif dalam pemilihan pegawai, demi kualitas kinerja dinas pariwisata Untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang profesional dan memiliki kompetensi tinggi dituntut perannya dalam pemerintahan. Perlu dilakukan melalui sistem pembinaan yang mencakup seluruh aspek pembinaan PNS secara terpadu, mulai dari perencanaan, pengadaan, penempatan, diklat, kesejahteraan, sampai pada pemberhentian dan pensiun. Sistem pembinaan karier pegawai pada hakekatnya adalah suatu upaya sistematis, terencana mencakup struktur dan proses yang menghasilkan keselarasan kompetensi pegawai dengan kebutuhan organisasi.

## Pemberdayaan Aparatur Pemerintah Daerah di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	352.63.FRA.p
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Aparatur dan Kelembagaan Pemerintah Daerah
Penerbit	Jurnal Ilmu Politik
Pengarang	Fратиwi Binol
Tahun Terbit	2015
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebagai salah satu satuan kerja perangkat pemerintah daerah mempunyai tugas dalam memberdayakan aparatur pemerintah daerah, oleh sebab itu dalam hal pemberdayaan, aparatur dituntut untuk lebih profesional dan maksimal agar tujuan-tujuan dari instansi dapat tercapai dengan baik dan dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui pemberdayaan aparatur pemerintah daerah pada Dinas Pariwisata serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi, dapat dilihat dari faktor pendukung dan faktor penghambat.

## **Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur terhadap Peningkatan Kinerja di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara**

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	352.63.HEN.p
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Aparatur dan Kelembagaan Pemerintah Daerah
Penerbit	Jurnal Ilmu Politik
Pengarang	Hendra Mocodompis
Tahun Terbit	2015
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak terlepas dari kualitas sumber daya manusia aparatur pemerintah, hal ini menjadi penting karena aparatur yang handal dan berkualitas akan memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan dalam melaksanakan tugas tanggung jawab pekerjaannya, sehingga akan berdampak pada peningkatan kinerja aparatur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas Sumber Daya Aparatur di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dengan metode kuantitatif.

## Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Melalui Kompetensi

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	352.63.YUR.p
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Aparatur dan Kelembagaan Pemerintah Daerah
Penerbit	Universitas Negeri Gorontalo
Pengarang	Yuriko Abdussamad
Tahun Terbit	2015
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	Reformasi bidang manajemen publik pada gilirannya akan berdampak pada tuntutan kualifikasi atau kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dalam lembaga pemerintah. Dalam hal ini, pengembangan sumber daya manusia aparatur di sektor publik pada masa kini dan pada masa yang akan datang harus diarahkan kepada penataan kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya. Pada level manajer, kelemahan yang umumnya dihadapi adalah terutama pada kurangnya pemahaman terhadap kualifikasi yang seharusnya dimiliki oleh setiap level manajer dalam organisasi. Dalam konteks ini, kualifikasi yang dimaksud sebenarnya adalah adanya standar kompetensi yang disepakati bersama.

## Strategi Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	352.63.SYA.s
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Aparatur dan Kelembagaan Pemerintah Daerah
Penerbit	Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik
Pengarang	Syamsul Sunusi
Tahun Terbit	2015
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	Strategi kebijakan pendidikan dan pelatihan aparatur pemerintah daerah pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan/keahlian dan kemahiran dalam melaksanakan berbagai tugas dan pekerjaan yang dibebankan kepada aparatur dan Perubahan sikap mental kejuangan aparatur pemerintah daerah dalam melakukan pelayanan public yang baik kepada masyarakat.

## Determinan Implementasi Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	352.63.SYA.d
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Aparatur dan Kelembagaan Pemerintah Daerah
Penerbit	Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik
Pengarang	Syamsul Sunusi
Tahun Terbit	2016
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	Pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dimaksudkan untuk dapat memberikan deskriptif secara sistematis, faktual dan aktual terhadap objek yang diteliti. Tujuan penelitian adalah untuk menguraikan secara sistematis tentang, “Determinan kebijakan pengembangan sumberdaya aparatur pemerintah daerah Kabupaten Sidrap”.

## Hubungan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	321.DUD.h
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Aparatur dan Kelembagaan Pemerintah Daerah
Penerbit	Jurnal Hukum POSITUM
Pengarang	Dudung Abdullah
Tahun Terbit	2016
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana corak dan model hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah berdasarkan sejarah peraturan perundang-undangan yang ada? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dimana sumber data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

## Modernisasi Penyuluhan Pertanian di Indonesia; Dukungan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terhadap Eksistensi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Daerah

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	322.ANA.m
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Aparatur dan Kelembagaan Pemerintah Daerah
Penerbit	Nfn Syahyuti
Pengarang	Analisis Kebijakan Pertanian
Tahun Terbit	2016
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	Penyuluhan pertanian sedang bergerak menuju modern yang dipercepat dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan yang dilandasi semangat desentralisasi, demokrasi, dan partisipasi. Kemajuan ini terganggu oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sampai batas tertentu, UU No. 23/2014 mengancam keberadaan lembaga penyuluhan pertanian daerah. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis masa depan modernisasi penyuluhan pertanian di Indonesia.

## Pengaruh Akuntansi AkruaI terhadap Perilaku Aparatur dengan Perangkat Pendukung sebagai Variabel Moderating

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	352.63.SAR.p
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Aparatur dan Kelembagaan Pemerintah Daerah
Penerbit	Seminar Nasional Indocompac
Pengarang	Sarwenda Biduri Dina Dwi Oktavia Rini
Tahun Terbit	2016
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	Keberhasilan Penerapan PP. No.71 Tahun 2010 yang berisi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual tidak terlepas dari beberapa faktor yaitu perilaku aparatur di lapangan beserta perangkat pendukungnya. Setelah dikeluarkannya PP No. 71 Tahun 2010 sebagai tindak lanjut dari UU Nomor 17 Tahun 2003, tidak ada alasan bagi pemerintah untuk menunda pelaksanaan akuntansi berbasis akrual. Penggunaan basis akrual ini telah dimulai sejak tahun anggaran 2013 oleh pemerintah pusat. Diharapkan semua organisasi pemerintah termasuk pemerintah daerah, sudah melaksanakan Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI (APBA) paling lambat akhir tahun 2015.

## Peningkatan Potensi Sumber Daya Aparatur Daerah

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	352.63.ANG.p
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Aparatur dan Kelembagaan Pemerintah Daerah
Penerbit	Jurnal PUBLICIANA
Pengarang	Angkasawati
Tahun Terbit	2016
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	<p>Menjadikan aparatur yang profesional dalam rangka menunjukkan kapasitas, identitas serta potensi tersembunyi yang ada dalam setiap aparatur menjadi bahan pemikiran yang penting dalam peningkatan potensi sumber daya manusia khususnya di pemerintah daerah pada saat ini. Aparatur dituntut untuk mampu memaksimalkan kapasitas potensial yang dimilikinya, kemudian diaplikasikan secara langsung kedalam tugas pokok dan fungsi mereka sebagai sosok customer atau pelayan yang responsif terhadap keinginan, keperluan atau kebutuhan para pelanggannya baik internal maupun eksternal. Era reformasi membawa perubahan yang tidak kalah besarnya terutama bagi pemerintah selaku eksekutif, sebagai lembaga pelayanan masyarakat, pemerintah atau birokrasi menjadi jembatan antara aspirasi masyarakat yang diakomodir oleh institusi politik melalui lembaga legislatif dengan masyarakat riil yang secara langsung menerima dan menikmati pelayanan yang diberikan oleh birokrasi.</p>

## Evaluasi Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Sumber Daya Aparatur (Studi Di Badan Kepegawaian Daerah Kota Magelang)

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	352.6.MUL.e
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Aparatur dan Kelembagaan Pemerintah Daerah
Penerbit	Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Universitas Brawijaya
Pengarang	Mulyaningsih Mulyaningsih
Tahun Terbit	2017
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	Pendidikan dan pelatihan kompetensi yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kota Magelang belum dievaluasi. Dalam penelitian dilakukan evaluasi pelaksanaan pelatihan kompetensi Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual. Tesis ini bertujuan untuk menganalisis evaluasi penyelenggaraan diklat (pelatihan) kompetensi sumber daya personel dengan aspek kajian meliputi kurikulum pelatihan, waktu pelatihan, pelatihan metode pembelajaran, pelatih/dosen, peserta diklat, sarana dan prasarana pelatihan, pelatihan panitia dan pelatihan anggaran menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.

## **Intersepsi Budaya Lokal dalam Membentuk Model Pola Perilaku Aparatur Pemerintah Putra Daerah di Kabupaten Puncak Jaya**

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	352.63.MUL.i
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Aparatur dan Kelembagaan Pemerintah Daerah
Penerbit	Jurnal Ekologi Birokrasi
Pengarang	Mulyadi Mulyadi
Tahun Terbit	2017
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	Kajian ini dimaksudkan untuk mengetahui bentuk-bentuk perilaku aparatur pemerintahan asli putra daerah di Kabupaten Puncak Jaya sebagai akibat adanya intersepsi budaya lokal. Kajian ini berdasarkan observasi partisipasi pasif, berdasarkan pengalaman dan telaah dokumen terkait fokus kajian.

## Optimalisasi Kelembagaan Kecamatan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Malalayang Kota Manado

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	322.YOK.o
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Aparatur dan Kelembagaan Pemerintah Daerah
Penerbit	Jurnal Ilmu Politik
Pengarang	Yokpedi Lette
Tahun Terbit	2017
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	Kelembagaan kecamatan Malalayang dalam tata pemerintahan daerah telah mengalami perubahan secara struktural dari konsep wilayah menjadi perangkat daerah yang kedudukannya setara dengan dinas teknis yang ada di kota Manado. Perubahan kedudukan tersebut membawa dampak terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan. Koreksi pembenahan terkait dengan keberadaan kelembagaan kecamatan Malalayang terus berlanjut, bahkan menjadi isu strategis.

## **Pemberdayaan Aparatur Kecamatan Menurut Pp Nomor 19 Tahun 2008 di Kecamatan Siau Tengah Kabupaten Siau Tagulandang Biaro**

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	352.63.ART.p
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Aparatur dan Kelembagaan Pemerintah Daerah
Penerbit	Jurnal Ilmu Politik
Pengarang	Arther Nus Tamaka
Tahun Terbit	2017
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	Kecamatan merupakan salah satu perangkat daerah kabupaten kota yang memiliki posisi yang strategis, karena kecamatan menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menunjang apa yang diamanatkan dalam PP Nomor 19 Tahun 2008 menyangkut tugas pokok dan fungsi dari kecamatan, maka aparatur yang ada di kecamatan perlu untuk diberdayakan.

## Penataan Hubungan Kelembagaan Antara Pemerintah Provinsi Dengan Pemerintah Kabupaten kota

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	321.MOH.p
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Aparatur dan Kelembagaan Pemerintah Daerah
Penerbit	Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan
Pengarang	Moh Hasrul
Tahun Terbit	2017
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	Penataan hubungan antara Gubernur dengan Bupati/Walikota dalam pelaksanaan tata pemerintahan yang baik dan penataan kelembagaan yang dapat mensinergikan hubungan kewenangan pemerintahan yang efektif antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota. Pola hubungan antara Gubernur dengan Bupati/Walikota dalam kaitannya dengan pelaksanaan tata pemerintahan yang baik dalam pelaksanaan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, maka hubungan antara Gubernur dengan Bupati/Walikota bersifat bertingkat di mana Gubernur dapat melakukan peran pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

## **Pengaruh Kualitas Aparatur Daerah dan Regulasi terhadap Manajemen Aset pada Pemerintah Kota Banda Aceh**

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	352.63.ROS.p
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Aparatur dan Kelembagaan Pemerintah Daerah
Penerbit	Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah
Pengarang	Rosihan Rosihan Bonifasia Elitha Bharanti Westim Ratang
Tahun Terbit	2017
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	Setiap daerah dituntut untuk dapat mengelola aset secara efisien dan efektif. Untuk itu, penelitian ini dilakukan di Pemerintah Provinsi Papua dengan mengkaji pengaruh kualitas aparatur daerah, regulasi, sistem informasi pengelolaan aset, dan komitmen pengelolaan aset. Metode deskriptif digunakan dengan menggunakan kuesioner untuk pengumpulan data dan regresi untuk analisis data.

## Pengaruh Kualitas Aparatur Daerah, Regulasi, Sistem Informasi dan Komitmen Terhadap Manajemen Aset

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	352.63.IQL.p
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Aparatur dan Kelembagaan Pemerintah Daerah
Penerbit	Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi
Pengarang	Iqlima Azhar
Tahun Terbit	2017
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	Setiap daerah dituntut untuk dapat mengelola aset secara efisien dan efektif. Untuk itu, penelitian ini dilakukan di Pemerintah Provinsi Papua dengan mengkaji pengaruh kualitas aparatur daerah, regulasi, sistem informasi pengelolaan aset, dan komitmen pengelolaan aset. Metode deskriptif digunakan dengan menggunakan kuesioner untuk pengumpulan data dan regresi untuk analisis data.

## Peranan Badan Kepegawaian Daerah dalam Penempatan Aparatur Sipil Negara Pada Jabatan Struktural Di Kabupaten Pelalawan

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	352.63.ANI.p
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Aparatur dan Kelembagaan Pemerintah Daerah
Penerbit	Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau
Pengarang	Anisa Rezki Utari Erman Erman
Tahun Terbit	2017
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	Kepegawaian harus sesuai dengan prinsip “the right man, on the right place”. Kepegawaian diarahkan pada penempatan kepegawaian pada posisi yang tepat sesuai dengan kualifikasinya. Namun pada kenyataannya masih banyak pemerintah yang mengabaikan aturan tersebut. Fenomena inilah yang dijadikan sebagai latar belakang penelitian. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pelalawan sebagai salah satu instansi pemerintah di bidang kepegawaian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Aparatur Penempatan Badan Tenaga Kerja Daerah Pada Jabatan Struktural Sipil Negara di Pelalawan. Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Jenis data primer sekunder.

## Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Kualitas Kinerja Yang Lebih Baik Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	352.63.ELB.p
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Aparatur dan Kelembagaan Pemerintah Daerah
Penerbit	Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Pemerintahan
Pengarang	Elbert Agusta Imanuel Jaya
Tahun Terbit	2017
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	Dalam upaya pelayanan aparatur pemerintah daerah perlu adanya peningkatan SDM (Sumber Daya Manusia) sarana dan prasarana perlu ditingkatkan sehingga bisa memberikan pelayanan yang terbaik dan berkualitas. Dalam hal ini kita ketahui kinerja aparatur pemerintah daerah ini masih banyak yang perlu dibenahi Rendahnya profesionalisme dan kompetensi PNS Masih banyaknya tumpang tindih kewenangan antar instansi, aturan yang tidak sinergis dan tidak relevan dengan perkembangan aktual,dan masalah-masalah lainnya.

## Reformasi Birokrasi dalam Penataan Kelembagaan Pemerintahan Daerah di Pemrov

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	320.IND.r
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Aparatur dan Kelembagaan Pemerintah Daerah
Penerbit	Dialektika
Pengarang	Indriyati Indriyati
Tahun Terbit	2017
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	<p>Penelitian ini mengkaji reformasi birokrasi di Pemprov. NTT melalui pelaksanaan kebijakan Penataan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkup Pemrov. NTT sesuai PP No. 18 Tahun 2016. Namun sebenarnya pelaksanaan kebijakan ini merupakan Perubahan dari Peraturan Pemerintah sejenis sebelumnya yaitu PP No. 41 Tahun 2007. Tentunya terdapat beberapa Perubahan nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berdasarkan peraturan itu. Namun yang terpenting adalah bahwa tujuan utama kebijakan tersebut harus dapat terwujud. Dimana Perubahan nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini, akan menghasilkan nilai efisiensi dan efektifitas kelembagaan yang lebih baik.</p>

## Urgensi Kebijakan Menetapkan Kelembagaan Penelitian dan Pengembangan di Daerah

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	320.072.TEG.u
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Aparatur dan Kelembagaan Pemerintah Daerah
Penerbit	Jurnal Kebijakan Pembangunan
Pengarang	Teguh Narutomo
Tahun Terbit	2017
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	<p>Tuntutan terhadap kebijakan berbasis riset sudah menjadi tuntutan yang lazim di hampir semua belahan dunia, tidak terkecuali Indonesia. Tetapi praktik yang berlaku khususnya di hampir semua penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang bertanggung jawab terhadap pengeluaran kebijakan di daerah ternyata masih belum bisa merealisasikannya secara maksimal. Pada kenyataannya banyak kebijakan yang lahir tanpa didasari oleh riset dan tidak sedikit kebijakan tersebut tidak bisa operasional serta harus direvisi atau bahkan dicabut kembali.</p>

## Analisis terhadap Kinerja Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	332.SAR.a
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Aparatur dan Kelembagaan Pemerintah Daerah
Penerbit	Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya
Pengarang	Sardio Kartoprawiro Yohanes Susanto
Tahun Terbit	2018
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	Tujuan penelitian: Dalam otonomi daerah, pemerintah pusat memberi wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengelola keuangannya secara mandiri. Masyarakat juga semakin menyadari akan hak dan kewajiban sebagai warga Negara dan lebih dapat menyampaikan aspirasi yang membangun seperti perbaikan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, masyarakat menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam sistem pemerintah daerah. Transparansi dapat diartikan sebagai hak masyarakat untuk mengetahui akan kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam pengelolaan sumber daya daerah dan hasil dari pengelolaan sumber daya yang ada di daerah.

## Model Harmonisasi Hubungan Wewenang antara Kepala Desa dengan Badan Perwakilan Desa (BPD) dalam Pembentukan Peraturan Desa

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	322.SYA.m
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Aparatur dan Kelembagaan Pemerintah Daerah
Penerbit	Halu Oleo Law Review
Pengarang	Syahbudin Syahbudin Herman Herman La Ode Syukur
Tahun Terbit	2018
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	Sumberdaya aparatur desa sebagai penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam penyelenggaraan dan penatalaksanaan pemerintahan desa. Sumberdaya aparatur penyelenggara pemerintahan desa merupakan aspek fundamental khususnya berkaitan dengan penyusunan dan pembentukan peraturan desa untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan di desa dalam penatalaksanaan peraturan desa tersebut tidak multitafsir dan bertentangan dengan peraturan-peraturan yang ada di atasnya. Desa sebagai daerah otonom yang secara mandiri membentuk peraturannya sendiri guna penyelenggaraan pemerintahan desa.

## **Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis)**

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	352.63.MUH.p
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Aparatur dan Kelembagaan Pemerintah Daerah
Penerbit	Jurnal Akuntansi Syariah
Pengarang	Muhammad Junery Norhanisah Norhanisah
Tahun Terbit	2018
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh anggaran berbasis kinerja terhadap peningkatan kinerja aparatur pemerintah daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Bengkalis yang sedang mengalami perkembangan yang pesat dalam pembangunannya. Metode yang digunakan penulis adalah metode deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti yaitu dengan menyebarkan kuesioner dan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan juga sumber lain yang berhubungan dengan topik yang dibahas.

## Tantangan Media Center pada Tahap Peralihan; Studi Deskriptif Kualitatif Komponen Kelembagaan Media Center Kota Dumai

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	70.4.VIE.t
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Aparatur dan Kelembagaan Pemerintah Daerah
Penerbit	Jurnal Penelitian Komunikasi dan Pembangunan
Pengarang	Vience Mutiara Rumata Annisa Rizkina Rosa
Tahun Terbit	2018
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	Kota Dumai merupakan salah satu penerima bantuan perifer media center dari Kemenkominfo pada tahun 2015. Awal tahun 2017, Bagian Kominfo Sekretariat Daerah Kota Dumai dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota. Alhasil, pengelolaan media center yang sebelumnya menjadi tugas Dinas Perhubungan Kota, dialihkan ke Bagian Kominfo. Artikel ini mengkaji tantangan media center dari aspek kelembagaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Data primer diperoleh dari wawancara empat narasumber kunci yang terlibat dalam pengelolaan media center ini.

## Analisis Pemberdayaan Aparatur Pemerintahan Daerah dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Pegawai Di Bappeda Kabupaten Pangandaran

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	352.6.EMA.a
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Aparatur dan Kelembagaan Pemerintah Daerah
Penerbit	<i>Journal of management Review</i>
Pengarang	Emay Irmayanti Enas Uung Runalan Soedarmo
Tahun Terbit	2019
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	Tulisan ini dilatarbelakangi oleh adanya beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Kabupaten Pangandaran yang antara lain masih adanya pegawai yang kurang memiliki kinerja yang baik, hal ini diduga disebabkan oleh kurangnya pemberdayaan aparatur pemerintah di Bappeda. Dalam penelitian ini digunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Informan dalam penelitian ini adalah pegawai Bappeda Kabupaten Pangandaran sebanyak 6 orang. Pendekatan yang peneliti gunakan yaitu pendekatan naturalistik kualitatif.

## Distorsi dalam Pelaksanaan Asas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	351.REZ.d
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Aparatur dan Kelembagaan Pemerintah Daerah
Penerbit	Journal I La Galigo
Pengarang	Rezal Hadi Basalamah
Tahun Terbit	2019
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	<p>Pelaksanaan asas penyelenggaraan Pemerintah daerah yang baik telah mengalami beberapa perbaikan-perbaikan, terakhir adalah Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 dimana dalam Pasal 58 menjelaskan ada 10 asas penyelenggaraan pemerintahan, tentu hal ini bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat secara adil dan merata sesuai dengan cita-cita otonomi daerah. Namun dalam pengimplementasiannya masih terdapat banyak distorsi-distorsi sehingga perlu segera direformasi dari segi Kelembagaan dan Tatalaksana, Sumber daya manusia dan Personalia, sampai dengan Akuntabilitas dan Pelayanan publik sehingga dapat mewujudkan pemerintahan yang baik.</p>

## Hubungan Kapasitas Aparatur dengan Perwujudan *Good Governance*

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	352.63.YUN.h
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Aparatur dan Kelembagaan Pemerintah Daerah
Penerbit	Dialektika
Pengarang	Yunus Yunus
Tahun Terbit	2019
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	<p>Pasca gerakan reformasi tahun 1998, terjadi pergeseran paradigma yang berkembang dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Tuntutan pelayanan administrasi publik yang lebih baik dari sebelumnya, menjadi kebutuhan yang harus dipenuhi oleh instansi pemerintah penyelenggara pelayanan publik. Gugatan itu muncul seiring dengan perkembangan era reformasi dan otonomi daerah serta sejak jatuhnya rezim Orde Baru. Salah satu bentuk pemerintahan (<i>good governance</i>) adalah dengan adanya citra pemerintahan yang demokratis. Paradigma <i>good governance</i> menekankan pentingnya hubungan paralel antara lembaga negara, pasar dan masyarakat.</p>

## Implementasi Zakat Profesi terhadap Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	352.63.FAI.i
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Aparatur dan Kelembagaan Pemerintah Daerah
Penerbit	Al-Mizan
Pengarang	Faisal Pakaya Lahaji Lahaji
Tahun Terbit	2019
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	Penelitian ini bertujuan untuk membahas implementasi zakat profesi pada Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Kabupaten Gorontalo. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan metode pengumpulan data berupa observasi, wawancara, angket dan dokumentasi. Data yang terkumpul diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif.

## **Pembinaan Aparatur terhadap Peningkatan Kinerja pada Kanor Lurah Gebangrejo Barat Kecamatan Poso Kota**

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	352.63.RIL.p
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Aparatur dan Kelembagaan Pemerintah Daerah
Penerbit	Jurnal Ilmiah Administratie
Pengarang	Rilfayanti Thomassawa
Tahun Terbit	2019
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	<p>Pembinaan Sumber Daya Manusia berarti kegiatan yang dilakukan terhadap keberadaan Sumber Daya Manusia (Pegawai) dalam suatu Organisasi, agar mereka lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam melakukan pekerjaannya dengan sebaik-baiknya dan seefektif mungkin. Sehingga untuk mewujudkan pegawai sebagaimana yang dimaksud diatas maka Pegawai Negeri Sipil perlu dibina dengan sebaik-baiknya. Adapun tujuan pembinaan ini untuk membentuk sikap aparatur negara agar berorientasi kepada pembangunan dan bertindak sebagai pemrakarsa pembaharuan dan bertindak sebagai penggerak pembangunan.</p>

## Pengaruh Kompetensi Aparatur Daerah dan Pemahaman Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi Pada Skpd Kota Padangsidempuan

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	352.63.YAN.p
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Aparatur dan Kelembagaan Pemerintah Daerah
Penerbit	<i>Journal Economy and Currency Study</i>
Pengarang	Yani Sukriah Siregar
Tahun Terbit	2019
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	Perkembangan sistem informasi akuntansi (SIA) belum dapat dimanfaatkan para aparatur daerah dalam mengelola keuangannya dengan baik. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kompetensi aparatur daerah dan pemahaman SIA berpengaruh terhadap penggunaan SIA. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian survei yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh kompetensi aparatur daerah dan pemahaman sistem informasi akuntansi terhadap penggunaan sistem informasi akuntansi. Populasi penelitian ini adalah SKPD Kota Padangsidempuan yang berjumlah 30 SKPD

## Peran Aparatur Bidang Diklat dalam Meningkatkan Kompetensi Aparatur di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	352.63.TUE.p
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Aparatur dan Kelembagaan Pemerintah Daerah
Penerbit	Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik
Pengarang	Tueno Nolfi S
Tahun Terbit	2019
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Faktor-Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Reboisasi di Kecamatan Bulango Ulu Kabupaten Bone Bolango. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik Observasi, Wawancara dan pencatatan data sekunder.

## **Pengembangan Kompetensi Aparatur; studi Kasus di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bone Bolango**

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	352.63.FEN.p
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Aparatur dan Kelembagaan Pemerintah Daerah
Penerbit	Universitas Negeri Gorontalo
Pengarang	Fenti Prihatini Tui
Tahun Terbit	2020
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengembangan kompetensi aparatur di bidang pelayanan perizinan daerah. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus.

# RINGKASAN KAJIAN

## Kajian, analisis dan evaluasi UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	320.8.SEK.k
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Aparatur dan Kelembagaan Pemerintah Daerah
Penerbit	Sekretariat Jenderal DPR RI
Pengarang	Sekretariat Jenderal DPR RI
Tahun Terbit	2019
Tipe File	Ringkasan Kajian
Deskripsi	Dalam UU Pemda terdapat 2 (dua) pendekatan yaitu “Desentralisasi” dan “Dekonsentrasi”. Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Sedangkan dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/walikota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.

# LAPORAN

## Kebijakan Penataan Kelembagaan Berdasarkan Pp No 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	320.8.MAK.k
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Aparatur dan Kelembagaan Pemerintah Daerah
Penerbit	Direktorat jenderal otonomi daerah
Pengarang	Makmur marbun
Tahun Terbit	2017
Tipe File	Laporan
Deskripsi	Paparan ini menggambarkan mengenai kedudukan lembaga lembaga dalam sistem ketatanegaraan sesuai UUD 1945. Kedudukan tersebut terus mengalami perkembangan dengan adanya berbagai bentuk penataan urusan pemerintahan. Dijelaskan mengenai dasar hukum dan tujuan penataan perangkat daerah. Penjabaran lebih lanjut melalui muatan yang terkandung dalam PP nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

## **Analisis Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah (Studi Pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Nias Utara)**

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	352.63.DWI.a
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Aparatur dan Kelembagaan Pemerintah Daerah
Penerbit	Universitas Sumatera Utara
Pengarang	Dwi Patricia Zega
Tahun Terbit	2017
Tipe File	Laporan
Deskripsi	Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Nias Utara adalah organisasi publik yang memiliki tugas pokok dan fungsi membantu penyusunan konsep kebijakan Kepala Daerah di bidang pemerintahan serta koordinasi, monitoring, evaluasi dan pengendalian atas pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan memberikan pelayanan administrasi kepada para pegawai.

# **KEUANGAN DAERAH**

**BUKU**

## Buku Pintar Pengelolaan Keuangan Daerah

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	352.14.DRS.b
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Keuangan Daerah
Penerbit	Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri
Pengarang	Drs. Arsan Latif M.Si Rikie dkk
Tahun Terbit	2019
Tipe File	Buku
Deskripsi	Buku ini disusun dengan tujuan untuk memudahkan Pemerintah Daerah dalam memahami esensi dan menerapkan norma-norma yang terkandung pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik sehingga seluruh aktor pengelola keuangan daerah dapat memaksimalkan perannya untuk dapat menjawab seluruh tantangan dan permasalahan pengelolaan keuangan daerah yang ada saat ini.

# JURNAL

## Otonomi Daerah dan Pola Hubungan Keuangan Pusat-Daerah

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	658.15.SUD.o
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Keuangan Daerah
Penerbit	Bestari
Pengarang	Sudarti
Tahun Terbit	1998
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	Selama ini di Indonesia sebagai negara kesatuan memiliki ciri utama kekuasaan yang sangat besar dan dominan pada pemerintah pusat sehingga menimbulkan kecenderungan untuk lebih banyak memberikan kewenangan kepada daerah dalam segala hal. Namun demikian, sebagaimana umumnya produk Perundang-undangan yang mengatur otonomi daerah masih bersifat simbolik sehingga masih diperlukan undang-undang baru yang lebih operasional. Apabila diinginkan adanya otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab maka kebijakan pemberian bantuan harus lebih diarahkan pada kebutuhan daerah setempat untuk mengejar ketinggalannya dengan daerah lain dan mengurangi tingkat ketergantungan pada pusat.

## **Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Analisis Kemampuan Keuangan Daerah (Studi di Kabupaten Bantul, Yogyakarta)**

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	352.14.LIL.a
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Keuangan Daerah
Penerbit	Jurnal Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan
Pengarang	Lilies Setiartiti
Tahun Terbit	2002
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	Peran pemerintah daerah dalam menggali sumber daya lokal akan menentukan kisah sukses pemerintah daerah. Studi ini menyimpulkan bahwa pemerintah daerah memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap pemerintah pusat terutama dalam membiayai pengeluaran rutin pemerintah. Peran pemerintah daerah dapat dilakukan dengan meningkatkan Penerimaan Asli Daerah (PAD).

## Bagi Hasil Pajak Pertambahan Nilai: Sebuah Alternatif Penguatan Keuangan Daerah di Era Desentralisasi

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	352.14.ROB.b
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Keuangan Daerah
Penerbit	Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia
Pengarang	Robert A. Simanjuntak
Tahun Terbit	2006
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	<p>Sistem keuangan publik di Indonesia sampai saat ini masih diwamai oleh ketimpangan hubungan antara Pusat dengan Daerah. Sebagian besar sumber-sumber keuangan yang potensial berada dalam kewenangan Pusat, sementara pada umumnya Daerah hanya menguasai sumber-sumber penerimaan sendiri yang kurang memadai relatif dibandingkan 'besar pengeluarannya. Konsekuensinya adalah Daerah menjadi amat bergantung kepada transfer dari Pusat. Ketergantungan tersebut terasa ironis ketika negeri ini melakukan penataan ulang sistem penyelenggaraan pemerintahannya, dari sistem yang tersentralisasi menjadi sistem dengan otonomi daerah yang luas.</p>

## Desentralisasi Fiskal Sebagai Bentuk Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat Kepada Daerah

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	352.3.IND.d
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Keuangan Daerah
Penerbit	Efisiensi
Pengarang	Indarto Waluyo
Tahun Terbit	2009
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	<p>Refoimasi yang terjadi di era tahun 90 an mendorong keinginan pemberian wewenang yang lebih luas dari pemerintah pusat kepada daerah untuk mengelola keuangannya sendiri. Laporan bank dunia tahun 1999 mengemukakan bahwa terjadi gerakan-gerakan lokalisasi di sejumlah Negara. Lokalisasi yang mencerminkan hasrat lebih besar dari penduduk setempat untuk lebih banyak turut bersuara dalam pemerintahan, mewujudkannya dalam bentuk tuntutan akan identitas daerah. Hal ini mendorong pemerintah nasional untuk memberikan desentralisasi yang lebih luas kepada pemerintah daerah dan kota sebagai cara yang terbaik untuk mengatur dan menangani Perubahan-Perubahan yang mempengaruhi politik domestik dan pola pertumbuhan.</p>

## Kewenangan Daerah di Bidang Penanaman Modal

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	351.17.FER.k
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Keuangan Daerah
Penerbit	Serambi Hukum
Pengarang	Fery Dona
Tahun Terbit	2010
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah, pada substansinya memperluas wewenang daerah termasuk di dalamnya mengenai Pelayanan administrasi penanaman modal. Dalam era otonomi daerah pemerintah daerah menjadi ujung tombak masuknya investasi, baik atau buruknya iklim investasi banyak ditentukan pemerintah daerah

## Optimalisasi Penerimaan Daerah Di Dalam Peningkatan Kemampuan Keuangan Daerah Kota Pekanbaru

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	658.15.SYA.o
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Keuangan Daerah
Penerbit	Jurnal Ekonomi Universitas Riau
Pengarang	Syafril Basri
Tahun Terbit	2011
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	Pemerintah daerah saat ini diberi kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuannya antara lain adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta menciptakan persaingan yang sehat antar-daerah dan mendorong timbulnya inovasi.

## Analisa Keuangan Daerah Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Studi Di Kabupaten Lombok Tengah)

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	352.4.RUS.a
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Keuangan Daerah
Penerbit	UPN JATIM Repository
Pengarang	Rusdi Hidayat Nugroho
Tahun Terbit	2012
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	Penelitian ini berjudul "Analisa Keuangan Daerah Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (studi di Kabupaten Lombok Tengah) ". Bertujuan untuk mengetahui tingkat pengelolaan APBD. Kabupaten Lombok Tengah. Analisa data dengan membandingkan antara target dan realisasi, belanja serta pembiayaan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2006 sampai 2010. Analisa data menggunakan efektifitas dan efisiensi pajak daerah, efisiensi belanja, kemampuan keuangan daerah serta perkembangan SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran). Efisiensi yang dimaksud yaitu rasio antara realisasi belanja dengan pendapatan daerah dalam persentase, efektifitas adalah rasio antara realisasi pendapatan daerah dengan target pendapatan.

## Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	352.14.DYA.a
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Kuangan Daerah
Penerbit	Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia
Pengarang	Dyah Setyaningrum Febriyani Syafitri
Tahun Terbit	2012
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 620 LKPD Kabupaten/Kota di Indonesia tahun 2008-2009. Rata-rata tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah sebesar 52,09%. Karakteristik pemerintah daerah yang terdiri dari umur administratif pemerintah daerah, kekayaan pemerintah daerah, dan ukuran legislatif memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD, sedangkan intergovernmental revenue memiliki pengaruh negatif yang signifikan. Ukuran pemerintah daerah, diferensiasi fungsional, spesialisasi pekerjaan, rasio kemandirian keuangan daerah dan pembiayaan utang terbukti tidak mempunyai pengaruh terhadap tingkat pengungkapan LKPD.

## Kupas Tuntas Hubungan Keuangan Pusat Daerah

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	658.15.YUN.k
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Keuangan Daerah
Penerbit	Seknas Fitra
Pengarang	Yuna Farhan Yenny Sucipto dkk
Tahun Terbit	2012
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	Tujuan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat daerah dengan mendekatkan pelayanan publik di daerah. Perimbangan keuangan pusat dan daerah merupakan konsekuensi dari desentralisasi penyerahan urusan pusat dan daerah. Prinsip <i>money follow function</i> yang bermakna pendanaan harus mengikuti pembagian urusan dan tanggung jawab dari masing-masing tingkat Pemerintahan. Pasca satu dasawarsa diberlakukan, paket UU otonomi daerah telah mengalami dua kali revisi. Namun masih menjadi pertanyaan besar, apakah kebijakan perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah terkini, sudah dilakukan secara proporsional, adil, demokratis dan sesuai dengan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah?.

## Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	352.14.KUR.a
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Keuangan Daerah
Penerbit	Jurnal EMBA
Pengarang	Kurniawan M. Manangkalangi
Tahun Terbit	2013
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	Standar Akuntansi Pemerintahan adalah Prinsip Akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah. Standar Akuntansi Pemerintahan diatur dalam Peraturan Pemerintah No.24 tahun 2005. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan gambaran dari kinerja Pemerintah Daerah dalam satu periode Akuntansi. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif. Data diperoleh melalui penelitian lapangan yaitu dengan mengadakan observasi, wawancara pada bagian keuangan serta mengumpulkan catatan dan dokumen dengan objek yang sedang diteliti yang berhubungan dengan penyajian Laporan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

## Analisis Rasio Keuangan Daerah Dalam Mempengaruhi Belanja Modal Publik Bagi Pertumbuhan Ekonomi

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	352.14.AUL.a
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Keuangan Daerah
Penerbit	Jurnal Penelitian Humaniora
Pengarang	Aula Ahmad Hafidh
Tahun Terbit	2013
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh rasio keuangan daerah terhadap belanja modal publik bagi pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian menggunakan data APBD dan PDRB Kota dan Kabupaten di DIY periode 2006-2011.

## Otonomi Daerah Untuk Penguatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pengelolaan Keuangan dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah)

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	658.15.IKA.o
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Keuangan Daerah
Penerbit	Jurnal Ilmiah Mahasiswa
Pengarang	Ika Dina Amin
Tahun Terbit	2013
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	Masalah keuangan adalah masalah yang amat sensitif dan krusial dalam pelaksanaan otonomi daerah. Segala kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka desentralisasi ditentukan harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia sesuai dengan kewenangan yang diserahkan tersebut. Kewenangan yang dilimpahkan kepada Gubernur dalam rangka dekonsentrasi harus disertai pula dengan pembiayaan sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan. Pelaksanaan otonomi daerah tidak hanya mengalihkan beban dan tanggung jawab ke daerah, tetapi juga mengalihkan berbagai kewenangan dan hak-hak yang dikuasai oleh pusat kepada daerah.

## Pelaporan dan Pengungkapan Pos Belanja Modal Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kota Kotamobagu

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	658.15.NEL.p
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Keuangan Daerah
Penerbit	Jurnal EMBA
Pengarang	Nelby Triyana Pasambuna Sifrid S. Pangemanan Dulloh Afandi
Tahun Terbit	2013
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaporan dan pengungkapan belanja modal pada Laporan Keuangan pemerintah Kota Kotamobagu. Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu metode deskriptif, yang menguraikan, menggambarkan, serta melukiskan suatu permasalahan yang ada kemudian membandingkannya dengan teori sehingga dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang berhubungan dengan objek yang diteliti.

## Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Kota Di Jawa Barat)

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	352.48.REN.p
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Keuangan Daerah
Penerbit	Proceeding PESAT (Psikologi, Ekonomi, Sastra, Arsitektur & Teknik Sipil)
Pengarang	Renny Nur'ainy Desfitriana Rooswhan Budi Utomo
Tahun Terbit	2013
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris pengaruh pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah tingkat Kota di Jawa Barat. Populasi penelitian adalah pemerintah daerah seluruh Indonesia. Sampel penelitian adalah Kota yang ada di Jawa Barat. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode <i>convenience sampling</i> . Data sekunder penelitian ini bersumber dari dokumen Laporan Realisasi APBD Kota di Jawa Barat tahun 2008-2010, yang diperoleh dari situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah.

## **Pengaruh Sektor Pariwisata Terhadap Kinerja Keuangan Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali**

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	353.7.NIK.p
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Keuangan Daerah
Penerbit	E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana
Pengarang	Ni Komang Widiastuti
Tahun Terbit	2013
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sektor pariwisata terhadap kinerja keuangan daerah dan kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Bali (2001-2010). Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali dan Biro Keuangan Setda Provinsi Bali. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis faktor dan analisis jalur.

## **Pengelolaan Dana Perimbangan Di Kabupaten Lumajang (Studi di Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang)**

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	352.48.RAT.p
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Keuangan Daerah
Penerbit	Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Pengarang	Ratno Andry Wardhana
Tahun Terbit	2013
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, penyerahan, pelimpahan wewenang urusan pemerintahan kepada pemerintah daerah harus diikuti dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya secara adil. Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah merupakan salah satu poin penting dalam pelaksanaan otonomi daerah. Salah satu pelimpahan wewenang yang paling penting adalah pelimpahan kewenangan dalam urusan keuangan daerah, dalam hal ini adalah perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Pelimpahan tersebut melalui dana perimbangan bertujuan mengatur pemerataan keuangan antar daerah.

## Pengelolaan Keuangan Daerah Di Era Otonomi Daerah

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	352.48.DHI.p
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Keuangan Daerah
Penerbit	Jurnal Ilmu Hukum
Pengarang	Dhils Noviades
Tahun Terbit	2013
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	Kajian ini membahas tentang pengelolaan keuangan di era otonomi daerah. Pembangunan merupakan upaya perbaikan menuju kehidupan yang lebih baik, melalui memaksimalkan potensi negara. Sistem pembangunan Indonesia pada mulanya menerapkan sistem yang berpusat pada pemerintah pusat, namun karena tidak mampu menyebarkan perekonomian negara secara merata, maka pemerintah menerapkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian menjadi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004.

## Analisis Belanja Modal dan Penyajiannya Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tomohon

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	352.14.HAR.a
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Keuangan Daerah
Penerbit	Jurnal EMBA
Pengarang	Hariyati K. Danial Jantje J. Tinangon Harijanto Sabijono
Tahun Terbit	2014
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	Pengelolaan laporan keuangan telah mengalami kemajuan yang akuntabel dan transparan dalam semua aspek transaksi keuangan daerah. Anggaran belanja khususnya belanja modal merupakan hal yang sangat penting dalam penataan anggaran daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah belanja modal dan penyajiannya dalam laporan keuangan pemerintah kota Tomohon telah memadai dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif yaitu untuk menggambarkan belanja daerah dan penyajiannya pada pemerintah kota Tomohon.

## Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Masa Otonomi Daerah Pada Kabupaten Minahasa Tenggara

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	352.14.LAE.a
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Keuangan Daerah
Penerbit	Jurnal EMBA
Pengarang	Laedy Tamboto Jenny Morasa Lidia Mawikere
Tahun Terbit	2014
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui tingkat kemandirian, efektifitas dan efisiensi keuangan daerah pada Kabupaten Minahasa Tenggara. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif berupa data laporan realisasi anggaran selama tahun 2008-2012, dan untuk memperkirakan kemungkinan tingkat kemandirian, efektifitas, dan efisiensi ditahun-tahun yang akan datang digunakan analisis trend.

## Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pada Pemda Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	352.14.SUD.a
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Keuangan Daerah
Penerbit	Jurnal EMBA
Pengarang	Sudirman Pauwah Ivonne Saerang Silvya Mandey
Tahun Terbit	2014
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kondisi kinerja keuangan daerah Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara, untuk tahun anggaran 2008 sampai tahun 2012. Metode analisis yang digunakan deskriptif kuantitatif, bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan Pemda Kabupaten Kepulauan Sula tahun 2008 sampai 2012. Pengujian dilakukan dengan menggunakan empat variabel, kemandirian daerah, efektifitas, aktifitas, dan <i>debt service coverage ratio</i> (DSCR), untuk mengukur tingkat kinerja keuangan dari tiap-tiap variabel.

## Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	352.14.PAR.a
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Keuangan Daerah
Penerbit	Jurnal EMBA
Pengarang	Paramitha Sandy Mokodompit Sifrid S. Pangemanan Inggriani Elim
Tahun Terbit	2014
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	Pengukuran kinerja adalah suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran, dan strategi. Melalui pengukuran kinerja dapat diketahui kemajuan organisasi, serta meningkatkan kualitas dalam pengambilan keputusan, dan termasuk akuntabilitasnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah kota Kotamobagu, penelitian dilakukan di kantor walikota dan data yang digunakan adalah data kuantitatif berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif, untuk mengukur kinerja keuangan melalui rasio keuangan.

## Analisis Kinerja Keuangan Pemerintahan Kota Manado

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	352.14.EVR.a
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Keuangan Daerah
Penerbit	Jurnal EMBA
Pengarang	Evran Lexy Tambuwun Sifrid S. Pangemanan Dhullo Afandi
Tahun Terbit	2014
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	Kinerja keuangan menunjukkan kondisi keuangan serta kemampuan pemerintah dalam memperoleh dan menggunakan dana untuk pembangunan negara dan menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Untuk itu perlu diukur kinerja pemerintah, sejauh mana kemajuan yang dicapai oleh pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kinerja keuangan pada Pemerintah Kota Manado. Penelitian ini dilakukan di kantor Walikota Manado, data yang digunakan data kuantitatif berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2011-2013. Metode yang digunakan metode deskriptif kuantitatif untuk mengukur kinerja keuangan dengan rasio keuangan.

## Analisis Realisasi Anggaran Belanja Daerah Pemerintah Kota Manado T.A 2010-2012

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	352.14.MIR.a
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Keuangan Daerah
Penerbit	Jurnal EMBA
Pengarang	Mirki Vici S. Tenda Harijanto Sabijono Victorina Z. Tirayoh
Tahun Terbit	2014
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis belanja daerah pada pemerintah kota manado. menyusun anggaran belanja daerah diusulkan dan harus ada persetujuan dari DPRD. Selanjutnya dibuat pertanggungjawaban dalam laporan realisasi anggaran. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif yaitu dengan mempelajari belanja daerah yang diterapkan membandingkan dengan teori dan literatur lainnya. Pemerintah Kota Manado melalui Badan Pengelolaan keuangan dan Barang Milik Daerah (BPK-BMD) membuat laporan anggaran belanja daerah dan dituliskan dalam catatan atas laporan keuangan.

## Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Bitung

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	352.14.ARD.a
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Keuangan Daerah
Penerbit	Jurnal EMBA
Pengarang	Ardon Fridolin Honga Ventje Ilat
Tahun Terbit	2014
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	Tujuan penelitian yaitu untuk menganalisa dan mengetahui realisasi pendapatan dan belanja daerah pemerintah kota Bitung. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif yaitu dengan mempelajari akuntansi sektor publik ataupun sistem akuntansi pemerintahan yang diterapkan di lapangan menurut analisis rasio-rasio keuangan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, Badan Pengelola Keuangan Dan Barang Milik Daerah (BPK-BMD) Pemerintah Kota Bitung dimana pada saat laporan realisasi anggaran diterapkan dan dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku serta untuk pertanggung jawaban, BPK-BMD Kota Bitung membuat laporan keuangan untuk dipertanggungjawabkan.

## Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah dan Keserasian Alokasi Belanja Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	658.15.FIR.p
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Kuangan Daerah
Penerbit	E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana
Pengarang	Firda Rizky Amalia Ida Bagus Putu Purbadharmaja
Tahun Terbit	2014
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	Otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang diproksikan dengan indeks pembangunan manusia. Dalam upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berperan dalam membiayai pembangunan di daerahnya sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat. Namun Kenyataannya, adanya peningkatan PAD belum tentu meningkatkan pembangunan manusia. Hal ini disebabkan karena belanja publik yang relatif rendah menyebabkan pelayanan publik yang tidak memadai bagi masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk menguji pengaruh kemandirian keuangan daerah dan keserasian alokasi belanja terhadap IPM di kabupaten/kota di Provinsi Bali tahun 2008-2012. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari Biro Keuangan Provinsi Bali yang selanjutnya dianalisis menggunakan analisis rasio keuangan dan regresi linear berganda.

## **Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Merauke**

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	658.3.CAE.p
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Keuangan Daerah
Penerbit	Jurnal Ilmu Ekonomi & Sosial Unmus
Pengarang	Caecilia Henny Setya Wati Marthen Adrian Izaak Nahumury
Tahun Terbit	2014
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Kabupaten Merauke. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh kualitas sumberdaya manusia terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah pada kabupaten Merauke. Populasi dalam penelitian ini Setda Kabupaten Merauke, sampel penelitian yang diambil sebanyak 34 responden. Analisis data dengan regresi sederhana. Pengolahan data menggunakan bantuan program SPSS versi 17.

## **Pengaruh Pengetahuan Anggota Dewan Tentang Anggaran terhadap Pengawasan Keuangan Daerah dengan Variabel Moderator Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik**

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	352.4.FAI.p
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Keuangan Daerah
Penerbit	Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Bisnis
Pengarang	Faisal Yusri Hazmi dkk
Tahun Terbit	2014
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	Penelitian ini meneliti tentang pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah dengan variabel moderator partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik. Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan survey terhadap seluruh populasi penelitian yang berada di DPRK Aceh Timur, Langsa dan Aceh Tamiang. Kemudian yang menjadi unit analisis adalah anggota dewan yang membidangi komisi anggaran. Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang kemudian dianalisis menggunakan regresi berganda.

## Pengaruh Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	6584038.NUR.p
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Keuangan Daerah
Penerbit	Jurnal Manajemen Bisnis
Pengarang	Nur Laila Yuliani
Tahun Terbit	2014
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dan penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja pemerintah daerah dan akuntabilitas publik. Dorongan utama penelitian ini dilatarbelakangi oleh kajian empiris mengenai kinerja pemerintah daerah dan akuntabilitas publik yang masih beragam serta semakin pentingnya penilaian kinerja pemerintah daerah dan akuntabilitas publik sebagai bentuk pertanggungjawaban ke pemerintah pusat dan masyarakat. Sampel penelitian ini terdiri dari 104 pegawai di SKPD yang ada di Pemerintah Kabupaten Magelang.

## **Pola Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Studi Kasus Di Kabupaten Kudus Tahun 2007)**

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	352.4.ANG.p
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Keuangan Daerah
Penerbit	Seminar Nasional Dan Call For Papers UNIBA
Pengarang	Anggit Wicaksono, SH. MH
Tahun Terbit	2014
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	Partai politik sebagai peserta pemilihan umum mempunyai kesempatan memperjuangkan kepentingan rakyat secara luas, mengisi lembaga-lembaga negara, dan untuk membentuk pemerintahan. Partai politik berperan dalam pelaksanaan fungsi pendidikan politik, sosialisasi politik, perumusan dan penyaluran kepentingan serta komunikasi politik secara real akan meningkatkan kesadaran dan partisipasi politik masyarakat, merekatkan berbagai kelompok dan golongan dalam masyarakat, mendukung integrasi dan persatuan nasional, mewujudkan keadilan, menegakkan hukum, menghormati hak asasi manusia, serta menjamin terciptanya stabilitas keamanan.

**Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa**

***(Analysis Efficiency And Effectiveness Regional Financial Management In Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa)***

Kode Klasifikasi DDC	352.14.RIT.a
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Keuangan Daerah
Penerbit	Jurnal EMBA
Pengarang	Ritno H. Rondonuwu Jantje J. Tinangon Novi Budiarmo
Tahun Terbit	2015
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, untuk itu efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan diperlukan untuk membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan sosial masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah pendapatan dan belanja daerah di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa telah dilaksanakan secara efisien dan efektif. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif.

**Analisis Perbandingan Kemampuan Keuangan Daerah Pada Kota Bitung dan Kota Tomohon  
Periode Anggaran 2010 – 2014**

***(Comparative Analysis Of The Regional Financial Capability On Bitung City And Tomohon City At  
Fiscal Year 2010 - 2014)***

Kode Klasifikasi DDC	352.14.DON.a
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Keuangan Daerah
Penerbit	Jurnal EMBA
Pengarang	Donny Oktavianus Sri Murni Ivonne S. Saerang
Tahun Terbit	2015
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	Tujuan penelitian untuk mengetahui kemampuan keuangan daerah dan perbandingan tingkat kemampuan keuangan daerah Kota Bitung dan Tomohon periode 2010 – 2014. Metode yang digunakan Deskriptif Komparatif dan teknik pengumpulan data adalah data sekunder. Perhitungan dilakukan menggunakan analisis rasio kemandirian keuangan daerah, rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio indeks kemampuan rutin, rasio keserasian, rasio pertumbuhan. Data yang diambil adalah laporan realisasi APBD Kota Bitung dan Tomohon periode 2010-2014.

## Faktor Keperilakuan Organisasi Terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dengan Konflik Kognitif Sebagai Variabel Intervening Di Kabupaten Merauke

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	352.3.CAE.f
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Keuangan Daerah
Penerbit	Jurnal Ilmu Ekonomi & Sosial
Pengarang	Caecilia Henny Setya Wati Semuel Batlajery
Tahun Terbit	2015
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	Faktor berperilaku organisasi terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah dengan konflik kognitif sebagai variabel intervening di kabupaten merauke Tujuan dalam penelitian ini adalah Untuk menguji pengaruh faktor organisasional seperti dukungan atasan, kejelasan tujuan dan pelatihan akan meningkatkan kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah kabupaten Merauke dan untuk menguji pengaruh faktor organisasional seperti dukungan atasan, kejelasan tujuan dan pelatihan dapat meningkatkan konflik kognitif yang pada gilirannya akan meningkatkan kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Kabupaten Merauke.

## Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Laporan Keuangan Pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Selatan

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	351.17.RIA.i
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Keuangan Daerah
Penerbit	Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi
Pengarang	Ria Cheni Lopian
Tahun Terbit	2015
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	Penerapan sistem akuntansi keuangan dalam pengelolaan laporan keuangan pemerintah daerah adalah hal yang sangat penting. Laporan keuangan pemerintah daerah harus memenuhi karakteristik: relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Tujuan penelitian ini untuk melakukan analisis implementasi sistem akuntansi keuangan terhadap pengelolaan laporan keuangan. Penelitian ini menggunakan kuesioner terhadap 25 staf bidang keuangan di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Selatan.

**Pengaruh Optimalisasi Manajemen Aset Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Makassar**

***(The Effect Of The Optimization Of Regional Owned-Asset Management Towards The Quality Of Financial Report Of The Government Of Makassar Municipality)***

Kode Klasifikasi DDC	658.15.JOH.p
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Keuangan Daerah
Penerbit	Jurnal Administrasi Negara
Pengarang	John Gamara Tangke Halim Halim Gina Lucita
Tahun Terbit	2015
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	Manajemen aset daerah penting dalam mewujudkan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Optimalisasi Manajemen Aset Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Metode penelitian adalah metode kuantitatif dengan jenis penelitian korelatif. Populasi adalah Pengelola Barang dan Kepala Sub Bagian Perlengkapan di 52 Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan sampel sebanyak 104 orang responden ditetapkan secara <i>purposive sampling</i> . Data dikumpulkan dengan menyebarkan kuesioner dan telaah dokumen. Analisis data menggunakan uji normalitas, analisis regresi, dan uji hipotesis dengan bantuan SPSS.

## **Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Pada SKPD Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir)**

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	657.3.SUM.p
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Keuangan Daerah
Penerbit	Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau
Pengarang	Sumiyati
Tahun Terbit	2015
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan. Populasi dalam penelitian ini adalah pejabat eselon II dan III yang terdiri dari kepala SKPD, perbendaharaan SKPD bagian keuangan dan penerimaan SKPD di Kabupaten Rokan Hilir. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling. Data penelitian ini menggunakan data primer secara langsung melalui kuesioner dan dianalisis menggunakan SPSS 16. Data dianalisis untuk menguji hipotesis dengan menggunakan pendekatan analisis regresi linier berganda.

## Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Ambon

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	657.3.SAL.p
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Keuangan Daerah
Penerbit	2nd Conference in Business, Accounting, and Management 2015
Pengarang	Salomi J. Hehanussa
Tahun Terbit	2015
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Penelitian ini dilakukan di Pemerintah Kota Ambon. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini pada pegawai pemerintah daerah Kota Ambon, dosen Perguruan Tinggi, dan mahasiswa Fakultas Ekonomi, Jurusan Manajemen dan Akuntansi. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah <i>Proportionate Stratified Random Sampling</i> ; sampel kemudian ditentukan oleh 82 . Untuk penelitian ini data dianalisis menggunakan regresi linier berganda dengan alat bantu program statistik, setelah uji asumsi klasik terpenuhi.

## Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau)

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	352.14.HAR.a
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Keuangan Daerah
Penerbit	Jurnal SOROT
Pengarang	Harlinda
Tahun Terbit	2016
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Sumber daya manusia, teknologi informasi, pengendalian intern akuntansi, komitmen organisasi, pemahaman akuntansi, faktor eksternal terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual, laporan keuangan pemerintah harus memenuhi 4 karakteristik kualitatif/kualitas informasi berikut: relevan, andal, dapat dibandingkan, dapat dipahami. Penelitian ini dilakukan pada 83 Satuan Kerja Perangkat Daerah, terdiri dari Dinas dan Badan di Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Siak, dan Kota Pekanbaru dengan teknik pengambilan sampel secara purposive sampling. Teknik pengumpulan data melalui kuesioner yang disebarakan kepada 166 orang responden, meliputi kepala subbagian keuangan dan pegawai penatausahaan keuangan.</p>

## Analisis Kinerja Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Samarinda

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	352.14.SUY.a
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Keuangan Daerah
Penerbit	Ekonomia
Pengarang	Suyatin Rani Febri Ramadani Elfreda Aponia Lau
Tahun Terbit	2016
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	Penelitian ini bertujuan (1) untuk mengetahui dan menganalisis Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah Kota Samarinda periode 2010-2014 dilihat dari varians pendapatan, pertumbuhan pendapatan, derajat desentralisasi, kemandirian keuangan daerah, dan efektivitas pendapatan asli daerah. (2) untuk mengetahui dan menganalisis Kinerja Keuangan Belanja Daerah Kota Samarinda periode 2010-2014 dilihat dari varians belanja, pertumbuhan belanja, belanja operasi, belanja modal, dan efisiensi belanja. Adapun rasio keuangan yang digunakan meliputi: analisis varians (selisih) pendapatan, rasio pertumbuhan pendapatan, rasio kemandirian, Derajat Desentralisasi, rasio efektifitas PAD, analisis varians (selisih) belanja, rasio pertumbuhan belanja, rasio belanja operasi terhadap total belanja, rasio belanja modal terhadap total belanja dan rasio efisiensi belanja.

## Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	352.14.MUH.a
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Keuangan Daerah
Penerbit	Ekombis Review
Pengarang	Muhammad Zuhri Ahmad Soleh
Tahun Terbit	2016
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	Salah satu dampak positif dari pelaksanaan otonomi daerah adalah adanya pemekaran daerah provinsi maupun kabupaten/kota yang hampir terjadi di seluruh Indonesia. Salah satu daerah hasil dari pemekaran wilayah adalah Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu. Sebagai kabupaten baru yang tumbuh dimasa otonomi daerah, Kabupaten Kaur memiliki kewenangan untuk mengatur daerahnya sendiri. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi. Sedangkan metode analisis menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan rasio keuangan.

## Analisis Kinerja Pendapatan Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Aset dan Pendapatan Kabupaten Minahasa Selatan

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	352.14.LAD.a
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Keuangan Daerah
Penerbit	Jurnal EMBA
Pengarang	Lady Lampa Harijanto Sabijono
Tahun Terbit	2016
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	Salah satu misi untuk mewujudkan visi bangsa Indonesia, perwujudan otonomi daerah dalam rangka pembangunan daerah dan pemerataan pertumbuhan daerah. Sebagai prasyarat penting dalam pelaksanaan otonomi daerah bagaimana dilakukan upaya untuk meningkatkan penerimaan atau pendapatan daerah, baik melalui dana perimbangan maupun pendapatan asli daerah. Penelitian ini dilakukan pada Dinas Pengelolaan Keuangan Aset dan Pendapatan Kabupaten Minahasa Selatan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Kinerja Pendapatan pada Dinas Pengelolaan Keuangan Aset dan Pendapatan di Kabupaten Minahasa Selatan. Metode analisis data yang digunakan adalah menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan rasio keuangan yang meliputi analisis varians anggaran pendapatan, pertumbuhan pendapatan, derajat, desentralisasi, kemandirian daerah, dan efektivitas pendapatan asli daerah (PAD).

## Analisis Kondisi Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Di Aceh Dan Di Sumatera Utara

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	352.14.SUR.a
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Keuangan Daerah
Penerbit	Jurnal Bisnis dan Ekonomi
Pengarang	Suryani Hasan Basri Faisal
Tahun Terbit	2016
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	Indikasi keberhasilan otonomi daerah adalah terjadinya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, kehidupan demokrasi yang semakin maju, keadilan pemerataan, serta adanya hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah serta antar Daerah. Pada kenyataannya, tidak banyak daerah yang mampu mengelola potensi berbagai jenis pendapatan daerah secara maksimal, sehingga mampu secara nyata dan bertahap mewujudkan kemandirian keuangan daerah. Penelitian ini dilakukan untuk menguji dan menganalisis kondisi keuangan daerah kabupaten/kota di Aceh dan Sumatera Utara selama tahun anggaran 2011-2013 dengan menggunakan <i>Mann-Whitney U Test</i> .

**Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Antara Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara dan Maluku Utara (Periode 2010-2014)**

***(Comparative Analysis Financial Performance Between Regional Development Bank North Sulawesi And North Maluku (Period 2010-2014))***

Kode Klasifikasi DDC	352.14.PRE.a
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Keuangan Daerah
Penerbit	Jurnal EMBA
Pengarang	Preisdi Yohanes Rondonuwu Dedy Baramuli
Tahun Terbit	2016
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	Bank adalah lembaga intermediasi keuangan didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang dan menerbitkan <i>bank note</i> . BPD Sulut dan Malut adalah bank <i>Go Public</i> yang berada di kawasan Indonesia Bagian Timur. Informasi perbandingan kinerja keuangan pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) di Indonesia timur dapat menggambarkan masing-masing kinerja keuangan perbankan yang tidak terletak pada kawasan poros pembangunan di Indonesia. Penelitian bertujuan untuk mengetahui perbedaan kinerja keuangan BPD Sulut dan Maluku dengan menggunakan analisa rasio keuangan. Metode penelitian ini adalah analisis komparatif.

## Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	352.4.ARN.e
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Keuangan Daerah
Penerbit	Jurnal Ilmu Akuntansi
Pengarang	Arni Karina Dephy Noerainy
Tahun Terbit	2016
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	<p>Persoalan keuangan daerah merupakan salah satu unsur utama dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah daerah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah dilaksanakan. Untuk menganalisis kinerja keuangan daerah Pemprov DKI Jakarta, metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Adapun data yang digunakan pada penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pemprov DKI Jakarta di mana sampel yang diambil adalah tahun anggaran 2008–2012.</p>

## Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Auditor Terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas Dalam Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Oleh BPK RI Perwakilan Propinsi Jambi

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	352.4.NET.f
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Keuangan Daerah
Penerbit	Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora
Pengarang	Netty Herawaty Fitriani Mansur
Tahun Terbit	2016
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	Judul penelitian ini adalah Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Auditor Terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas Dalam Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Auditor secara simultan dan parsial Terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas Dalam Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi. Metode penelitian menggunakan analisis regresi berganda dengan terlebih dahulu mengkonversikan skala ordinal ke skala interval melalui metode interval berurutan ( <i>Method of successive interval</i> ).

## Hubungan Kerja Badan Pemeriksa Keuangan Pusat dengan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dalam Memeriksa Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan di Daerah

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	352.14.DES.h
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Keuangan Daerah
Penerbit	Diponegoro Law Review
Pengarang	Desyari Azhimy Wiyaliyanti Untung Dwi Hananto Henny Juliani
Tahun Terbit	2016
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan lembaga negara yang memiliki perwakilan di setiap provinsi di Indonesia, salah satunya di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kerja antara BPK Pusat dengan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dalam memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di daerah dan kendala yang terjadi dalam melakukan hubungan kerja serta solusi untuk kendala tersebut. Hubungan kerja tersebut diwujudkan dalam beberapa hal yaitu pemeriksaan yang dilakukan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, pemeriksaan tematik, pemeriksaan penghitungan kerugian negara, serta penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

## Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada Kantor Sekretariat Kabupaten Kutai Barat

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	352.4.SUP.k
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Keuangan Daerah
Penerbit	Ekonomia
Pengarang	Supina Sino Titin Ruliana Imam Nazarudin Latif
Tahun Terbit	2016
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Kantor Sekretariat Kabupaten Kutai Barat. Alat analisis yang digunakan yaitu analisa rasio keuangan daerah (rasio kemandirian keuangan, rasio efektivitas, rasio efisiensi dan rasio pertumbuhan PAD). Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: "Apakah kinerja keuangan Pemerintah Daerah pada Kantor Sekretariat Kabupaten Kutai Barat mengalami peningkatan pada tahun 2014 dibandingkan dengan tahun 2013?".

## Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	658.15.ELY.p
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Keuangan Daerah
Penerbit	Diponegoro <i>Law Journal</i>
Pengarang	Elynda Erma Susianti Fifiana Wisnaeni Retno Saraswati
Tahun Terbit	2016
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	Penelitian ini adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tugas dan wewenang dinas pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten blora dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah khususnya mengenai tiga hal pokok yaitu : (1) bagaimana implementasi pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Blora dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, (2) kendala apa yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Blora dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah guna pelaksanaan pembangunan daerah, dan (3) bagaimana upaya dalam mengatasi kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Blora dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah guna pelaksanaan pembangunan daerah.

## Pengaruh Efisiensi dan Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal Di Bangka Belitung

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	658.15.ROY.p
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Keuangan Daerah
Penerbit	Jurnal Ilmiah Orasi Bisnis
Pengarang	Royda
Tahun Terbit	2016
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	<p>Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh kemampuan keuangan daerah yang terlihat dari efisiensi dan kemandirian keuangan daerah terhadap belanja modal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Variabel independen terdiri dari variabel efisiensi keuangan daerah dan variabel kemandirian keuangan daerah serta variabel belanja modal sebagai variabel dependen. Periode analisis terdiri dari sepuluh tahun yang dimulai dari tahun 2004 sampai dengan 2013 serta menggunakan data keuangan daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Model analisis penelitian menggunakan regresi berganda dengan model estimasi <i>ordinary least square</i>. Kemudian melakukan evaluasi model dengan ekonometrika dan statistik.</p>

**Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Utara**  
***(The Influence Of Local Revenue (Pad) And Equalization Funds To The Financial Performance Of Regencies/Cities In North Sulawesi)***

Kode Klasifikasi DDC	352.48.BUD.p
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Keuangan Daerah
Penerbit	Jurnal EMBA
Pengarang	Budianto Stanly W Alexander
Tahun Terbit	2016
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	<p>Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan adalah indikator Pendapatan Daerah yang menjadi patokan untuk mengukur tingkat kemandirian suatu daerah. Semakin tinggi tingkat realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka semakin tinggi pula kemungkinan suatu daerah untuk dapat membiayai pembiayaan di daerahnya. Sebaliknya, semakin tinggi realisasi Dana Perimbangan suatu daerah maka semakin tinggi pula tingkat kemungkinan daerah tersebut untuk bergantung kepada pemerintah pusat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan melihat pengaruh ketiga variabel tersebut secara simultan dan parsial.</p>

**Pengukuran Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Dinas Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset (DPKPA) Kabupaten Minahasa Selatan**  
*(Measurement Efficiency And Effectiveness Regional Financial Management In Dinas Pengelola Keuangan, Pendapatan Dan Aset (Dpkpa) South Minahasa Regency)*

Kode Klasifikasi DDC	352.4.NOV.p
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Keuangan Daerah
Penerbit	Jurnal EMBA
Pengarang	Novelya Suoth Jantje Tinangon Sintje Rondonuwu
Tahun Terbit	2016
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	Pembangunan Daerah diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi terwujudnya pemerintahan yang baik dan kinerja pemerintah daerah yang efektif, efisien, partisipatif, terbuka dan akuntabel kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah Dinas Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset (DPKPA) Kabupaten Minahasa Selatan. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif.

**Penyajian Laporan Keuangan Daerah Sesuai Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Pada Dinas Pendapatan Daerah Dan Dinas Sosial Prov. Sulut (*Government's Financial Statement Under Government's Regulation No.71 In 2010 About Government Accounting Standard At Departement Of Revenue And Departement Of Social North Sulawesi*)**

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	657.3.EZR.p
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Keuangan Daerah
Penerbit	Jurnal EMBA
Pengarang	Ezra Paula Mentu Jullie J. Sondakh
Tahun Terbit	2016
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	Standar Akuntansi Pemerintahan adalah Prinsip Akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah. Standar Akuntansi Pemerintahan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan gambaran dari kinerja Pemerintah Daerah dalam satu periode Akuntansi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penyajian laporan keuangan Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010. Metode yang digunakan analisis deskriptif dimana data dikumpulkan kemudian diklasifikasikan dan dianalisis sehingga dapat ditarik kesimpulan.

## Peran Manajerial Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	351.17.PUR.p
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Keuangan Daerah
Penerbit	Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Pengarang	Purnama Sari
Tahun Terbit	2016
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perdu manajerial pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah. Dari hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa peran manajerial pengelolaan keuangan daerah dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Adapun saran yang dapat diberikan kepada Pemerintah Daerah adalah agar memaksimalkan peran manajerial pengelolaan keuangan daerah agar dapat meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah, karena hal tersebut berkaitan dengan pelayanan kepada publik atau masyarakat

## Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dan Hubungannya Dengan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	351.17.RIC.t
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Keuangan Daerah
Penerbit	Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah
Pengarang	Rico Putra Surya Hidayat
Tahun Terbit	2016
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis: 1) Tingkat kemandirian keuangan daerah Provinsi Jambi; dan (2) Hubungan tingkat kemandirian keuangan daerah Provinsi Jambi dengan pertumbuhan ekonomi.

## Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	352.14.MAR.a
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Keuangan Daerah
Penerbit	Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing " <i>Goodwill</i> "
Pengarang	Marlin Pareda Jullie J. Sondakh Ventje Ilat
Tahun Terbit	2017
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	Penelitian ini bertujuan menganalisis pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud. Metode penelitian menggunakan kualitatif dengan pendekatan eksploratif. Data diperoleh melalui teknik wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Informan kunci ditentukan secara purposive sampling untuk mendapatkan hasil informasi yang tepat dan akurat. Wawancara menggunakan In-depth interview jenis semi terstruktur. Metode triangulasi digunakan dalam pengujian validitas atau kredibilitas data dan sumberdata.

## Analisis Sumber-Sumber dan Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah Untuk Mensejahterakan Daerah Di Kabupaten Dairi

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	352.14.PON.a
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Keuangan Daerah
Penerbit	Jurnal Ilmiah Methonomi
Pengarang	Ponti Panggabean
Tahun Terbit	2017
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sumber-sumber dan kemampuan keuangan daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah untuk mensejahterakan daerah di Kabuapten Dairi tahun anggaran 2010-2014. Jenis penelitian adalah Kuantitatif. Dimana,penelitian kuantitif menggunakan beberapa Rasio Keuangan, yaitu: Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Indeks Kemampuan Rutin, dan Rasio Pertumbuhan, Tipe penelitian adalah Deskriptif dimana akan diuraikan dan dianalisis permasalahan penelitian. Peneliti berusaha memaparkan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatiannya, kemudian peristiwa tersebut dideskripsikan menggunakan Indeks Kemampuan Keuangan sebagai alat analisis.

## **Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Lembaga Keuangan (*Characteristic of Local Government to Financial Performance*)**

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	351.17.DAN.k
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Keuangan Daerah
Penerbit	Jurnal Administrasi Bisnis
Pengarang	Danny Mukuan
Tahun Terbit	2017
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	Masalah keuangan daerah menjadi salah satu perhatian utama dalam penelitian ini. Pemerintah daerah mempunyai peranan penting dalam rangka pengendalian dan pengelolaan keuangan daerah, oleh karena itu dalam “UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah” disebutkan bahwa pelaksanaan otonomi daerah melalui penyediaan sumber daya berdasarkan keputusan Pemerintah Pusat, “desentralisasi” , “dekonsentrasi” dan “tugas pembantuan”, perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus diatur berdasarkan kompetensi, peran dan tugas yang jelas dalam pemerintahan.

## Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	657.3.OKA.p
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Keuangan Daerah
Penerbit	SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing dan Perpajakan)
Pengarang	Oka Reza Aditya Welly Surjono
Tahun Terbit	2017
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	Identifikasi masalah yang dibahas dalam penulisan ini adalah bagaimana sistem pengendalian intern, bagaimana kualitas laporan keuangan daerah dan seberapa besar pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada Kantor Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi II Pelabuhan Ratu. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dan asosiatif dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah kuesioner. Sedangkan analisis yang digunakan adalah analisis regresi, koefisien korelasi, koefisien determinasi dan hipotesis uji t.

## Tanggung Jawab Kepala Desa Terhadap Keuangan Desa Di Tinjau Dari Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	352.4.KRI.t
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Keuangan Daerah
Penerbit	Lex Cerimen
Pengarang	Kristendo Sumolang
Tahun Terbit	2017
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab Kepala Desa dalam pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan apa upaya pencegahan bagi Kepala Desa untuk tidak melakukan perbuatan tindak pidana korupsi. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative

## Analisis Terhadap Kinerja Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	352.14.SAR.a
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Keuangan Daerah
Penerbit	Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya
Pengarang	Sardio Kartopawiro Yohanes Susanto
Tahun Terbit	2018
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	Tujuan penelitian: Dalam otonomi daerah, pemerintah pusat memberi wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengelola keuangannya secara mandiri. Masyarakat juga semakin menyadari akan hak dan kewajiban sebagai warga Negara dan lebih dapat menyampaikan aspirasi yang membangun seperti perbaikan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, masyarakat menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam sistem pemerintah daerah. Transparansi dapat diartikan sebagai hak masyarakat untuk mengetahui akan kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam pengelolaan sumber daya daerah dan hasil dari pengelolaan sumber daya yang ada di daerah.

## Rancang Angun Manajemen Trafik Routing Jaringan Pada Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkalis

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	6584038.HER.r
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Keuangan Daerah
Penerbit	<i>JOISIE Journal Of Information System And Informatics Engineering</i>
Pengarang	Hermansyah Dwi Haryono Yoyon Efendi
Tahun Terbit	2018
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	Dengan semakin berkembangnya <i>framework-framework</i> yang dapat membantu developer membangun aplikasi berbasis web, dari situlah muncul ide untuk membuat "Rancang Bangun Manajemen Trafik Routing Jaringan Pada Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Bengkalis" Aplikasi ini merupakan sebuah manajemen trafik yang mengarahkan user ke server-server tertentu yang telah disediakan agar penggunaan atau pembagian server dapat terdistribusi dengan baik, yang pada akhirnya akan meningkatkan kecepatan akses dari user ke server sistem informasi pengelolaan keuangan daerah.

## Analisa Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Daerah Dalam Mendukung Otonomisasi Daerah Di Pemerintah Kota Ambon

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	352.14.CHA.a
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Keuangan Daerah
Penerbit	Jurnal SOSOQ
Pengarang	Charlota Jeany Titahena
Tahun Terbit	2019
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui Kinerja Keuangan BPKAD Kota Ambon selama periode 2007-2018 dan untuk mengetahui sejauh mana Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah melalui Tingkat Efektivitas, Ketergantungan, Derajat Desentralisasi Fiskal, Tingkat Kemandirian Kota Ambon Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Otonomi Daerah. Penelitian ini dilakukan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon dengan menggunakan Data Sekunder yaitu Laporan Realisasi Keuangan Pemerintah Kota Ambon tahun 2007-2018. Teknik analisis yang digunakan adalah Path Analysis yang merupakan teknik pengembangan dari Regresi Linier Berganda.

## Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	352.14.SUR.a
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Keuangan Daerah
Penerbit	Jurnal Simplex
Pengarang	Surastowo
Tahun Terbit	2019
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	<p>Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kinerja pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Lampung Timur. Populasi dari penelitian ini adalah Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dan yang menjadi sampel dalam Laporan Keuangan Tahun 2014-2018. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, dan menggunakan metode dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio keserasian, rasio pertumbuhan dan rasio kemandirian keuangan daerah.</p>

## **Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai Provinsi Maluku Utara (Studi Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai Lima Tahun Terakhir 2011-2015)**

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	352.14.NUR.a
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Keuangan Daerah
Penerbit	Jurnal Inovasi Bisnis dan Manajemen Indonesia
Pengarang	Nurhikmah Sibua Firman Pribadi
Tahun Terbit	2019
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	Berpijak dari dasar pemikiran tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pulau Morotai. Penelitian ini bertujuan untuk; (1) mengetahui kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pulau Morotai tahun 2011-2015. Penelitian analisis implementasi kinerja ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) pemerintah daerah Kabupaten Pulau Morotai tahun 2011-2015, dalam analisis data, diawali dengan menghimpun data melalui metode wawancara, dokumentasi dan observasi.

**Pengaruh Pendapatan Keuangan Daerah di Tinjau dari Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros**

***(The Effect Of Regional Financial Income Reviewed From Regional Original Income In The Government Maros District)***

Kode Klasifikasi DDC	352.48.NUR.p
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Keuangan Daerah
Penerbit	<i>Economy Deposit Journal</i>
Pengarang	Nursyam Mersi Sejan
Tahun Terbit	2019
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Pendapatan Asli Daerah dapat mempengaruhi pendapatan keuangan daerah di Kabupaten Maros. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pendapatan asli daerah dapat mempengaruhi tingkat keuangan daerah di Kabupaten Maros. Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif, metode pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data yaitu data primer dan sekunder. Lokasi penelitian adalah Kantor Bupati Maros yang beralamatkan di Jalan Jenderal Sudirman No.1, Pettidee, Turikale, Kabupaten Maros. Populasi dalam penelitian ini adalah semua jenis atau sumber Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Maros, dan sampel adalah 30 dari jenis atau sumber Pendapatan Asli Daerah yang dipilih secara acak (Random).

## Menelisik Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Di Provinsi Jawa Tengah

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	352.4.SYA.m
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Keuangan Daerah
Penerbit	Jurnal Ekonomi dan Bisnis
Pengarang	Syafnita
Tahun Terbit	2021
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan yang terdiri dari Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, Rasio Aktivitas, dan Rasio Hutang pada pemerintah kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2015-2019. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif untuk mengetahui perkembangan kinerja keuangan dari tahun ke tahun.

# LAPORAN

## Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2015

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	352.14.NOV.a
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Keuangan Daerah
Penerbit	IAIN Batusangkar
Pengarang	Novrianti
Tahun Terbit	2017
Tipe File	Laporan
Deskripsi	<p>Permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya tahun 2015 dengan menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas dan efisiensi pendapatan asli daerah, rasio aktivitas, dan rasio efisiensi belanja. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya berdasarkan rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektifitas dan efisiensi pendapatan asli daerah, rasio aktivitas, dan rasio efisiensi belanja. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah deskriptif kuantitatif. Sumber penelitian adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi. Analisis data yang penulis gunakan adalah rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas dan efisiensi pendapatan asli daerah, rasio aktivitas, dan rasio efisiensi belanja.</p>

# RINGKASAN KAJIAN

## Gambaran Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	351.17.DRS.g
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Keuangan Daerah
Penerbit	Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri
Pengarang	Dr. SumuleTumbo, SE., MM
Tahun Terbit	-
Tipe File	Ringkasan Kajian
Deskripsi	Ringkasan Kajian ini berisikan tentang Gambaran Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

# PERDESAAN

# ARTIKEL

## Disparitas Pembangunan Perkotaan - Perdesaan di Indonesia

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	711.4.DRI.d
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Perdesaan
Penerbit	Agrimedia
Pengarang	Dr. Ir. Arief Daryanto, M. Ec.
Tahun Terbit	2003
Tipe File	Artikel
Deskripsi	Distorsi sistem perkotaan-perdesaan menggambarkan tidak berfungsinya hirarki sistem kota, sehingga menimbulkan <i>over-concentration</i> pertumbuhan pada kota-kota tertentu, tamtama kota-kota besar dan metropolitan di Pulau Jawa. Di sisi lain, pertumbuhan kota-kota lain dan pedesaan relstif lebih tertinggal. Padahal idealnya, sebagai suatu sistem perkotaan-perdesaan, terdapat keterkaitan dan interaksi yang positif baik antar tipologi kota maupun antara perkotaan dengan pedesaan. Dalam perspektif tersebut, perkotaan- perdesaan merupakan satu kontinum

## Strategi, Kebijakan Dan Program Pembangunan Masyarakat Desa

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	307.12.GUN.s
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Perdesaan
Penerbit	-
Pengarang	Gunawan Sumodiningrat
Tahun Terbit	-
Tipe File	Artikel
Deskripsi	Strategi dasar pembangunan perdesaan bertumpu pada proses pengembangan kapasitas masyarakat ( <i>capacity building</i> ) baik sumber daya manusia yang bermutu, prasarana dan sarana yang lengkap, serta kelembagaan masyarakat yang berkembang. Strategi itu diterapkan dengan menggunakan pendekatan pemihakan dan pemberdayaan. Keempat, langkah langkah penyempurnaan yang perlu dilakukan dalam mengelola program pembangunan perdesaan. Kelima, peran yang diharapkan dad aparat Kantor PMD dalam mendukung pembangunan masyarakat perdesaan

**BUKU**

## Pembangunan Perdesaan Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	307.72.MAC.p
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Perdesaan
Penerbit	IPB Press
Pengarang	M. A. Chozin Sumardjo dkk
Tahun Terbit	2010
Tipe File	Buku
Deskripsi	Kondisi perekonomian yang ada sekarang ini dapat dipandang sebagai dampak dari penerapan bertahun-tahun atas konsep pertumbuhan ekonomi yang selalu diterapkan, dikejar dan dipercaya menjadi patokan untuk menggambarkan dan mengejar kondisi dari perekonomian masyarakat, dan bahkan juga kesejahteraannya. Pembahasan atas indikator makro ekonomi yang terlalu fokus pada sektor finansial dan wilayah perkotaan seringkali dilakukan dengan melupakan pembahasan mengenai persoalan ekonomi riil utamanya di sektor pertanian dan di wilayah perdesaan.

## Demokrasi Desa

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	321.8.NAE.d
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Perdesaan
Penerbit	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia
Pengarang	Naeni Amanulloh
Tahun Terbit	2015
Tipe File	Buku
Deskripsi	Buku yang bertitel “Demokrasi Desa” ini adalah buku yang dapat dibaca dan dihayati oleh para pendamping untuk mendampingi proses Musyawarah Desa tentang Pendirian dan Pembentukan BUM Desa, sebagai instrumen demokratisasi Desa yang mengiringi Tradisi Berdesa (hidup bermasyarakat dan bernegara di Desa)

## Desa Mandiri, Desa Membangun

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	307.72.BOR.d
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Perdesaan
Penerbit	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia
Pengarang	Borni Kurniawan
Tahun Terbit	2015
Tipe File	Buku
Deskripsi	Buku yang bertitel “Desa Mandiri, Desa Membangun” ini adalah buku yang dapat dibaca dan dihayati oleh para pendamping untuk mendampingi proses Musyawarah Desa tentang Pendirian dan Pembentukan BUM Desa, sebagai instrumen demokratisasi Desa yang mengiringi Tradisi Berdesa (hidup bermasyarakat dan bernegara di Desa)

## Kader Desa Penggerak Prakarsa Masyarakat Desa

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	307.72.DIN.k
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Perdesaan
Penerbit	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia
Pengarang	Dindin Abdullah Ghozali
Tahun Terbit	2015
Tipe File	Buku
Deskripsi	Buku yang bertitel “Kader Desa Penggerak Prakarsa Masyarakat Desa” ini adalah buku yang dapat dibaca dan dihayati oleh para pendamping untuk mendampingi proses Musyawarah Desa tentang Pendirian dan Pembentukan BUM Desa, sebagai instrumen demokratisasi Desa yang mengiringi Tradisi Berdesa (hidup bermasyarakat dan bernegara di Desa)

## Kepemimpinan Desa

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	303.34 .MOC.k
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Perdesaan
Penerbit	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia
Pengarang	Mochammad Zaini Mustakim
Tahun Terbit	2015
Tipe File	Buku
Deskripsi	Buku Yang Bertitel “Kepemimpinan Desa” Ini Adalah Buku Yang Dapat Dibaca Dan Dihayati Oleh Para Pendamping Untuk Mendampingi Proses Musyawarah Desa Tentang Pendirian Dan Pembentukan Bum Desa, Sebagai Instrumen Demokratisasi Desa Yang Mengiringi Tradisi Berdesa (Hidup Bermasyarakat Dan Bernegara Di Desa)

## Ketahanan Masyarakat Desa

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	307.72.MOC.k
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Perdesaan
Penerbit	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia
Pengarang	Moch Musoffa Ihsan
Tahun Terbit	2015
Tipe File	Buku
Deskripsi	Buku Yang Bertitel “Ketahanan Masyarakat Desa” Ini Adalah Buku Yang Dapat Dibaca Dan Dihayati Oleh Para Pendamping Untuk Mendampingi Proses Musyawarah Desa Tentang Pendirian Dan Pembentukan Bum Desa, Sebagai Instrumen Demokratisasi Desa Yang Mengiringi Tradisi Berdesa (Hidup Bermasyarakat Dan Bernegara Di Desa).

## Kewenangan Desa Dan Regulasi Desa

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	320.8.MSI.k
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Perdesaan
Penerbit	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia
Pengarang	M. Silahuddin
Tahun Terbit	2015
Tipe File	Buku
Deskripsi	Buku ini membahas tentang kewenangan desa dan regulasi desa

## Perencanaan Pembangunan Desa

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	307.72.WAH.p
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Perdesaan
Penerbit	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia
Pengarang	Wahyudin Kessa
Tahun Terbit	2015
Tipe File	Buku
Deskripsi	Buku yang bertitel “PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA” ini adalah buku yang dapat dibaca dan dihayati oleh para pendamping untuk mendampingi proses Musyawarah Desa tentang Pendirian dan Pembentukan BUM Desa, sebagai instrumen demokratisasi Desa yang mengiringi Tradisi Berdesa (hidup bermasyarakat dan bernegara di Desa)

## Regulasi Baru, Desa Baru Ide, Misi, dan Semangat UU Desa

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	348.598 .SUT.r
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Perdesaan
Penerbit	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia
Pengarang	Sutoro Eko
Tahun Terbit	2015
Tipe File	Buku
Deskripsi	Buku yang bertitel “Regulasi Baru, Desa Baru” ini sengaja dihadirkan oleh Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi untuk mengantarkan perjalanan UU Desa, termasuk sebagai bekal bagi para pendamping desa. Buku ini bukanlah bacaan teknis-praktis, tetapi merupakan referensi “ideologis” yang memuat ide, misi, prinsip dasar, dan semangat UU Desa. Karena itu buku ini termasuk kategori “berat” jika dibandingkan dengan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) yang selama ini menjadi pegangan utama para fasilitator.

# JURNAL

## Keterkaitan Desa-Kota: Sebagai Alternatif Pembangunan Perdesaan

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	307.72.SUP.k
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Perdesaan
Penerbit	Geomedia Majalah Ilmiah dan Informasi Kegografian
Pengarang	Suparmlni
Tahun Terbit	2007
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	Masalah yang dihadapi masyarakat perdesaan adalah rendahnya kualitas hidup, tingginya pengangguran serta sistem produksi dan diversifikasi yang belum berkembang. Akibatnya terjadi kesenjangan kesejahteraan masyarakat perdesaan dibanding dengan masyarakat kota. Oleh karena itu perlu adanya upaya dan pemikiran untuk memperkecil kesenjangan tersebut. Program Pembangunan dengan mengutamakan keterkaitan desa kota, program pembangunan ini didasarkan pada teori pembangunan pusat-repi ( <i>core periphery</i> ) dari Friedman, teori polarisasi ekonomi dari Hirschman, serta teori ekonomi dari Myrdal.

## **Kajian Kritis Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Perdesaan Di Indonesia (Critical Studies On Rural Development Implementation In Indonesia)**

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	307.72.ERI.k
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Perdesaan
Penerbit	Forum Penelitian Agro Ekonomi
Pengarang	Erizal Jamal
Tahun Terbit	2008
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	<p>Tulisan ini mencoba menelaah beberapa persoalan mendasar dalam pembangunan perdesaan di Indonesia, beranjak dari pengalaman yang pernah ada dan perbandingan dengan pola pendekatan yang digunakan oleh China dalam pembangunan perdesaannya. Kajian ini pada beberapa bagian menelaah pendekatan yang digunakan Departemen Pertanian dalam pembangunan perdesaan melalui pendekatan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) yang dilaksanakan mulai tahun 2008 dalam kerangka Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri). PUAP merupakan program terobosan Departemen Pertanian dalam mengurangi kemiskinan dan pengangguran di perdesaan. Sebagaimana program sejenis yang pernah dilaksanakan sebelumnya, program ini lebih dominan sebagai suatu upaya terpusat dalam menata pembangunan pertanian dan perdesaan di Indonesia.</p>

## Dinamika Perubahan Pembangunan Masyarakat Pedesaan

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	307.12.SAI.d
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Perdesaan
Penerbit	Jurnal Pelangi Ilmu
Pengarang	Sainudin Latare
Tahun Terbit	2012
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	<p>Dinamika perubahan pembangunan masyarakat pedesaan lebih terfokus pada persoalan apa yang sesungguhnya terjadi pada masyarakat itu sendiri, yang kemudian pihak-pihak terkait dapat mencari solusi sehubungan dengan pemecahan masalahnya. Beberapa persoalan yang terurai dalam tulisan ini di antaranya: Pertama, Kebijakan pemerintah tidak hanya berada pada tataran <i>Top-down Planning</i> atau perencanaan pembangunan yang lebih merupakan inisiatif pemerintah namun seharusnya <i>Bottom-up Planning</i>. Perencanaan pembangunan dengan menggali potensi riil keinginan atau kebutuhan masyarakat pedesaan. Kedua, Hakikat fungsi dan potensi masyarakat pedesaan berdasarkan Kepres pasal 6 akan Nampak betapa semakin luas dan menyeluruhnya fungsi dari lembaga ketahanan masyarakat pedesaan.</p>

## Strategi Pengembangan Perdesaan Kawasan Perbatasan, Studi Kasus: Kawasan Perbatasan Republik Indonesia-Ambenu Republik Demokratik Timor Leste

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	307.72.SAM.s
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Perdesaan
Penerbit	TATALOKA
Pengarang	Samsul Ma'rif
Tahun Terbit	2012
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	<p>Kawasan perdesaan perbatasan RI-Ambenu merupakan kawasan yang termasuk dalam Provinsi Nusa Tenggara Timur dan berbatasan langsung dengan Timor Leste. Kawasan Ambenu kurang berkembang dan menghadapi persoalan, baik dalam aspek ekonomi, sosial budaya serta pertahanan keamanan, padahal memiliki potensi tinggi untuk dikembangkan menjadi kawasan yang mampu bersaing dengan negara tetangga dan kawasan pertahanan keamanan negara. Oleh karena itu, diperlukan strategi pengembangan wilayah sebagai suatu kebutuhan dalam perencanaan pembangunan kawasan perbatasan. Dalam hal ini, Kawasan Perbatasan RI-Ambenu dapat berperan sebagai beranda depan wilayah RI dengan mengandalkan potensi pertanian yang ada.</p>

## Peran Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Pembangunan Pedesaan

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	307.12.DRS.p
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Perdesaan
Penerbit	Jurnal El-Riyasah
Pengarang	Drs. Almasri, M.Si Devi Deswimar, S.Sos, M.Si
Tahun Terbit	2014
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	<p>Pembangunan masyarakat pedesaan merupakan bagian penting dari perwujudan pembangunan otonomi daerah dalam rangka pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah meningkatkan keikutsertaan masyarakat desa dengan membuat program-program nasional yang salah satunya adalah program pemberdayaan masyarakat desa. Seperti yang kita ketahui, masyarakat pedesaan adalah masyarakat yang identik dengan kemiskinan dan keterlatarbelakangan padahal tidak sedikit potensi yang dimiliki oleh masyarakat desa. Upaya penanggulangan kemiskinan yang paling strategis dalam era otonomi daerah dapat dirumuskan dalam satu kalimat yaitu “berikan peluang kepada keluarga miskin dan komunitasnya untuk mengatasi masalah mereka secara mandiri”.</p>

## Perencanaan Strategis Pembangunan Desa Di Desa Pingit Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	307.72.DWI.p
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Perdesaan
Penerbit	<i>Journal of Public Policy and Management Review</i>
Pengarang	Dwi Okta Nugroho Dyah Hariani Hesti Lestari
Tahun Terbit	2014
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	Tujuan penelitian adalah mendeskripsikan perencanaan pembangunan di Desa Pingit Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara, mendeskripsikan dan menganalisis strategi pembangunan di Desa Pingit Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara. Upaya mengatasi masalah dan tujuan penelitian dilakukan dengan menggunakan teori perencanaan strategis dengan menggunakan analisis SWOT dan Uji Litmus sebagai cara untuk menjawab permasalahan dan tujuan penelitian yang dilakukan dalam perencanaan strategis pembangunan desa, di Desa Pingit, Kecamatan Rakit, Banjarnegara

## Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	354.ANO.b
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Perdesaan
Penerbit	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia
Pengarang	Anom Surya Putra
Tahun Terbit	2015
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	Buku yang bertitel “Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa” ini adalah buku yang dapat dibaca dan dihayati oleh para pendamping untuk mendampingi proses Musyawarah Desa tentang Pendirian dan Pembentukan BUM Desa, sebagai instrumen demokratisasi Desa yang mengiringi Tradisi Berdesa (hidup bermasyarakat dan bernegara di Desa).

## Kawasan Pedesaan Dan Peran Mengikis Potensi Konflik

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	307.72.SRI.k
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Perdesaan
Penerbit	Lembaran Masyarakat: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam
Pengarang	Sri Anom Amongjati
Tahun Terbit	2016
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	penelitian yang dilakukan di wilayah Pangalengan, Jawa Barat pada tahun 2012 menunjukkan terjadinya kasus konflik tanah berakibat pada munculnya perpecahan didalam masyarakat dan berakibat pada munculnya jarak sosial. Kasus yang serupa berdasarkan pengamatan yang dilakukan di Kecamatan Muara Bulian, Jambi dimana terjadinya pertikaian antara warga masyarakat yang dianggap sebagai "perambah" dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan Hak Guna Usaha menyebabkan terbelahnya kehidupan masyarakat dalam hubungan sosial didalamnya bahkan hingga terjadinya pertikaian fisik dan berujung pada kasus hukum

## Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat fertilitas di pedesaan (Studi pada Desa Pelayangan Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batanghari)

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	304.632 .LEN.f
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Perdesaan
Penerbit	Jurnal Paradigma Ekonomika
Pengarang	Lennaria Sinaga Hardiani Purwaka Hari Prihanto
Tahun Terbit	2017
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi fertilitas di pedesaan dengan mengambil kasus Desa Pelayangan Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batanghari. Penelitian menggunakan metode survei dengan sampel adalah wanita pasangan usia subur di desa penelitian. Alat analisis yang digunakan adalah analisis jalur ( <i>path analysis</i> ).

## Peranan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Desa (Studi pada Pembangunan Irigasi di Desa Namo Bintang Kecamatan Pancur Batu)

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	307.12.VIN.p
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Perdesaan
Penerbit	Agrica (Jurnal Agribisnis Sumatera Utara)
Pengarang	Vina Ompusunggu
Tahun Terbit	2017
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perkembangan partisipasi masyarakat di desa Namo Bintang, Kecamatan Pancur Batu dan bagaimana pembangunan pemberdayaan masyarakat di Desa namo Bintang. Penelitian ini menggunakan data kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan secara detail dan dalam tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan masyarakat. Pengumpulan data menggunakan kuesioner dan interview sebagai data kualitatif dan beberapa dokumen.

## Strategi Pengembangan Potensi Desa

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	307.72.AHM.s
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Perdesaan
Penerbit	Jurnal Sungkai
Pengarang	Ahmad Soleh
Tahun Terbit	2017
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	Indonesia sedang membangun dalam berbagai bidang, khususnya ditumpukan kepada tingkat wilayah Desa yang merupakan wilayah yang menyentuh langsung kepada kehidupan masyarakat. Pembangunan ini direncanakan secara berkelanjutan untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Kawasan perdesaan harus dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan kawasan perkotaan. Pemahaman yang menyeluruh dan tidak dikotomis ini menjadi penting dan mendasar dalam penyusunan peraturan atau aturan main yang berkaitan dengan pedesaan maupun perkotaan, agar terjadi sinergi dan keseimbangan perlakuan wilayah, khususnya oleh pelaku pembangunan.

## Strategi Perencanaan Pembangunan Desadi Desa Sukaresik Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	307.72.LUS.s
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Perdesaan
Penerbit	Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Pengarang	Lusi Wulandari
Tahun Terbit	2017
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	<p>Penelitian ini dilatarbelakangi oleh partisipasi masyarakat dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa kurang, masyarakat kurang proaktif dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa dan masyarakat cenderung pasif dan anggaran dana untuk musyawarah perencanaan pembangunan desa kurang. Desain penelitian yang penulis gunakan adalah desain penelitian deskriptif analisis. Sumber data primer yaitu ada 15 orang yang diwawancarai. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, studi lapangan (observasi, dan wawancara). Teknis analisis data dalam penelitian ini yaitu mengumpulkan data hasil observasi dan wawancara, menginterpretasi data hasil observasi dan wawancara, mendeskripsikan data hasil observasi dan wawancara untuk menjawab rumusan masalah penelitian dan menarik kesimpulan data hasil observasi dan wawancara untuk menjawab rumusan masalah penelitian.</p>

## Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Pedesaan Di Desa Kauneran 1 Kecamatan Sonder

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	307.72.APR.e
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Perdesaan
Penerbit	Jurnal Administrasi Publik
Pengarang	Aprilia Olbata Joorie M. Ruru Novie Palar
Tahun Terbit	2018
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	<p>Pelaksanaan Program Pembangunan Perdesaan merupakan salah satu bentuk pemerintah dalam membangun desa. Dengan pembangunan pedesaan diharapkan akan terjadi perubahan dalam berbagai aspek, termasuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui laju pertumbuhan ekonomi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Untuk mengukur tingkat efektivitas, peneliti menggunakan tiga ukuran efektivitas menurut Ducan yang dikutip oleh Richard M. Steers dalam bukunya <i>“Organizational Effectiveness”</i> (2005), yaitu tingkat pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi terhadap Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Perdesaan di Desa Kauneran 1 Kecamatan Sonder.</p>

## Implementasi Dana Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat (*Best Practice* Di Desa Kancilan Tahun 2017)

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	352.48 .UMM.i
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Perdesaan
Penerbit	Jurnal Suara Keadilan
Pengarang	Ummi Mahbubah Suparoyo Subarkah
Tahun Terbit	2018
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	Undang-Undang Nomor 4 tahun 2014 Tentang Desa memberikan amanat penerimaan Dana Desa untuk setiap desa se-Indonesia, dana desa tersebut dapat digunakan oleh pemerintah desa untuk membiayai pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Namun sebelum dana desa digunakan seluruh kegiatan baik pembangunan desa maupun pemberdayaan masyarakat, seluruh perencanaan harus masuk dalam dokumen perencanaan desa yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa)

## Manajemen Pesantren Dalam Pembangunan Desa

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	297.77 .MOH.m
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Perdesaan
Penerbit	Temali: Jurnal Pembangunan Sosial
Pengarang	Mohammad Mustari Dedeng Yusuf Maolani
Tahun Terbit	2018
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	Tujuan kajian ini adalah untuk membuat analisis sistematis yang mendalam terhadap peran dan kontribusi pesantren dalam pembangunan wilayah perdesaan, terutama di Kab. Tasikmalaya yang jumlahnya telah mencapai 761 pesantren. Kajian ini menggunakan metode kajian kasus berganda. Kasus-kasusnya terdiri dari enam pesantren (tiga pesantren besar dan tiga pesantren kecil), semuanya berlokasi di Kab. Tasikmalaya. Pemilihan pesantren-pesantren itu disebabkan karena mewakili dari tiga kategori: tradisional, modern, dan kombinasi. Wawancara, pengamatan, dan analisis dokumen digunakan untuk mengumpulkan data. Wawancara tatap muka memakai daftar pertanyaan yang dikembangkan untuk kajian ini.

## Mengklasifikasikan Desa Perkotaan Dan Desa Pedesaan Di Kabupaten Klungkung Menggunakan Metode Mamdani

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	307.72.NIK.m
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Perdesaan
Penerbit	E-Jurnal Matematika
Pengarang	Ni Kadek Sumarwati G. K. Gandhiadi Tjokorda Bagus Oka
Tahun Terbit	2018
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	Menurut BPS, desa dapat diklasifikasikan menjadi desa perkotaan dan desa pedesaan. Klasifikasi ini berguna untuk perencanaan pembangunan, seperti keamanan, kesehatan, dan pertanian yang memiliki peran keterkaitan desa-kota. Klasifikasi ini juga berguna untuk membagi desa menjadi desa. Dalam penelitian ini desa-desa di Kabupaten Klungkung akan diklasifikasikan menjadi desa kota dan desa dengan menggunakan metode Mamdani. Hasil klasifikasi menggunakan metode Mamdani adalah 52 desa yang tergolong kelurahan dan tujuh desa tergolong desa yang memiliki akurasi 93% antara keluaran metode Mamdani dengan data asli di 59 desa di Kabupaten Klungkung.

## Pembangunan Desa Berbasis Potensi Modal Sosial (*Social Capital*)

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	307.72.BAM.p
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Perdesaan
Penerbit	SOSIAL: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial
Pengarang	Bambang Martin Baru Sripeni Rusbiyanti dkk
Tahun Terbit	2018
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	Modal sosial sebagai sumber daya pembangunan yang potensial, apabila terjadi sinergi antara kepentingan masyarakat desa dengan orientasi sasaran pembangunan desa. Kurang berhasilnya pembangunan desa disebabkan tidak adanya kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat desa, karena keterlibatan masyarakat desa dalam proses pembangunan sebagai sarana untuk mendekatkan pemerintah dengan masyarakat desa. Modal sosial masyarakat desa akan menghasilkan suatu bentuk kerjasama yang diwujudkan melalui gotong royong dan penyadaran masyarakat, serta diyakini dapat menjadi kekuatan dan perekat dalam kehidupan masyarakat desa dalam menghadapi berbagai persoalan pembangunan desa.

## Analisis Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Masyarakat Di Desa Bontomanai Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	320.8.SOF.a
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Perdesaan
Penerbit	Jurnal Ilmiah Pranata Edu
Pengarang	Sofyanto Torau
Tahun Terbit	2019
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	<p>Pemerintah desa sangat berperan dalam setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan di desanya serta harus mampu menjalankan tugasnya dalam melaksanakan pemerintahannya, pembinaan masyarakat, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat desa. Sejalan dengan hal ini, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja pemerintah desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan masyarakat desa di desa Bontomanai Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif yang memberikan gambaran mengenai permasalahan yang diteliti serta menyajikan data dan menganalisisnya. Teknik pengumpulan data melalui wawancara serta observasi dan dokumentasi.</p>

## Analisis Pembangunan Desa Melalui Pemberdayaan Masyarakat (Studi Di Desa Dauh Peken Kec. Tabanan, Kab. Tabanan)

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	307.72.NIP.a
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Perdesaan
Penerbit	Citizen Charter
Pengarang	Ni Putu Indriyani Piers Andreas Noak I Putu Dharmanu Yudharta
Tahun Terbit	2019
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	Penelitian ini dilakukan dengan teknik pengumpulan data deskriptif kualitatif berupa wawancara mendalam. Kajian ini menganalisis bagaimana pembangunan pedesaan melalui pemberdayaan masyarakat dengan konsep pemberdayaan masyarakat yang terdiri dari indikator ekonomi, pilihan komoditas dan jenis usaha, pengelolaan sumber daya manusia dan pengembangan karir, pengembangan jaringan kemitraan, pengelolaan logistik dan keuangan serta pengembangan dari sarana dan prasarana. Indikator lingkungan, lingkungan fisik dan lingkungan sosial.

**Analisis Keterkaitan Antar-industri pada Sektor Padi  
(Analysis of Inter-industry Linkages in the Rice Sector)**

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	338.1.MHU.a
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Perdesaan
Penerbit	-
Pengarang	M.Husein Sawit Supena Friyatno
Tahun Terbit	2019
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	Sektor padi, seperti sektor yang lain, memerlukan input dan menyuplai output ke berbagai sektor. Sektor padi memerlukan input, seperti benih, pupuk, pestisida dan prasarana penunjang dari sektor lain. Sedangkan padi yang dihasilkan digunakan oleh berbagai sektor, terutama sektor penggilingan padi dan pakan ternak. Keterkaitan antar-industri yang akan dibahas dengan alat analisis input output (I/O) terbitan 2010. Oleh karena itu, makalah ini memiliki tujuan untuk : (i) menganalisis keterkaitan antar-industri padi dengan sektor-sektor lain dalam ekonomi nasional; (ii) menganalisis apakah sektor padi dapat disebut sebagai salah satu industri kunci dalam pembangunan nasional; dan (iii) menganalisis angka pengganda sektor padi terhadap pembangunan nasional.

## Kebijakan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Rangka Mengoptimalkan Pembangunan Desa

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	352.48 .RES.k
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Perdesaan
Penerbit	VISIONER: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Pengarang	Restu Widy Sasongko
Tahun Terbit	2019
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	<p>Kebijakan Alokasi Dana Desa dalam kerangka pembangunan desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan. Salah satu ukuran dari peningkatan kesejahteraan masyarakat serta menurunnya angka kemiskinan suatu daerah adalah banyak sedikitnya jumlah keluarga sejahtera di daerah tersebut. Salah satu sumber pendapatan desa yang merupakan alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah Dana Desa. Mengingat sumber Dana Desa adalah dari APBN, maka untuk mengoptimalkan penggunaannya pemerintah mempunyai kewenangan untuk menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa untuk mendukung program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.</p>

## Pengaruh Pembangunan Desa dan Faktor Faktor yang Menghambat Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Akuntabilitas Publik Pengelolaan Dana Desa

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	307.72.WIK.p
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Perdesaan
Penerbit	Jurnal Akuntansi dan Pajak
Pengarang	Wikan Budi Utami Ketut Wahyu Ibrahim
Tahun Terbit	2019
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	Alokasi dana desa adalah anggaran keuangan yang diberikan kepada desa oleh pemerintah, yang bersumber dari bagi hasil pajak daerah dan dana perimbangan pusat dan keuangan daerah yang diterima kabupaten. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pembangunan desa dan faktor-faktor yang dapat menghambat alokasi pengelolaan dana desa terhadap alokasi akuntabilitas publik pengelolaan desa. Populasi dalam penelitian ini adalah warga Desa Purwosari dan dalam penelitian ini sampel yang digunakan adalah 30 orang warga Desa Purwosari. Teknik pengambilan sampel yang digunakan untuk mendapatkan sampel adalah purposive sampling. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner. Analisis data menggunakan analisis statistik deskriptif dan regresi linier berganda. Data diolah dengan menggunakan SPSS 21.

## **Analisis Pengembangan Potensi Desa Berbasis Indeks Membangun Desa (IDM) (Studi Kasus: Desa Ponggok, Kecamatan Palohharjo, Kabupaten Klaten)**

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	307.72.MOH.a
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Perdesaan
Penerbit	Prosiding Seminar Edusainstech
Pengarang	Mohamad Sukarno
Tahun Terbit	2020
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	<p>Kewenangan pemerintah desa meliputi pembangunan, pemberdayaan, dan pelayanan publik. Kewenangan ini kemudian mendorong Kementerian Desa mengeluarkan Peraturan Menteri Desa (Permendes) Nomor 5 Tahun 2015 terkait Pengembangan Indikator Desa (IDM) yang kemudian dijadikan acuan bagi masing-masing desa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui potensi desa berbasis IDM di Desa Ponggok. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif menggunakan sumber data sekunder. Sumber data penelitian berupa artikel, jurnal, dan data yang terkait dan relevan dengan variabel dan indikator IDM.</p>

## Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Masyarakat Dan Pembangunan Desa

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	303.4.SAR.d
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Perdesaan
Penerbit	Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam
Pengarang	Sarip Aip Syarifudin Abdul Muaz
Tahun Terbit	2020
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	Artikel bertujuan mengkaji dampak Covid-19 terhadap perekonomian masyarakat dan pembangunan desa. Desa selalu mendapatkan bantuan, mengarah pada keadaan atau melahirkan desa kehilangan identitasnya. Hilangnya identitas desa terbukti dengan adanya apapun yang diharuskan oleh pemerintah dalam penularannya, harus mendapatkan imbalan berupa materi. Persoalan mendasar bagaimana pemenuhan perekonomian sebagai kebutuhan dasar manusia dalam rangka menjalankan aktivitas di dunia guna memenuhi kesejahteraan, keselamatan. Hubungan antara demokrasi desa dengan arah perekonomian dan pembangunan desa yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Demokrasi mempengaruhi penanggulangan Covid-19, merupakan ujian nyata hasil demokrasi desa dalam mewujudkan perekonomian dan pembangunan.

## **Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Di Kabupaten Bandung Studi Kasus Di Desa Margamukti, Desa Sayati, Desa Ciburial Dan Desa Nanjung Kabupaten Bandung**

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	307.12.AGU.p
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Perdesaan
Penerbit	Jurnal Academia Praja
Pengarang	Agustina Setiawan Utang Suwaryo Mudiyati Rahmatunnisa
Tahun Terbit	2020
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Desa di Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat Pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan partisipasi masyarakat di di Desa Sayati Kecamatan Margahayu; Desa Nanjung Kecamatan Margaasih; Desa Margamukti Kecamatan Pangalengan; dan Desa Ciburial Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat. Partisipasi yang dimaksudkan lebih pada menggali proses keterlibatan dalam mengemukakan pendapat, kesempatan dalam mengemukakan pendapat dan kesempatan dalam pelaksanaan perencanaan kebijakan dan program pembangunan di keempat desa terpilih.

## Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Desa Ulu Pulau

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	352.48 .REN.p
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Perdesaan
Penerbit	Bertuah:Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam
Pengarang	Reno Firdaus Prayugo Nurul Huda
Tahun Terbit	2020
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pemanfaatan Dana Desa dalam pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Kegiatan penelitian ini dilakukan di Desa Ulu Pulau Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis, dengan melakukan wawancara dan observasi untuk mendapatkan informasi Dana Desa yang diinterpretasikan.

## Peningkatan Aparatur Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Kota Rantang

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	352.63 .NUR.p
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Perdesaan
Penerbit	Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Pengarang	Nur Ambia Arma Junaidi Tomi Jaffisa
Tahun Terbit	2020
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	Desa memiliki hak istimewa dimana sejak dikeluarkannya Undang-Undang No.6 tahun 2014 tentang Desa, bahwa desa telah diberikan kewenangan dari pemerintah pusat untuk dapat mengurus sendiri urusan pemerintahan desanya. Sehingga demikian, pemerintah desa memiliki peran yang besar dalam memajukan desa dan membawa desa menjadi lebih mandiri dan berdaya saing melalui pembangunan desa yang direncanakan. Kegiatan Pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan mengenai perencanaan pembangunan desa. Melalui metode workshop, tim akan memberikan arahan apa yang dimaksud dengan pembangunan desa berdaya saing dan bagaimana menerapkannya termasuk pentingnya komunikasi pembangunan dalam pengimplementasiannya.

## Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Pedesaan telaahan atas tulisan David C. Korten

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	307.12.BAD.p
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Perdesaan
Penerbit	Sosio Informa
Pengarang	Badrum Susantyo
Tahun Terbit	2007
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	Partisipasi seperti koin kecil, satu sisi mengambil bentuk partisipasi dengan mereka keseluruhan dan pihak lain untuk menunjukkan semangat partisipasi. Partisipasi masyarakat adalah mengembangkan paradigma untuk memfokuskan pelibatan masyarakat, dimulai dari perencanaan. Masyarakat Partisipasi memiliki peluang untuk mempengaruhi kebijakan pembangunan, untuk menjawab apa yang orang dibutuhkan. Melalui partisipasi, orang mengetahui masalah mereka dan bagaimana memecahkannya. Selain itu, mereka memiliki sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraan hidup mereka.

## Pembangunan Infrastruktur perdesaan dengan pelibatan masyarakat setempat

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	307.72.AND.p
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Perdesaan
Penerbit	Smartek
Pengarang	Andy Asnudin
Tahun Terbit	2009
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	Penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran tentang pelibatan masyarakat dalam proses Program Pembangunan infrastruktur Perdesaan (PPIP) Tahun 2009 dan dampak yang ditimbulkan, serta data dan informasi yang diperoleh dapat digunakan untuk pembelajaran pada kegiatan-kegiatan serupa di masa yang akan datang. Metode analisis deskriptif yang digunakan dalam penelitian tersebut dengan menggunakan full populasi, yaitu: di sejumlah 25 desa sasaran PPIP Provinsi Sulawesi Tengah.

**Pendekatan Desa Membangun Di Jawa Barat: Strategi Dan Kebijakan Pembangunan Perdesaan  
(*Developing Village Approach In West Java: Rural Development Policy And Strategy*)**

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	307.72.SAE.p
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Perdesaan
Penerbit	Analisis kebijakan pertanian
Pengarang	Saeful Bachrein
Tahun Terbit	2010
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	<p>Dalam upaya mempercepat pembangunan perdesaan, Bappeda Provinsi Jawa Barat telah merancang suatu terobosan pembangunan yang dikenal dengan program “Desa Membangun”, yaitu suatu pengembangan model pemberdayaan masyarakat dan aparat Desa dalam mewujudkan Desa Mandiri dan Sejahtera. Program tersebut dilaksanakan berdasarkan kebutuhan desa/wilayah (spesifik lokasi) yang bersifat holistik dan terintegrasi secara lintas sektor, dengan tetap memperhatikan efektivitas penyelenggaraan pemerintah desa dan sinergi alokasi program serta anggaran bantuan desa/masyarakat. Untuk itu, informasi terkait dengan kondisi pembangunan perdesaan saat ini (<i>existing</i>) sangat diperlukan sebagai dasar dalam merumuskan perencanaan model Desa Membangun yang mampu menjawab permasalahan dan mengantisipasi peluang serta tantangan yang muncul secara cermat.</p>

## Strategi Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Menunjang Pembangunan Daerah

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	307.12.SIT.s
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Perdesaan
Penerbit	Journal of Rural and Development
Pengarang	Siti Zuliyah
Tahun Terbit	2010
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	Dalam mendukung pembangunan daerah, diperlukan peran serta dan pemberdayaan masyarakat desa. Program pemberdayaan lebih diarahkan pada masyarakat desa mengingat banyaknya permasalahan yang dihadapi masyarakat desa baik masalah pengetahuan, keterampilan, fasilitas maupun kemampuan ekonomi. Keterlibatan masyarakat desa sejak tahap awal meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi. Strategi pemberdayaan masyarakat desa harus memperhatikan prinsip dan metode pemberdayaan masyarakat. Program pemberdayaan masyarakat desa harus didukung oleh peran kepemimpinan dan menggali nilai-nilai masyarakat setempat.

## Evaluasi Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Di Desa Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	307.72.MUH.e
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Perdesaan
Penerbit	Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota
Pengarang	Muhammad Amin Cakrawijaya Bambang Riyanto Nuroji
Tahun Terbit	2014
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) merupakan program bantuan pembangunan infrastruktur perdesaan yang diarahkan untuk mendorong peningkatan perekonomian pedesaan. PPIP dilaksanakan secara partisipatif dimana masyarakat dapat memilih infrastruktur yang diinginkan. Dengan pendekatan partisipatif, prioritas infrastruktur bergantung pada kemampuan masyarakat dalam memilih. Penelitian ini bertujuan untuk melihat keterkaitan dan dampak PPIP yang telah dipilih masyarakat terhadap pertumbuhan ekonomi kawasan perdesaan dengan menggunakan pendekatan triangulasi atau mix-method dan teknik sampling multi-stage sampling, dengan mengambil studi kasus di Desa Wonokerto Kecamatan Turi.

## Klasifikasi Wilayah Desa-Perdesaan Dan Desa-Perkotaan Wilayah Kabupaten Semarang Dengan *Support Vector Machine (Svm)*

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	307.72.MEK.k
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Perdesaan
Penerbit	Jurnal Gaussian
Pengarang	Mekar Sekar Sari Diah Safitri Sugito
Tahun Terbit	2014
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	Penelitian ini akan melakukan klasifikasi berdasarkan status wilayah pedesaan dan perkotaan yang mencerminkan perbedaan karakteristik/kondisi antar wilayah di Indonesia dengan metode <i>Support Vector Machine (SVM)</i> . Klasifikasi pada masalah ini bekerja dengan membangun fungsi pemisahan yang melibatkan fungsi kernel untuk memetakan data input ke ruang dimensi yang lebih tinggi. Algoritma <i>Sequential Minimal Optimization (SMO)</i> digunakan dalam proses pelatihan klasifikasi data wilayah pedesaan dan perkotaan untuk mendapatkan fungsi pemisahan ( <i>hyperplane</i> ) yang optimal. Untuk menentukan fungsi kernel dan parameter sesuai data digunakan metode grid search yang dikombinasikan dengan metode validasi silang <i>leave-one-out</i> .

## Analisis Perencanaan Pembangunan Desa Berbasis Undang-Undang Desa No 6 Tahun 2014 Di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	307.72.DEK.a
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Perdesaan
Penerbit	Jurnal Stie Semarang
Pengarang	Deky Aji Suseno St Sunarto
Tahun Terbit	2016
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	Perencanaan merupakan hal yang sangat penting dalam pembangunan daerah. Lain pihak, adanya pembangunan juga terdapat berbagai masalah sehingga perlu adanya perencanaan yang sesuai dengan undang-undang yang mengaturnya. Berdasarkan hal tersebut, muncul pertanyaan, apakah perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh desa/kelurahan sudah sesuai dengan Undang-undang 6 Tahun 2014.

## Pembangunan Pedesaan Berbasis Teknologi Informasi Dan Komunikasi (Studi Pada Gerakan Desa Membangun)

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	307.72.MUH.p
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Perdesaan
Penerbit	Jurnal Risalah
Pengarang	Muhammad Badri
Tahun Terbit	2016
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	Penulisan artikel ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui profil dan program Gerakan Desa Membangun (GDM); (2) Mengetahui paradigma pembangunan pedesaan berbasis TIK yang dijalankan GDM; (3) Mengetahui masalah dan strategi pengembangan TIK di pedesaan; (4) Mengetahui pengembangan media komunikasi pedesaan berbasis TIK. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan, dengan menganalisis konten website GDM ( <a href="http://desamembangun.or.id/">http://desamembangun.or.id/</a> ) dan konten website desa berbasis <a href="http://desa.id">desa.id</a> yang berafiliasi dan dikembangkan oleh GDM

## Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	307.72.PIS.p
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Perdesaan
Penerbit	Jurnal Valuta
Pengarang	Pislawati Alfiaturrahman
Tahun Terbit	2016
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	<p>Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan tujuan utama atau menjelaskan secara rinci dan mendalam dari partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di desa Kabupaten bagan limau Ukui Pelalawan. Ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan induktif. Penelitian menyimpulkan: Pembangunan Proses Perencanaan belum dilaksanakan dengan baik di desa Bagan Limau, dimana beberapa tahap perkembangan dalam proses perencanaan desa Bagan Limau belum dilaksanakan, termasuk tahap persiapan dan tahap diskusi kegiatan / prioritas kegiatan yang akan diserahkan ke tingkat Kabupaten Musrenbang. musrenbang di tingkat kabupaten beberapa tahapan proses perencanaan belum dilaksanakan, terutama pada tahap di mana orang belum Terlibat Putuskan kegiatan prioritas yang akan disampaikan ke tingkat Kabupaten.</p>

## **Studi Komparatif Tahapan Perencanaan Pembangunan Perdesaan Di Indonesia Dan Malaysia (Studi Kasus: Desa Alamendah, Kabupaten Bandung-Indonesia Dan Desa Peruas, Pahang- Malaysia)**

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	307.72.AHL.s
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Perdesaan
Penerbit	Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota
Pengarang	Ahlunnaza Pandu Raharjo Nia Kurniasari,ST., MT.
Tahun Terbit	2016
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana proses perencanaan pembangunan pedesaan di Indonesia dan Malaysia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan format desain deskriptif kualitatif untuk menggambarkan kondisi berbagai fenomena yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian, dan menariknya ke permukaan realitas sebagai ciri, watak, sifat, model atau gambaran. dari kondisi atau fenomena tertentu. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terstruktur dan mendalam, serta studi literatur yang difokuskan pada eksplorasi literatur terkait. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode triangulasi dan interpretatif. Triangulasi metode bertumpu pada validitas temuan dan tingkat kepercayaan. Analisis data bersifat induktif, artinya merupakan hasil penelitian bukan generalisasi.

## Pengembangan Kawasan Pedesaan Berkelanjutan Berbasis Pertanian Lahan Basah

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	307.72.RIZ.p
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Perdesaan
Penerbit	Jurnal Pertanian Faperta UMSB
Pengarang	Rizqha Sepriyanti Burano
Tahun Terbit	2017
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	<p>Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif yang mengkaji beberapa aspek yakni tipologi pedesaan, sumber daya manusia, sumber daya alam, kelembagaan, ekonomi, dan sarana prasarana. Selanjutnya untuk mengidentifikasi potensi dan masalah pengembangan wilayah Sungai Rimang dilakukanlah Analisis Swot. Analisis ini tentu saja berpedoman pada aspek-aspek yang telah dikaji sebelumnya. Hasil analisis swot dijadikan acuan dalam rencana pengembangan kawasan yakni pengembangan kelembagaan, pengembangan sektor pertanian, pelestarian nilai budaya masyarakat, pengelolaan dan pelestarian lingkungan, pengembangan infrastruktur pedesaan, dan pengembangan komunitas pedesaan. Semua rencana ini akan dijabarkan dalam bentuk program pelaksanaan yang lebih terperinci.</p>

## Pengembangan Wilayah Perdesaan Berbasis Pada Potensi Sumber Daya Alam di Kabupaten Bondowoso

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	307.72.HER.p
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Perdesaan
Penerbit	EKONOMIKAWAN : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Pengarang	Herman Cahyo Diartho
Tahun Terbit	2018
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	Adanya kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan serta kemiskinan di pedesaan telah mendorong upaya-upaya pembangunan di daerah pedesaan. Salah satu upaya untuk melakukan modernisasi dan penguatan ekonomi pedesaan adalah dengan adanya dukungan penyediaan infrastruktur pedesaan yaitu jalan, air bersih, listrik dan prasarana kegiatan ekonomi lainnya. Dalam prakteknya, proses pembangunan pedesaan yang dilaksanakan selama ini belum berhasil mencapai tujuan tersebut, bahkan disisi lain telah menimbulkan berbagai permasalahan baru berupa kesenjangan antar kota dan desa.

## Strategi Pengembangan Kawasan Perdesaan (Studi di Kabupaten Pandeglang)

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	307.72.AGU.s
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Perdesaan
Penerbit	Jurnal Administrasi Negara
Pengarang	Agus Lukman Hakim
Tahun Terbit	2019
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	Implementasi kebijakan tata ruang di Kabupaten Pandeglang mengalami berbagai kendala, diantaranya terjadi konflik antar aktor baik berupa aktor pemda pandeglang, masyarakat, tokoh, pihak swasta, pemerintah pusat dan aktor politik. Kondisi tersebut menuntut adanya strategi pengembangan perdesaan yang yang spesifik mengingat Kabupaten Pandeglang merupakan wilayah perdesaan dan memiliki potensi SDA yang besar. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan Pendekatan Kuantitatif. Data yang digunakan adalah data primer berupa angket dengan metode <i>purposive sampling</i> , berjumlah 18 pakar

## Strategi Revolusi Hijau untuk Pembangunan Perdesaan Desa Terdampak Bonus Demografi di Era Industri 4.0 (Kasus Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah)

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	635.977.FLO.s
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Perdesaan
Penerbit	Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)
Pengarang	Florentina Ratih Wulandari Hanif Nurcholis
Tahun Terbit	2019
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	Artikel ini sebagai wacana, bertujuan membahas revolusi hijau sebagai strategi pembangunan perdesaan di era industri 4.0 sejak implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka, dan hasilnya dianalisis dengan teori strategi pembangunan desa menurut Griffin (1999)

## Pembangunan Desa Mandiri Melalui Partisipasi Masyarakat Di Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	307.72.FAT.p
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Perdesaan
Penerbit	JPPM: Journal of Public Policy and Management
Pengarang	Fatmawati Lukman Hakim Mappamiring
Tahun Terbit	2020
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	Partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa sangat penting untuk diperhatikan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa mandiri di Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa. Metode penelitian deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, dokumentasi, dan wawancara. Tahapan analisis data yang dilakukan, adalah reduksi data, data display (penyajian data), dan <i>conclusion drawing/verification</i> .

**Pengaruh Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Maurisu Selatan Kecamatan Bikomi Selatan**  
*(The Effect of Village Fund Allocation to Manage the Empowerment and improvement welfare of South Maurisu Society (Kecamatan Bikomi Selatan))*

Kode Klasifikasi DDC	352.48.KAM.p
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Perdesaan
Penerbit	Jurnal Ekonomi Pembangunan
Pengarang	Kamilaus Konstanse Oki Margaretha Diana Pangastuti Noviana Ua
Tahun Terbit	2020
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	Alokasi Dana Desa (ADD) bertujuan untuk membiayai tunjangan aparatur pemerintah desa, pengembangan infrastruktur, kegiatan sosial dan investasi pengembangan ekonomi masyarakat desa. Desa Maurisu Selatan di Kecamatan Bikomi Selatan merupakan salah satu desa penerima Alokasi Dana Desa. Pengelolaan dana desa merupakan faktor penting terhadap pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Maurisu Selatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengelolaan dana desa terhadap pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian dilakukan di Desa Maurisu Selatan dengan sampel berjumlah 87 orang yang berasal dari aparat desa dan masyarakat.

## **Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Kasus: Desa Ngroto, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang)**

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	352.48.NUR.p
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Perdesaan
Penerbit	Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB
Pengarang	Nur Sri Devyana
Tahun Terbit	2020
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan suatu harapan baru bagi masyarakat desa dan pemerintah desa agar dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana desa dalam upaya meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Ngroto, Kecamatan Pujon. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan sekunder.

## Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (Studi: Desa Bulude, Kecamatan Kabaruan Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara)

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	307.72.GIF.e
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Perdesaan
Penerbit	-
Pengarang	Giffried R. Rumpia Burhanudin Kiay Helly F. Kolondam
Tahun Terbit	-
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan program pembangunan Prasarana Perdesaan di Desa Bulude Kecamatan Kabaruan Kabupaten Kepulauan Talaud. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, penulis menilai indikator efektivitas berdasarkan data yang dikumpulkan melalui teknik wawancara mendalam, studi kepustakawanan, dan observasi. Terhadap 10 informan yang terkait langsung dengan pelaksanaan program pembangunan desa di Desa Kabaruan Kecamatan Bulude. Melalui penelitian ini pula Pemerintah Desa Bulude dan masyarakat dapat mengetahui apakah program tersebut sudah berjalan efektif?.

# LAPORAN

## Pembangunan Perdesaan Dan Dinamika Penghidupan Desa (Perspektif Sosiologi Nafkah)

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	307.72.PROF.p
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Perdesaan
Penerbit	Seminar Nasional Berbagi Hasil Penelitian Sosial-Ekonomi LP2M Unhas-The SMERU Research Institute
Pengarang	Prof. Dr. Ir. DarmawanSalman, MS
Tahun Terbit	2018
Tipe File	Laporan
Deskripsi	Paparan ini berisikan pembahasan mengenai pembangunan perdesaan dan dinamika penghidupan desa (perspektif sosiologi nafkah)

## Pembangunan Kawasan Pedesaan Dan Perekonomian Desa

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	307.72.KEM.p
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Perdesaan
Penerbit	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia
Pengarang	Anwar Sanusi Ph.D
Tahun Terbit	-
Tipe File	Laporan
Deskripsi	Laporan ini berisikan paparan yang membahas tentang pembangunan kawasan pedesaan dan perekonomian desa

## **Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan Desa, Dan Pembangunan Kawasan Perdesaan Berdasarkan Undang - Undang Desa**

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	307.12.BUD.p
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Perdesaan
Penerbit	-
Pengarang	Budiman Sudjatmiko
Tahun Terbit	-
Tipe File	Laporan
Deskripsi	Paparan ini berisikan pembahasan mengenai pemberdayaan masyarakat, pembangunan desa, dan pembangunan kawasan perdesaan berdasarkan undang - undang desa

# PERKOTAAN

**BUKU**

## Pembangunan Perkotaan Berwawasan Lingkungan

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	711.4.KAM.p
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Perkotaan
Penerbit	Direktur Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum
Pengarang	Kamarudin
Tahun Terbit	1999
Tipe File	Buku
Deskripsi	Dalam upaya memacu pembangunan perkotaan, penulis merangkai tulisan-tulisan dalam konteks pembangunan perkotaan yang berwawasan lingkungan, meliputi manajemen dan strategi, penataan ruang, penataan perumahan dan permukiman kumuh, rumah susun, pemasyarakatan rumah sehat, pariwisata, pasar dan taman, pemulung, kesehatan lingkungan, peran PKK dalam kebersihan kota, pengelolaan sampah perkotaan, kota bersih Adipura, budaya bersih, disiplin nasional, dan pengentasan kemiskinan. Tulisan-tulisan ini merupakan artikel penulis yang telah diterbitkan di surat kabar pada tahun 1989-1998

## Panduan Praktis Implementasi Agenda Baru Perkotaan New Urban Agenda

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	711.4.DRI.p
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Perkotaan
Penerbit	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Pengarang	Dr. Ir. Wicaksono Sarosa Maulita Dwasti Isnutomo, ST, MSc dkk
Tahun Terbit	2017
Tipe File	Buku
Deskripsi	Sebagai upaya mendukung perwujudan pencapaian tujuan pembangunan perkotaan secara nasional maupun sesuai agenda – agenda global, khususnya Agenda Baru Perkotaan, referensi atau panduan untuk melaksanakannya di tingkat nasional maupun lokal sangat diperlukan. Untuk itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, berinisiasi untuk menerjemahkan sekaligus membuat sebuah Panduan Praktis dalam rangka Implementasi dari Agenda Baru Perkotaan ( <i>New Urban Agenda</i> ).

## SOSIOLOGI PERKOTAAN Memahami Masyarakat Kota dan Problematikanya

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	307.76.DRB.s
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Perkotaan
Penerbit	CV Pustaka Setia
Pengarang	Dr.BeniAhmadSaebani,M.Si
Tahun Terbit	2017
Tipe File	Buku
Deskripsi	<p>Kehidupan masyarakat kota sangat menarik dan terus berubah sesuai perkembangan zaman yang menyertainya, dan sosiologi perkotaan menjadi penting untuk terus mencermati perubahan dan pertumbuhan (perkembangan) tersebut. Sejarah mencatat bahwa kehidupan masyarakat kota (urban) selalu banyak dikritik orang. Sejumlah persoalan kehidupan kota menyertai geliat kemajuan yang terus berjalan. Istilah “krisis kota” disematkan sebagai salah satu kritik terhadap keadaan kota masa kini dengan cara membandingkan dengan mitos zaman keemasan ketika kehidupan komunitas masih rukun, bersahabat, dan tanpa gangguan. Untuk itu, sosiologi perkotaan sangat menarik untuk dipelajari guna memahami masyarakat kota beserta problematikanya.</p>

## Buku I Analisis Strategi Kota Cerdas Kota Depok

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	711.4.DIN.b
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Perkotaan
Penerbit	Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Depok
Pengarang	Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Depok
Tahun Terbit	2019
Tipe File	Buku
Deskripsi	Tujuan dari Analisis Strategi Kota Cerdas Kota Depok ini diantaranya adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis kelebihan dan kekurangan yang dimiliki pemerintah Kota Depok dalam hal pelayanan yang bersifat internal dan eksternal, menganalisis inovasi ICT dan non ICT untuk mengatasi masalah perkotaan, meningkatkan efektivitas manajemen kota dan meningkatkan kualitas hidup yang berkelanjutan, efisiensi dan keamanan, serta meningkatkan daya tarik dan menginspirasi inovasi Kota Depok dalam pengembangan ekonomi berkelanjutan

# JURNAL

## Kesiapan Bandar Udara Adi Sumarmo Dalam Rangka Konferensi Tingkat Menteri Tentang Perumahan dan Perkotaan Se Asia Pasifik Tahun 2010

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	387.7.ARI.k
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Perkotaan
Penerbit	Warta Ardhia
Pengarang	Ari Susetyadi
Tahun Terbit	2009
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	<p>Bandar udara Adi Sumarmo adalah salah satu bandara Internasional yang berada di Provinsi Jawa Tengah, bandara ini melayani penerbangan Domestik dan International. Pada tahun depan 2010 kota Surakarta menjadi tuan rumah konferensi tingkat Menteri tentang perumahan dan perkotaan se Asia Pasifik oleh karena itu sebagai suatu kegiatan ekonomi yang diharapkan mampu memperluas kesempatan kerja dan usaha khususnya bagi masyarakat sekitarnya guna merangsang pembangunan regional, memperkenalkan identitas dan budaya serta menambah penerimaan devisa. Sehubungan dengan hal tersebut, maka bandar udara Adi Sumarmo perlu ikut berperan serta dalam mendukung program tersebut.</p>

## Tipologi Perkotaan Di Kabupaten Cilacap

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	307.76.KEN.t
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Perkotaan
Penerbit	Jurnal Planesa
Pengarang	Ken Martina Kasikoen
Tahun Terbit	2011
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	Tujuan penelitian ini adalah menetapkan tipologi perkotaan di wilayah Kabupaten Cilacap, sehingga dapat digunakan dalam penerapan kebijakan pembangunan di kabupaten tersebut. Tipologi perkotaan pada suatu wilayah dapat dilakukan dengan berbagai metode, namun mengingat keterbatasan data yang tersedia di Kabupaten Cilacap, dengan menggunakan analisis sosial yaitu kependudukan dan analisis fisik bangunan telah dapat menggambarkan tipologi perkotaan di wilayah tersebut.

## Pengembangan Kota Masa Depan Berkelanjutan Pendekatan Ekosistem dalam Pengembangan Kota yang Berkelanjutan (Kasus Kota Jakarta)

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	711.4.PAR.p
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Perkotaan
Penerbit	Prosiding CITIES
Pengarang	Parino Rahardjo
Tahun Terbit	2012
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	<p>Kota Jakarta sebagai obyek studi dipilih karena sebagai Ibu kota Negara memiliki beragam fungsi dan kegiatan. Perubahan RTH alami terjadi Juga di daerah pinggiran Kota Jakarta. Banjir yang melanda Jakarta salah satu penyebabnya adalah ketidakmampuan lahan di sekitar kota Jakarta menyerap air hujan akibat terjadinya perubahan tutupan lahan karena konversi lahan terbuka hijau menjadi perumahan maupun aktivitas bisnis. Tujuan penelitian dalam makalah ini adalah membuktikan adanya hubungan antara pendekatan ekosistem dengan pengembangan kota yang berkelanjutan. makalah ini secara singkat menyajikan gambaran tentang pentingnya pendekatan ekosistem dalam hal pengembangan kota yang berkelanjutan. Diharapkan kesimpulan penelitian dapat dikembangkan sebagai pedoman pada pengembangan perkotaan (lingkungan binaan) di Indonesia mendatang.</p>

**Pengaruh Pembangunan Mamminasata Terhadap Perubahan Sosial Ekonomi Dan Ekologi Pada Masyarakat Lokal**  
*(Impacts of Megapolitan Development on Socio-Economic and Ecological Change of the Local Community)*

Kode Klasifikasi DDC	338.9598 .RIM.p
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Perkotaan
Penerbit	Sodality : Jurnal Sosiologi Pedesaan
Pengarang	Rimarty Anggun Widiatri Arya Hadi Dharmawan Rilus A. Kinseng
Tahun Terbit	2014
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	Skema perencanaan pembangunan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan perkotaan seperti kota Mamminasata jelas mempengaruhi perubahan sosial dalam masyarakat setempat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis dampak pembangunan Mamminasata menjadi sosio-ekonomi, sosio-budaya dan sosio-ekologis pada masyarakat setempat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang didukung oleh pendekatan kuantitatif.

**Alih Fungsi Lahan Di Perkotaan (Studi Kasus Di Kota Bandung Dan Yogyakarta)**  
***Urban Land Misuse: (A Case Study of Bandung City and Yogyakarta City)***

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	333.76 .ROH.a
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Perkotaan
Penerbit	Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial
Pengarang	Rohani Budi Prihatin
Tahun Terbit	2015
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	Lebih dari empat dekade, kota-kota di Indonesia mengalami pertumbuhan penduduk yang dramatis. Pertumbuhan penduduk ini mengakibatkan krisis penggunaan lahan serta pertanian yang berdampak pada kesehatan, keamanan, dan keberlanjutan kota-kota tersebut. Tulisan ini membahas mengenai pola penggunaan lahan dan perubahan perubahannya sepanjang waktu di Kota Bandung dan Kota Yogyakarta. Penelitian dilakukan pada tahun 2014 dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

## **Analisis Dampak Alternatif Penggolongan Wilayah Perkotaan Dan Perdesaan Pada Kebijakan Pengalokasian Anggaran Pnpm Mandiri Perkotaan Dan Perdesaan**

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	711.4.DWI.a
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Perkotaan
Penerbit	Seminar Nasional Cendekiawan 2015
Pengarang	Dwi Haryanto Endrawati Fatimah Sri Yani Kusumastuti
Tahun Terbit	2016
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan merumuskan kriteria wilayah perkotaan dan perdesaan sebagai pertimbangan mendasar dalam pengalokasian anggaran PNPM Mandiri, serta memberikan alternatif agar pengalokasian anggaran PNPM Mandiri lebih sesuai dengan kriteria wilayah perkotaan dan perdesaan. Ruang lingkup penelitian ini mencakup seluruh provinsi di Indonesia

## Prinsip-Prinsip Pembangunan Berkelanjutan Dalam Implementasi Pengembangan Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	711.4.EDI.p
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Perkotaan
Penerbit	Jurnal Ilmu Administrasi
Pengarang	Edi Zulkarnaen G Ahmad Harakan Hardianto Hawing
Tahun Terbit	2016
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	Salah satu taman yang ada di Kota Makassar yaitu Taman Macan menjadi lokasi Ruang Terbuka Hijau sangat identik dengan patung macan nya. Berdasarkan pemaparan diatas maka penulis mencoba meneliti tentang Prinsip-prinsip Pembangunan Berkelanjutan Dalam Implementasi Pengembangan Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan tipe penelitian fenomenologi. Deskripsi penelitian ini menunjukkan empat fungsi dari keberadaan taman macan sebagai konsep dari ruang terbuka hijau yaitu Fungsi ekologis, dengan adanya penghijauan maka taman kota dapat berfungsi sebagai penyedia oksigen. Ketersediaan pohon di taman macan untuk menjaga kualitas udara dari kota Makassar.

## Analisis Perhitungan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Perorangan Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	657.46.DAR.a
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Perkotaan
Penerbit	JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)
Pengarang	Dariana Fadli Agus
Tahun Terbit	2017
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	<p>Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana jenis pajak lainnya merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting artinya dalam menunjang kelancaran pembangunan nasional. Penulis melakukan penelitian pada Unit Pelayanan Teknis Pajak Bumi dan Bangunan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis, dengan maksud dan tujuan ingin mengetahui Perhitungan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Perorangan. Metode analisis yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan kualitatif. Metode deskriptif merupakan suatu bentuk pengumpulan data yang bertujuan menggambarkan, memaparkan suatu keadaan atau suatu masalah yang ada di perusahaan, dimana data yang diambil dianalisis kebenarannya dalam hal ini adalah Unit Pelayanan Teknis Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan. Metode kualitatif yaitu metode yang berdasarkan riset yang bersifat deskriptif.</p>

## Green City: Solusi Problematika Perkotaan Dalam Dimensi Pembangunan Berkelanjutan

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	635.977.SYA.g
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Perkotaan
Penerbit	In Prosiding Seminar Nasional Perencanaan Pembangunan Inklusif Desa Kota, Jawa Timur
Pengarang	Syarif Imam Hidayat
Tahun Terbit	2017
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	Menghadapi persoalan yang serba kompleks di perkotaan, maka sebaiknya ada upaya pembangunan perkotaan secara terpadu, sistematis dan berkelanjutan. Upaya strategi yang dapat dilakukan adalah dengan melaksanakan konsep <i>Green City</i> . <i>Green City</i> (Kota hijau) adalah konsep pembangunan kota berkelanjutan dan ramah lingkungan. Saatnya mewujudkan dan mengimplementasikan konsep <i>Green City</i> untuk membangun daerah perkotaan di Indonesia seiring tujuan pembangunan berkelanjutan yang diinginkan bersama demi kesejahteraan masyarakat.

## Strategi Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan Di Kota Batu

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	711.4.RAM.s
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Perkotaan
Penerbit	Jurnal Inovasi Penelitian
Pengarang	Rama Permana Putra Agustina Nurul Hidayati Ida Soewarni
Tahun Terbit	2021
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	Letak geografis yang berada di hulu sungai Brantas dan memiliki dominasi topografi terjal sangat membatasi daya tampung lingkungan Kota Batu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status pembangunan berkelanjutan di Kota Batu berdasarkan dimensi ekologi, ekonomi, sosial budaya, infrastruktur, dan kelembagaan. Sedangkan output dari penelitian ini adalah meningkatkan status strategi keberlanjutan pembangunan perkotaan di Kota Batu. Jenis analisis yang digunakan meliputi, analisis keberlanjutan pembangunan perkotaan meliputi; analisis leverage, analisis monte-carlo dan analisis <i>Multidimensional Scaling</i> (MDS) untuk merumuskan strategi dan analisis kebijakan pembangunan menggunakan <i>Participatory Prospective Analysis</i> (PPA).

## Peranan Daerah Perkotaan Bagi Pembangunan Regional: Penerapan Model Thunen Yang Dimodifikasikan Di Indonesia

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	711.4.PRA.p
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Perkotaan
Penerbit	Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia
Pengarang	Prasetyo Soepono
Tahun Terbit	1998
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	<p>Teori lokasi menunjukkan bagaimana perusahaan pada awalnya memilih lokasi optimal masing-masing dan akhirnya memutuskan untuk menempatkan di daerah yang sama (dengan isodapane terendah) sehingga membentuk kota, yang merupakan sesuatu yang harus terjadi ketika perusahaan ingin beroperasi secara efisien dan menguntungkan. Selanjutnya, model zona <i>konsentris von Thunen</i> menunjukkan bahwa penentu sewa lahan (tingkat pembangunan) adalah ukuran wilayah perkotaan dan aksesibilitas ke wilayah perkotaan. Luas wilayah perkotaan berpengaruh positif terhadap tingkat pembangunan, sedangkan aksesibilitas berpengaruh negatif terhadap tingkat pembangunan. Penerapan model tersebut pada perekonomian AS telah mendukung harapan bahwa wilayah perkotaan dan aksesibilitas mempengaruhi tingkat pembangunan</p>

## Perubahan Struktural Dalam Pembangunan Perkotaan

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	307.3.IWA.p
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Perkotaan
Penerbit	-
Pengarang	Iwan Nugroho Budi Triyono
Tahun Terbit	1999
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	<p>Pertumbuhan daerah kota di negara berkembang menunjukkan gejala yang tidak diharapkan. Untuk mengantisipasi kondisi keterbelakangan ini, daerah perkotaan harus didorong secara kuat untuk meningkatkan permintaan terhadap barang dan pelayanan untuk seluruh kepentingan nasional. Permasalahan kota yang dihadapi bukan hanya persoalan keruangan dan perubahan struktur ekonomi saja, tapi juga pembentukan implikasi sosial dan lingkungan. Hal ini dapat dilihat di Bogota dengan pola dualisme sistem sosialnya, adanya pemisahan ruang antara masyarakat kaya di daerah utara dan masyarakat miskin di daerah selatan dan barat. Fenomena serupa juga ditemukan di Indonesia</p>

## Peran Ekonomi Perkotaan dalam Ekonomi Nasional

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	711.1.DJA.p
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Perkotaan
Penerbit	Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia
Pengarang	Djamester A. Simarmata
Tahun Terbit	2002
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	Artikel ini membahas peran tidak langsung ekonomi perkotaan terhadap perekonomian nasional melalui pasar properti dan tanahnya. Beberapa instrumen ekonomi nasional memiliki efek yang tak terelakkan pada variabel lokal, membuat konsep otonomi daerah menjadi terbatas. Tingkat suku bunga ditentukan oleh bank sentral, yang memiliki efek nasional yang kuat, mempengaruhi penilaian properti dan tanah, yaitu di daerah perkotaan. salah satu dari perhatian utama banyak orang dan pemerintah lokal dan nasional di perkotaan daerah berada di perumahan.

## Pembangunan Kota Berkelanjutan: Belajar dari Curitiba

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	711.4.ARI.p
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Perkotaan
Penerbit	Journal of Regional and City Planning
Pengarang	Arief Rosyidie
Tahun Terbit	2004
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	<p>Proses redesain Curitiba difokuskan pada sistem transportasi di kota. Integrasi dari manajemen lalu lintas, transportasi umum dan perencanaan penggunaan lahan telah berhasil meminimalkan lalu lintas pusat kota. Ini juga mendorong interaksi sosial dengan menyediakan lebih banyak area rekreasi (taman, ruang terbuka, dll) dan zona pejalan kaki di pusat kota. Selain itu, rencana tersebut juga mendorong penggunaan angkutan umum dan sistem daur ulang untuk mewujudkan kota yang sehat lingkungan. Curitiba Berkelanjutan tercapai karena didukung oleh pemimpin yang kuat, yang memiliki pengalaman panjang dan visi dalam perencanaan kota, serta didukung oleh modal sosial partisipasi masyarakat. Curitiba sekarang adalah etalase dunia eco cities dan ibukota ekologi Brasil. Para pengelola dan perencana kota dari seluruh dunia belajar dari keberhasilan pembangunan berkelanjutan di Curitiba.</p>

**Indikator Keberlanjutan Kota Di Indonesia: Studi Komparasi Empat Kota Di Jawa**  
*(Sustainability Indicators Of Indonesian Cities: Comparative Studies Of Four Cities In Java)*

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	711.4.BSE.i
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Perkotaan
Penerbit	Jurnal Manusia dan Lingkungan
Pengarang	B. Setiawan
Tahun Terbit	2007
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	<p>Walaupun ide pembangunan kota yang berkelanjutan semakin diterima oleh banyak kalangan di Indonesia, kondisi kota-kota di Indonesia semakin saja buruk dan mengkhawatirkan. Ide-ide pembangunan kota yang berkelanjutan masih sekedar diwacanakan dan tidak dirumuskan menjadi satu program yang rinci dan terukur, sehingga secara berkala dapat dievaluasi perkembangannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur indikator keberlanjutan kota di Indonesia, khususnya indikator lingkungan fisik. Penelitian ini merupakan penelitian komparasi empat kota yakni: dua kota pantai (Semarang dan Surabaya) serta dua kota pedalaman (Bandung dan Yogyakarta).</p>

## Menemukanali Agihan Permukiman Kumuh Di Perkotaan Melalui Interpretasi Citra Penginderaan Jauh

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	363.5.ERN.m
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Perkotaan
Penerbit	Jurnal Geografi
Pengarang	Erni Suharini
Tahun Terbit	2007
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	<p>Tingkat pertumbuhan penduduk kota yang lebih cepat dan tidak seimbang dengan ketersediaan lahan di perkotaan, mengakibatkan tekanan penggunaan lahan kota. Salah satunya ditandai dengan penggunaan lahan yang kurang atau tidak layak hunian untuk daerah pemukiman. Keadaan yang demikian akan menimbulkan masalah tata ruang/lingkungan. Utamanya dalam kaitan dengan hal ini adalah semakin pesatnya kemunculan pemukiman kumuh di perkotaan. Dalam rangka optimasi pelaksanaan program perbaikan kampung, data spasial tentang permukiman kumuh perkotaan yang cermat, rinci dan aktual sangat diperlukan. Oleh karena itu kegiatan interpretasi citra penginderaan jauh dengan metode tertentu untuk menemukanali agihan spasial tentang permukiman kumuh di suatu wilayah (perkotaan) merupakan sebuah alternatif kegiatan yang dipandang lebih efektif dan efisien dalam mendukung perolehan data yang dimaksud</p>

## Konsep Pembangunan Berkelanjutan Studi Kasus: Kota Bandung Dengan Tujuh Program Prioritas

### *(Sustainable Development Case Study: Seven Priorities for Bandung City)*

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	711.4.DAD.k
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Perkotaan
Penerbit	Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi
Pengarang	Dada Rosada
Tahun Terbit	2008
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	<p>Pembangunan berkelanjutan adalah proses yang terencana dan sistematis untuk memenuhi kebutuhan kesejahteraan ekonomi, sosial dan lingkungan untuk generasi sekarang dan yang akan datang tanpa membahayakan orang-orang di generasi berikutnya. Salah satu prinsip dalam pembangunan berkelanjutan adalah partisipasi para pemangku kepentingan. Setiap pemangku kepentingan memiliki sumber daya dan peran yang dapat dimanfaatkan secara proporsional. Pembangunan berkelanjutan menghapus paradigma lama bahwa pemerintah berperan sebagai penyedia. Dalam konsep ini, pemerintah berfungsi sebagai fasilitator dan agen pemberdayaan warga. Kesadaran akan pembangunan berkelanjutan melalui pelestarian lingkungan, diyakini sebagai fenomena sosial peradaban gelombang keempat setelah tiga gelombang sebelumnya: pertanian, industri, dan teknologi informasi.</p>

## Penataan Ruang Perkotaan Yang Berkelanjutan, Berdaya Saing Dan Berotonomi (Suatu Tinjauan Pustaka)

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	711.4.IWA.p
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Perkotaan
Penerbit	Jurnal Ilmiah Teknik Sipil
Pengarang	I Wayan Suweda
Tahun Terbit	2011
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	<p>Pembangunan yang kita lakukan harus menyadari bahwa generasi yang akan datang akan dapat menikmati apa yang kita rasakan saat ini". Ini berarti kemajuan yang dihasilkan dari interaksi aspek lingkungan hidup, dimensi ekonomi dan aspek sosial politik sedemikian rupa masing-masing dapat menjamin kehidupan manusia yang hidup pada masa kini dan masa mendatang dan disertai akses pembangunan sosial ekonomi tanpa melampaui batas ambang lingkungan. Pembangunan perkotaan harus mengedepankan rasa keadilan dan keberlanjutan ekonomi lokal dengan meningkatkan keberadaan sektor informal sebagai jejaring sosial, serta pelestarian kawasan lama untuk menyediakan memori kolektif bagi masyarakat. Jadi, penciptaan kota berkelanjutan, berdaya saing dan berotonomi melalui perencanaan dan pengelolaan baru akan efektif jika terintegrasi dengan strategi pengelolaan penggunaan lahan dan lingkungan</p>

## Kajian Hutan Kota Dalam Pengembangan Kota Demak

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	635.977.MOH.k
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Perkotaan
Penerbit	E-Journal TATAL
Pengarang	Mohhamad Kusyanto
Tahun Terbit	2012
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	<p>Kota Demak merupakan salah satu kota yang sedang berkembang. Pengembangan kota dengan pembangunan terus digalakkan. Arah perkembangan dan pertumbuhan Kota Demak cenderung berkembang secara linier memanfaatkan kegiatan pada jalur transportasi darat utama pantura. Perkembangan fisik tersebut diakibatkan faktor-faktor yang mempengaruhi dan mendukungnya. Meningkatnya pembangunan di daerah perkotaan serta pertumbuhan masyarakat kota merupakan salah satu dinamika kehidupan perkotaan. hal ini membawa dampak positif maupun negatif. di satu sisi, kota akan mengalami kemajuan di bidang ekonomi dan teknologi, tetapi di sisi lain terjadi penyusutan lahan vegetasi sehingga mengakibatkan kerusakan ekologi.</p>

**Kajian Kebijakan Hutan Kota: Studi Kasus Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Dki)**  
***(Urban Forest Policy Analyses: Case Study In Dki Jakarta)***

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	635.977.SUB.k
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Perkotaan
Penerbit	Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan
Pengarang	Subarudi Ismayadi Samsuodin
Tahun Terbit	2012
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	Wilayah Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta merupakan salah satu daerah rawan bencana banjir dengan naiknya tinggi permukaan air laut akibat pemanasan global. Kondisi ini bertambah buruk dengan semakin menyusutnya ruang terbuka hijau (RTH) dari sekitar 35 persen (1965) menjadi sekitar 9,3 persen (2009). Oleh karena itu kajian kebijakan pembangunan hutan kota di DKI Jakarta sangat diperlukan sebagai proses pembelajaran bagi para pengelola perkotaan di Indonesia. Kajian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pembangunan hutan kota yang dilakukan oleh pemerintah daerah (Pemda) provinsi DKI Jakarta

## Model Pengendalian Lingkungan Dalam Pembangunan Kota Baru Berkelanjutan : Studi Kasus Pengembangan Kotabaru Bumi Serpong Damai

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	363.7.SYA.m
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Perkotaan
Penerbit	Jurnal Teknologi Lingkungan
Pengarang	Syamsul Hadi Bambang Pramudya dkk
Tahun Terbit	2012
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	Tujuan penelitian ini untuk merumuskan model pengendalian lingkungan selama pembangunan kota baru, untuk mencapai tujuan keberlanjutan. Studi kasus penelitian dilakukan di kota baru Bumi Serpong Damai (BSD) di Provinsi Banten, Indonesia. Penelitian ini menganalisis kualitas udara dan air dan kemudian membandingkan keduanya dengan kualitas lingkungan standar, analisis keberlanjutan BSD menggunakan skala multidimensional (MDS), dan merumuskan parameter kunci menggunakan " <i>prospective tools</i> ", model mengembangkan pengendalian lingkungan menggunakan sistem <i>dynamic</i> , dan merumuskan prioritas kebijakan.

## Pemukiman Penduduk Perkotaan

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	363.5.GUR.p
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Perkotaan
Penerbit	Jurnal Pendidikan Geografi
Pengarang	Gurniwan Kamil Pasya
Tahun Terbit	2012
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	<p>Pertambahan penduduk kota-kota besar di Indonesia di antaranya dengan banyak pendatang sebagai migran, mereka ini menjadi kekhawatiran pemerintah kota apabila tanpa memiliki keahlian, keterampilan, dan dengan latar belakang pendidikan yang rendah. Para migran datang ke perkotaan telah ada sejak jaman kolonial Belanda tetapi akan tampak jelas di saat-saat kemerdekaan, mereka ini menempati wilayah-wilayah kosong sebagai pemukiman spontan atau pemukiman liar, yang lambat laun menjadi kumuh. Walaupun demikian, ada pula yang tidak beruntung mendapatkan pemukiman karena berbagai hal yang akhirnya tidur di mana saja tanpa adanya usaha yang nyata untuk mendapatkan tempat tinggal. Pemukiman padat penduduk menjadi kumuh dengan segala permasalahannya memerlukan adanya perbaikan melalui perbaikan kampung sehingga menjadi tempat tinggal yang sehat sesuai dengan pendekatan manusiawi yang dilakukan pemerintah kota.</p>

## Penerapan Konsep Land Banking Di Indonesia Untuk Pembangunan Perumahan Mbr Di Kawasan Perkotaan

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	332.1.NOE.p
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Perkotaan
Penerbit	<i>ComTech: Computer, Mathematics and Engineering Applications</i>
Pengarang	Noegi Noegroho
Tahun Terbit	2012
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	Sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk, kebutuhan akan perumahan pun terus bertambah. Hal ini menjadi permasalahan yang klasik di kawasan perkotaan ketika harga tanah pun terus melonjak sehingga perumahan hanya menjadi milik masyarakat 'mampu'. Konsep Land Banking (Bank Tanah) disebut sebagai salah satu solusi untuk memperoleh tanah sekaligus untuk meredam gejolak tanah di perkotaan sehingga layak dibangun perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Tulisan ini membahas tentang konsep Land Banking dan bagaimana konsep ini diterapkan di Indonesia.

## Analisis Kebutuhan Jalan Di Kawasan Kota Baru Tegalluar Kabupaten Bandung

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	625.7.MOH.a
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Perkotaan
Penerbit	Majalah Ilmiah UNIKOM
Pengarang	Mohamad Donie Aulia,ST., MT
Tahun Terbit	2013
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	<p>Pembangunan pada suatu wilayah tidak terlepas dari meningkatnya pertumbuhan penduduk yang disertai peningkatan aktivitas penduduk, khususnya sosial ekonomi, sehingga menimbulkan suatu perubahan struktur fungsional maupun tingkat okupansi dari wilayah tersebut. Ada dua kawasan strategis yang akan dikembangkan pemerintah daerah kabupaten Bandung salah satu diantaranya adalah kawasan kota baru Tegalluar. Dari indeks aksesibilitas dan mobilitas dari Standar Pelayanan Minimum Jalan didapat untuk kawasan kota baru Tegalluar membutuhkan panjang jalan 87,6 km (2011) dan lebih dari 178,59 km (2027).</p>

## Optimasi Penggunaan Lahan Perkotaan di Kawasan Perkotaan Mejayan Kabupaten Madiun

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	711.4.AIN.o
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Perkotaan
Penerbit	Jurnal Teknik Pomits
Pengarang	Ainun Dita Febriyanti Putu Gede Ariastita
Tahun Terbit	2013
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan alokasi luas lahan optimal yang dilakukan melalui tiga tahapan. Pertama, mengidentifikasi ketersediaan penggunaan lahan perkotaan di Kawasan Perkotaan Mejayan dengan menggunakan analisis overlay. Kedua, merumuskan kriteria penentu pemanfaatan lahan di Perkotaan Mejayan melalui analisis Delphi. Ketiga, merumuskan model optimasi penggunaan lahan dengan menggunakan Linear programming.

## Penilaian Keberlanjutan Permukiman Di Kelurahan Bugangan Kota Semarang

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	363.5.INT.p
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Perkotaan
Penerbit	Jurnal Teknik PWK
Pengarang	Intan Puspita Widodo Nany Yuliasuti, MSP
Tahun Terbit	2013
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai tingkat keberlanjutan permukiman di Kelurahan Bugangan. Untuk mencapai tujuan tersebut, akan dilakukan analisis terkait dengan ketersediaan dan kondisi sarana dan prasarana kawasan, analisis kualitas hunian di Kelurahan Bugangan, analisis keberlanjutan sosial masyarakat Kelurahan Bugangan serta analisis keberlanjutan ekonomi masyarakat Kelurahan Bugangan. Pendekatan secara umum yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Teknik analisis yang dilakukan dengan analisis deskriptif kuantitatif dengan menggunakan analisis pembobotan, dan analisis deskriptif kualitatif.

**Potensi Kota Yang Mendukung Perkembangan Kota Kecamatan Galur Kulon Progo  
(Support The Potential Development Of City Municipal District Strain Kulon Progo)**

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	711.4.DJO.p
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Perkotaan
Penerbit	Jurnal Teknik Sipil dan Arsitektur
Pengarang	Djoko Pratikto
Tahun Terbit	2013
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	<p>Perkembangan kawasan atau lingkungan perkotaan di Indonesia sangatlah pesat pada dasawarsa terakhir ini. Perkembangan tersebut tidak hanya didominasi oleh kota-kota besar saja, akan tetapi sudah merambah pada wilayah pedesaan terutama pada tingkat kecamatan. Faktor utama yang menimbulkan perkembangan kota adalah perkembangan jumlah penduduk serta perkembangan teknologi informasi dalam dunia modern saat ini. Kedua faktor perkembangan tersebut dapat merubah desa menjadi kota, kota kecil menjadi kota besar dan kota besar dapat menjadi kota metropolitan. Pengaruh informasi modern melalui informasi elektronik yang lebih dikenal dengan internet merupakan pengaruh yang luar biasa terhadap sikap dan perilaku manusia yang hidup dalam suatu kawasan.</p>

## Kajian Peran Pertanian Perkotaan Dalam Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan (Studi Kasus: Pertanian Tanaman Obat Keluarga Di Kelurahan Slipi, Jakarta Barat)

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	631.49.DAR.k
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Perkotaan
Penerbit	Forum Ilmiah
Pengarang	Darmawan Listya Cahya
Tahun Terbit	2014
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	Tanaman obat merupakan salah satu komoditas pertanian perkotaan yang ditanam oleh petani selain sayuran, buah-buahan, dan ikan. Dengan adanya kebijakan pemerintah untuk mengembangkan tanaman obat (TOGA) di seluruh Indonesia, pengembangan obat herbal untuk menyembuhkan berbagai penyakit, dan tanaman obat memiliki nilai tambah yang tinggi, komoditas pertanian perkotaan tanaman obat memiliki potensi pengembangan yang cukup besar. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi karakteristik pertanian perkotaan dan menganalisis peran pertanian perkotaan dalam mendukung pembangunan perkotaan yang berkelanjutan.

**Pengaruh Pembangunan Mamminasata Terhadap Perubahan Sosial Ekonomi Dan Ekologi Pada Masyarakat Lokal**  
*(Impacts of Megapolitan Development on Socio-Economic and Ecological Change of the Local Community)*

Kode Klasifikasi DDC	338.9598.RIM.p
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Perkotaan
Penerbit	Sodality : Jurnal Sosiologi Pedesaan
Pengarang	Rimarty Anggun Widiatri Arya Hadi Dharmawan Rilus A. Kinseng
Tahun Terbit	2014
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	Skema perencanaan pembangunan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan perkotaan seperti kota Mamminasata jelas mempengaruhi perubahan sosial dalam masyarakat setempat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis dampak pembangunan Mamminasata menjadi sosio-ekonomi, sosio-budaya dan sosio-ekologis pada masyarakat setempat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang didukung oleh pendekatan kuantitatif.

## Aktualisasi Kebijakan Investasi Berbasis Lingkungan Hidup melalui Pola Pembangunan Kota di Surakarta

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	658.152.DWI.a
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Perkotaan
Penerbit	Gema
Pengarang	Dwi Saputro Arsyad Aldyan Nikolas Wicaksono Prakoso P
Tahun Terbit	2015
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	Di Indonesia, sejak tahun 1992 telah berupaya menjalankan pembangunan berkelanjutan dan hingga kini tetap memperjuangkannya, bahkan tantangan kedepan semakin besar namun banyak ruang untuk perbaikan. Ruang dimaksud bagi suatu pemerintahan, terdapat segmen yang sangat strategis untuk ditekankan secara massif guna mendukung sosial, budaya maupun perekonomian, yakni suatu regulasi yang bersahabat dengan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. memberikan celah bilamana pihak swasta didorong ke arah perbaikan dan perlindungan lingkungan hidup demi kesejahteraan masyarakat menunjukkan pentingnya model kebijakan yang mampu mendukung pembangunan berkelanjutan.

## Dampak Pembangunan Kota Pada Kesehatan Dan Pengaruhnya Terhadap Kebijakan Kesehatan Perkotaan

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	711.4.ADI.d
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Perkotaan
Penerbit	Jurnal Planesa
Pengarang	Aditionata
Tahun Terbit	2015
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi perkembangan wilayah di Kecamatan Bakauheni dan memberikan usulan konsep pengembangan kota baru sebagai alternatif pengembangan wilayah. Sehingga dapat meminimalisir permasalahan ruang di Kecamatan Bakauheni pada masa mendatang. Metode analisis penelitian yang dilakukan memiliki yaitu analisis kebijakan, analisis daya dukung, analisis daya tampung, analisis aksesibilitas, analisis penentuan lokasi, analisis kebutuhan prasarana kota, analisis perekonomian.

## Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Sanitasi Perkotaan Di Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	363.7.VEN.p
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Perkotaan
Penerbit	Jurnal Teknik PWK
Pengarang	Venny V. S Turnip Mohammad Mukti Ali
Tahun Terbit	2015
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	<p>Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji bentuk partisipasi masyarakat dalam program SPBM serta untuk mengetahui factor yang mempengaruhi bentuk partisipasi masyarakat baik faktor internal maupun faktor eksternal. Selain itu penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi karakteristik masyarakat di Dusun Kebuntaman Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan gabungan kuantitatif dan kualitatif. Teknik Analisis yang digunakan meliputi analisis deskriptif kuantitatif. Program pembangunan sanitasi di Kelurahan Rowosari melibatkan partisipasi masyarakat, dimana masyarakat turut berperan dan dilibatkan selama program berjalan. Masyarakat turut berpartisipasi dalam tahap sosialisasi, tahap pelaksanaan, serta partisipasi dalam tahap pengendalian dalam mendukung perbaikan sanitasi.</p>

## Peluang Kota Menuju Pembangunan Yang Berkelanjutan Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	307.76.AMI.p
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Perkotaan
Penerbit	Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & <i>Call For Papers Unisbank (Sendi_U)</i>
Pengarang	Amin Pujiati
Tahun Terbit	2015
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	<p>Pembangunan baik ditingkat nasional maupun regional yang dilakukan bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan pembangunan tidak dapat terhindarkan dari penggunaan sumberdaya alam. Namun eksploitasi sumberdaya alam yang tidak mengindahkan kemampuan dan daya dukung lingkungan mengakibatkan merosotnya kualitas lingkungan dan menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Untuk itu diperlukan kajian penelitian tentang peluang kota menuju pembangunan yang berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Studi ini bertujuan mengukur peluang kota menuju pembangunan yang berkelanjutan berdasarkan klasifikasi kotadi Perkotaan Semarang dan Yogyakarta. Alat analisis yang digunakan adalah <i>binary logistic regression</i>.</p>

## **Smart City: Kerangka Untuk Pengembangan Kota Berkelanjutan**

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	711.4.SAH.s
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Perkotaan
Penerbit	SCALE
Pengarang	Sahala Simatupang
Tahun Terbit	2015
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	Konsep <i>smart city</i> telah menjadi ide sentral yang kepadanya sekarang kota-kota di dunia sedang berpaling untuk mengatasi masalah-masalahnya. Berbagai konsep <i>smart city</i> telah diusulkan. Tulisan ini mendiskusikan konsep <i>smart city</i> dan hubungannya dengan konsep kota berkelanjutan. Dimensi konsep <i>smart city</i> tidak dapat dipisahkan dari dimensi keberlanjutan kota. Kerangka konseptual <i>smart city</i> yang mengacu kepada kota berkelanjutan diusulkan pada tulisan ini

## Sosial Ekonomi Pekarangan Berbasis Kawasan Di Perdesaan Dan Perkotaan Tiga Provinsi Di Indonesia

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	338.9598.HAR.s
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Perkotaan
Penerbit	Jurnal Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian
Pengarang	Harmi Andrianyta Maesti Mardiharini
Tahun Terbit	2015
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	<p>Pekarangan di perkotaan dan perdesaan berpotensi sebagai penyedia sumber bahan pangan, gizi keluarga dan ekonomi rumah tangga. Pengkajian bertujuan untuk membahas eksistensi pekarangan di perkotaan dan perdesaan dalam perspektif sosial ekonomi. Pengkajian dilakukan di Provinsi Kalimantan Selatan, Jawa Tengah dan Sumatera Selatan pada bulan September dan Oktober 2012. Rancangan pengkajian disusun berdasarkan pengelompokan kawasan perkotaan dan perdesaan melibatkan 50 orang responden mewakili daerah perkotaan dan perdesaan. Data dikumpulkan melalui wawancara meliputi: karakteristik responden, pemilihan jenis tanaman, penataan tanaman, jenis pekerjaan dan penguasaan lahan. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif (tabulasi silang), analisis perbandingan nilai tengah (uji t), analisis <math>\chi^2</math> (chi square) dan korelasi.</p>

## Kota Berkelanjutan: Antara Ide Dan Implementasi Dalam Perspektif Pemangku Kepentingan

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	711.4.KUR.k
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Perkotaan
Penerbit	Jurnal Patrawidya
Pengarang	Kurnia Novianti
Tahun Terbit	2016
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	<p>Tulisan ini memotret perspektif para pemangku kepentingan tentang konsep kota berkelanjutan di dua kota, yaitu Rotterdam dan Jakarta. Kota berkelanjutan sangat menarik diperdebatkan mengingat konsep ini relatif baru diwacanakan oleh para akademisi dan praktisi pembangunan di Indonesia. Konteks pembangunan berkelanjutan yang sejumlah indikatornya harus dipenuhi oleh Indonesia setelah mengadopsi <i>sustainable development goals</i> yang menempatkan kota sebagai salah satu pilar penting untuk mewujudkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial-budaya masyarakat, dan keseimbangan lingkungan akan terpenuhi melalui kota berkelanjutan. Dengan metode kualitatif berupa wawancara, diskusi terfokus, dan pengamatan selama berada di Rotterdam pada bulan Mei 2015. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis perspektif pemangku kepentingan tentang ‘kota berkelanjutan’.</p>

## Pemanfaatan Ruang Terbatas Sekitar Rumah Di Permukiman Perkotaan Melalui Pengembangan Lanskap Produktif

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	363.5.SIT.p
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Perkotaan
Penerbit	Prosiding Semnastek
Pengarang	Siti Nurul Rofiqo Irwan Ahmad Sarwadi
Tahun Terbit	2016
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	Perkotaan dikenal dengan masalah keterbatasan ruang. Jumlah penduduk yang tinggi tidak pernah lepas dari kebutuhan perumahan di kota. Tingkat kepadatan rumah dalam suatu permukiman diikuti dengan keterbatasan ruang sekitar rumah yang dimanfaatkan dan diberdayakan untuk pekarangan. Keberadaan pemilik rumah juga akan menentukan bentuk pemanfaatan pekarangan sebagai bagian dari aksi wujud lingkungan binaan di permukiman perkotaan. Penelitian ini bertujuan mengetahui aksi masyarakat dalam memanfaatkan pekarangan sempit di permukiman perkotaan. Metode penelitian menggunakan metode survei dengan sampel secara sensus di satu klaster (RT) permukiman padat Kelurahan Rejowinangun Kecamatan Kotagede Yogyakarta.

## Pembangunan Perkotaan Berbasis Komunitas Studi Kasus Paguyuban Kalijawi, Yogyakarta

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	711.4.YUS.p
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Perkotaan
Penerbit	Prosiding Seminar Nasional Kota Kreatif
Pengarang	Yusak Senja Utama
Tahun Terbit	2016
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	<p>Pada umumnya warga pada permukiman informal tidak dapat mengakses dana pembangunan dari pemerintah karena masalah ekonomi dan administratif. Paguyuban Kalijawi sebagai organisasi masyarakat yang sebagian besar anggotanya berada pada kawasan informal bantaran sungai Gajahwong dan Winongo, melakukan perencanaan dan pembangunan kawasan secara partisipatif sebagai proposal kolektif untuk pemerintah. Penelitian ini akan menyajikan studi kasus yang dilakukan Paguyuban Kalijawi di Yogyakarta untuk mengusahakan kawasan yang layak huni. Tujuan penelitian ini adalah menawarkan cara pandang alternatif terhadap pemikiran arus-utama (mainstream) dalam pembangunan kota yang umumnya dipahami sebagai tugas utama negara dan sektor bisnis (pengembang). Pengumpulan data melakukan wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka.</p>

## Pemberdayaan Masyarakat Perkotaan Di Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	307.76.SYA.p
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Perkotaan
Penerbit	Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura
Pengarang	Syarif Mahmud Lukman Djafar Herlan
Tahun Terbit	2016
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	Pemberdayaan masyarakat merupakan usaha untuk membuat masyarakat menjadi berdaya melalui upaya pembelajaran mereka mampu untuk mengelola dan bertanggung jawab atas program pembangunan dalam komunitasnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa pemberdayaan masyarakat pada kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan di Kecamatan Pontianak Timur.

## Peranan Kota Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Dan Cianjur (Bodetabekjur) Dalam Menyokong Pembangunan Kota Jakarta

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	711.4.FAI.p
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Perkotaan
Penerbit	Jurnal Bumi Indonesia
Pengarang	Faisal Ibrahim B.S. Eko Prakoso
Tahun Terbit	2016
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	<p>Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur, yang selanjutnya disebut sebagai Kawasan Jabodetabekpunjur, adalah kawasan strategis nasional yang meliputi seluruh wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sebagian wilayah Provinsi Jawa Barat, dan sebagian wilayah Provinsi Banten (Perpres. No. 54 tahun 2008). Tujuan penelitian ini adalah (1) mengidentifikasi sektor unggulan perekonomian wilayah kabupaten/kota di Kawasan Jabodetabekjur serta; (2) mengidentifikasi peranan kabupaten/kota sekitar (Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur) terhadap pembangunan fisik infrastuktur Kota Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode wawancara terhadap 3 responden yang merupakan penentu kebijakan pembangunan di Kota Jakarta. Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dan kualitatif.</p>

## Praktik Konsolidasi Tanah Perkotaan Sebagai Alternatif Model Pembangunan Wilayah Perkotaan Tanpa Pembebasan Tanah

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	711.4.GED.p
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Perkotaan
Penerbit	Diponegoro Law Review
Pengarang	Gede Putra Wijaya Ana Silviana Triyono
Tahun Terbit	2016
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	Kota Denpasar merupakan pusat pemerintahan dan pergerakan ekonomi Provinsi Bali. Ketersediaan tanah yang terbatas dengan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat akan menimbulkan berbagai permasalahan. Klasifikasi lahan yang berakhir pada pembebasan lahan akan menimbulkan konflik yang tidak sesuai dengan kearifan lokal masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah Kota Denpasar menyelenggarakan konsolidasi tanah perkotaan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik konsolidasi tanah perkotaan di Desa Pemecutan Klod, Kecamatan Denpasar Barat dan mengetahui alasan konsolidasi tanah perkotaan dapat dijadikan sebagai alternatif model pembangunan wilayah perkotaan tanpa pembebasan tanah

## Determinan Pembangunan Kawasan Kota Baru Moncongloe-Pattallassang Metropolitan Mamminasata

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	711.4.ARI.d
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Perkotaan
Penerbit	Jurnal Plano Madani
Pengarang	Ariyanto
Tahun Terbit	2017
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis determinan pembangunan kawasan kota baru Moncongloe - Pattallassang Metropolitan Mamminasata. Penelitian ini menggunakan gabungan pendekatan kuantitatif dan kualitatif ( <i>mixed method</i> ). Data diperoleh melalui observasi, survei, dan dokumentasi. Konsep pembangunan kawasan kota baru Moncongloe - Pattallassang dilaksanakan berdasarkan arahan pola ruang kawasan terkait fungsi-fungsi perkotaan yang dikembangkan, hal ini merekondisi pembangunan aktivitas-aktivitas perkotaan (permukiman skala besar, perdagangan, jasa, dan pendidikan), secara tidak langsung menyebabkan terjadinya proses alih fungsi guna lahan dari lahan produktif (pertanian) menjadi lahan industrial perkotaan.

## Kajian Sustainable City terhadap Pembangunan Kota Baru Bumi Serpong Damai (BSD)

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	711.4.NUN.k
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Perkotaan
Penerbit	Prosiding Perencanaan Wilayah dan Kota
Pengarang	Nunky Kemalaeka Sri Hidayati Djoeffan
Tahun Terbit	2017
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	Adanya pertumbuhan dan perkembangan kota yang disebabkan oleh pertambahan penduduk serta perubahan dan perkembangan kegiatan sosial budaya dan sosial ekonomi menuntut kebutuhan ruang yang tinggi. Ruang kota yang terbatas perlu adanya penataan, perencanaan dan penggunaannya secara esensial. Pengembangan kota baru merupakan upaya untuk menyelesaikan permasalahan kota besar yang telah ada. BSD City merupakan kota baru yang dibangun sejak tahun 1986 dengan luas wilayah 6.000 hektar namun tahap pembangunan dimulai sejak tahun 2002 dengan developer Sinar Mas Land. Penelitian ini bertujuan untuk melihat BSD City sebagai kota baru sudah atau belum menerapkan prinsip dari kota baru. Prinsip dari kota baru adalah tipologi kota baru yang jelas, identitas kota dan penerapan konsep <i>sustainable city</i> .

## Konsep Pembangunan Permukiman Berwawasan Lingkungan

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	363.5.MAT.k
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Perkotaan
Penerbit	Jurnal Penelitian dan Kajian Teknik Sipil
Pengarang	Matsyuri Ayat
Tahun Terbit	2017
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	<p>Permukiman adalah area tanah yang digunakan sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan merupakan kawasan perkotaan maupun pedesaan. Pembangunan berwawasan lingkungan atau pembangunan berkelanjutan (<i>sustainable development</i>) adalah upaya sadar dan berencana dalam menggunakan dan mengelola sumberdaya secara bijaksana dalam pembangunan yang berkesinambungan untuk meningkatkan mutu hidup. Syarat-syarat permukiman yang berwawasan lingkungan adalah bebas dari bencana banjir, jauh dari sumber pencemar dan kebisingan, kondisi lahan yang stabil, tersedianya sumber air bersih yang cukup, mempunyai aksesibilitas yang baik dan mempunyai lahan hijau terbuka yang cukup.</p>

## Strategi Pembangunan Berwawasan Lingkungan Kawasan Permukiman Segi Empat Emas Tunjungan Surabaya

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	363.5.SEP.s
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Perkotaan
Penerbit	MINTAKAT Jurnal Arsitektur
Pengarang	Septi Dwi Cahyani Rendra Suprobo Aji
Tahun Terbit	2017
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	<p>Pembangunan berwawasan lingkungan merupakan suatu upaya memaksimalkan potensi Sumber Daya Alam yang ada secara terencana, bertanggung jawab, dan sesuai dengan daya dukungnya. Kemakmuran rakyat, kelestarian fungsi, dan keseimbangan lingkungan hidup merupakan hal yang utama dalam mendukung pembangunan berwawasan lingkungan sebagai wujud penerapan keberlanjutan. Pembentukan suatu kota sebenarnya diawali oleh keberadaan kampung, tak terkecuali Kota Surabaya. Seiring berjalannya waktu, permukiman penduduk asli yang terbentuk sebagai cikal bakal kampung berkembang dengan kemunculan ragam etnis dari berbagai wilayah. Sekelompok masyarakat dengan latar sosial budaya tertentu membentuk kampung-kampung yang keberadaannya masih dapat dipertahankan dari pihak-pihak yang berkepentingan.</p>

**Kajian Tentang Kota Berkelanjutan Di Indonesia (Studi Kasus Kota Yogyakarta)**  
***(Review On Sustainable City In Indonesia (Case Study Of Yogyakarta City))***

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	711.4.WUL.k
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Perkotaan
Penerbit	Media Teknik Sipil
Pengarang	Wulfram I. Ervianto
Tahun Terbit	2018
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	Isu keberlanjutan menjadi populer, pemicunya adalah fenomena pemanasan global yang mengawatirkan keberlangsungan kehidupan di Bumi. Gejalanya adalah meningkatnya suhu rata-rata di Bumi yang disebabkan oleh efek gas rumah kaca. Tujuan kajian adalah untuk mengetahui capaian kota Yogyakarta telah mengakomodasi prinsip ramah lingkungan. Metodologi penelitian yang digunakan didasarkan pada pendekatan kualitatif melalui interpertasi data sekunder yang tersedia dan dapat diakses oleh umum.

## Kebijakan Dan Strategi Pembangunan Perkotaan Nasional Di Indonesia

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	711.4.ANG.k
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Perkotaan
Penerbit	Ilmu dan Budaya
Pengarang	Angga Sulaiman
Tahun Terbit	2018
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	<p>Fenomena pesatnya pertumbuhan kota tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga dialami di berbagai negara di dunia, dimana urbanisasi ditengarai menjadi faktor utama dari pesatnya pertumbuhan tersebut. Dalam konteks Indonesia, kondisi perkotaan saat ini dihadapkan pada kompleksitas permasalahan yang di dalamnya mengindikasikan adanya degradasi lingkungan perkotaan. Maka tulisan ini akan memaparkan arah kebijakan dan strategi pembangunan perkotaan di Indonesia yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang upaya pembangunan perkotaan nasional. Dengan menggunakan metode deskriptif, informasi diperoleh dari berbagai dokumen relevan yang secara eksplisit akan menggambarkan Visi dan Misi Kota 2050, kerangka regulasi, isu-isu strategis, arah kebijakan, sasaran dan strategi pembangunan perkotaan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 -2019</p>

## Penggunaan Lahan Kawasan Perkotaan Berdasarkan Fungsi Kawasan (Studi Kasus : Kawasan Perkotaan Kecamatan Airmadidi)

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	711.4.DIR.p
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Perkotaan
Penerbit	Jurna Spasial
Pengarang	Dirk P. P. Misa Ingerid L. Moniaga Verry Lahamendu
Tahun Terbit	2018
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	Dampak yang terjadi akibat ketidaksesuaian penggunaan lahan berdasarkan fungsi kawasan, mengakibatkan daya dukung lahan dan kelestarian lingkungan hidup di masa yang akan datang mengalami gangguan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis kesesuaian penggunaan lahan berdasarkan fungsi kawasan, di kawasan perkotaan kecamatan Airmadidi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan analisis spasial/keruangan

## **Pertumbuhan Penduduk Perkotaan Dan Perkembangan Pola Distribusinya Pada Kawasan Metropolitan Surakarta**

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	363.9.FAD.p
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Perkotaan
Penerbit	Jurnal Wilayah Dan Lingkungan
Pengarang	Fadjar Hari Mardiansjah Wiwandari Handayani Jawoto Sih Setyono
Tahun Terbit	2018
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	Penelitian ini akan memperlihatkan proses metropolitanisasi dari Metropolitan Surakarta, sebagai akibat dari terbatasnya wilayah administrasi dari kota intinya sehingga proses pertumbuhan perkotaannya melebar ke wilayah kabupaten-kabupaten di sekitarnya. Analisis dilakukan dengan metode analisis time series, dengan menggunakan data kependudukan hasil Sensus Penduduk Nasional dari tahun 1990 hingga 2010.

## Penentuan Pusat Pelayanan Perkotaandi Kota Tanjungpinang

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	320.8.MIT.p
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Perkotaan
Penerbit	Jurnal Tunas Geografi
Pengarang	Mita Apriana IwanRudiarto
Tahun Terbit	2020
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	Sebagai wilayah yang sedang berkembang, permasalahan kesenjangan dan ketidak merataan pembangunan menjadi sebuah tantangan bagi Kota Tanjungpinang sehingga penentuan pusat pelayanan perkotaan menjadi hal yang penting untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi wilayah di Kota Tanjungpinang yang berpotensi sebagai pusat pelayanan perkotaan. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kuantitatifdengan analisis orde perkotaan berdasarkan teori tempat pusat/ <i>central place</i> , yaitu dengan menggunakan analisis skalogram dan analisis interaksi keruangan.

## Kesesuaian Lahan Pengembangan Perkotaan Kajang Kabupaten Bulukumba

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	711.4.ASM.k
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Perkotaan
Penerbit	Plano Madani: Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota
Pengarang	Asmirawati
Tahun Terbit	-
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	<p>Peningkatan kebutuhan lahan perkotaan dengan sisi lainnya terdapat keterbatasan ketersediaan dan kemampuan lahan, mengharuskan perencanaan pemanfaatan lahan dilakukan secara optimum. Kecamatan Kajang merupakan kawasan perkotaan penunjang di Kabupaten Bulukumba. Pesatnya kebutuhan lahan dan pemanfaatan sumberdaya lahan. Penelitian bertujuan untuk menilai tingkat daya dukung lahan dan memberikan informasi dalam pelestarian lingkungan. Metode yang digunakan pada penelitian adalah deskriptif kuantitatif, terdiri dari tahap pengambilan dan pengolahan data. Pengambilan data dilakukan melalui studi literatur dari beberapa instansi terkait. Sementara analisis data spasial dilakukan dengan menggunakan software Sistem Informasi Geografi (GIS).</p>

## Perubahan Konsep Perkotaan di Indonesia dan Implikasinya Terhadap Analisis Urbanisasi

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	711.4.NUG.p
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Perkotaan
Penerbit	Nugraha Setiawan
Pengarang	Nugraha Setiawan
Tahun Terbit	-
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	<p>Perbedaan dan perubahan konsep perkotaan, baik secara spasial maupun antar waktu sering menyulitkan dalam analisis urbanisasi. Kesulitan secara spasial terjadi jika pada tahun yang sama satu wilayah menggunakan konsep perkotaan yang berbeda dengan wilayah lainnya. Demikian pula jika satu wilayah menggunakan konsep perkotaan yang tidak sama pada waktu yang berbeda. Konsep perkotaan di Indonesia sejak sensus penduduk 1961-2000 telah berubah sebanyak empat kali, konsep yang sama hanya digunakan pada tahun 1980 dan 1990. Adanya perubahan tersebut tidak berimplikasi terhadap analisis urbanisasi secara spasial, sebab penerapan konsepnya berlaku secara nasional.</p>

## Analisis Strategis *Smart City* Kota Samarinda

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	711.4.TIM.a
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Perkotaan
Penerbit	Tim Teknis <i>Smart City</i> Samarinda
Pengarang	Tim Teknis <i>Smart City</i> Samarinda
Tahun Terbit	2017
Tipe File	Laporan
Deskripsi	Adapun konsep Kota Tepian yang dimaksudkan adalah kata Tepian yang tidak hanya menjadi Semboyan Kota Samarinda yang merupakan akronim dari Teduh, Rapi, Aman dan Nyaman tetapi juga cerminan dari Kota Samarinda yang terletak di daerah tepi sungai, yaitu bagian yang berbatasan langsung dengan air. Oleh karena itu, konsep <i>Waterfront City Development</i> yaitu pengembangan daerah tepian Sungai Mahakam dan anak sungainya untuk menjadi area pariwisata menjadi salah satu kawasan prioritas (strategis) pengembangan Kota Samarinda ke 20 tahun mendatang yang berbasis pada perdagangan, jasa dan industri yang maju, berwawasan lingkungan dan hijau, serta mempunyai keunggulan daya saing

## Analisis Migrasi Kawasan Perkotaan Terhadap Tingkat Pengangguran Di Kota Banda Aceh

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	307.2.FAC.a
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Perkotaan
Penerbit	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (Uin) Ar-Raniry
Pengarang	Fachri Siddiq Akbar
Tahun Terbit	2018
Tipe File	Laporan
Deskripsi	penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk mengetahui permasalahan yang terjadi pada peningkatan migrasi yang terjadi di Kota Banda Aceh dan juga mengetahui bagaimana pengaruh meningkatnya migrasi dan peningkatan perkotaan terhadap meningkatnya jumlah pengangguran yang terjadi di Kota Banda Aceh

## Jakarta Menuju Kota Yang Berkelanjutan Analisis Pembangunan Kota Berkelanjutan Dalam Dokumen RPJMD DKI Jakarta Tahun 2013-2017

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	711.4.SAE.j
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Perkotaan
Penerbit	Saeful Muluk
Pengarang	Saeful Muluk
Tahun Terbit	-
Tipe File	Laporan
Deskripsi	Tujuan dari analisa ini adalah mengetahui sejauhmana konsep pembangunan berkelanjutan, khususnya konsep mengenai pembangunan kota berkelanjutan diadopsi dalam dokumen RPMJD DKI Jakarta. Konsep mengenai pembangunan kota berkelanjutan yang dikembangkan oleh beberapa ahli menarik untuk dikaji lebih jauh penerapannya dalam kota seperti DKI Jakarta yang saat ini menghadapi tantangan yang besar mengenai keberlanjutannya.

## Mengenal Sistem Perkotaan: Sebuah Pengantar Tentang Kota Solo

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	307.76.UNI.m
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Perkotaan
Penerbit	<i>United States Agency for International Development</i> <i>Unihabitat a Better Urban Future</i> dkk
Pengarang	<i>United States Agency for International Development</i> <i>Unihabitat a Better Urban Future</i> dkk
Tahun Terbit	-
Tipe File	Laporan
Deskripsi	Laporan ini berisikan tentang Adanya batas administratif yang berjenjang di Solo memberikan skala yang berbeda – besar dan kecil – dalam memetakan dan memahami Solo. Batas-batas ini adalah Kota, kecamatan, kelurahan dan RT ( halaman ini); sumur umum di Gandekan dan saluran drainase di Ketelan ( halaman sebaliknya)

## **Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Bangunan Gedung Terkait Dengan Pengawasan Terhadap Pembangunan Perumahan Di Kota Malang (Studi Di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Pengawasan Pembangunan Kota Malang)**

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	363.5.RIE.i
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Perkotaan
Penerbit	Riezky R
Pengarang	Riezky R
Tahun Terbit	2014
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	<p>Pembangunan perumahan di perkotaan sekarang ini juga boleh dikatakan sangat pesat. Perumahan dalam perkotaan saat ini telah menjadi sebuah kebutuhan baik ditinjau dari kebutuhan rumah saat ini maupun kebutuhan rumah akan datang. Oleh karena itu dibutuhkan pengawasan pembangunan perumahan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Bangunan Gedung. Hambatan yang terjadi adalah kurangnya Sumber Daya Manusia (petugas inspeksi lapangan) pada pihak Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Pengawasan Bangunan serta juga ketidaktahuan dan kesadaran masyarakat kurang. Upaya yang dilakukan adalah menambah Sumber Daya Manusia (petugas inspeksi lapangan) untuk Penegak Hukum agar lebih efektif, melakukan sosialisasi pada masyarakat agar memahami pada peraturan yang telah berlaku.</p>

## **Penanganan Masalah Permukiman Perkotaan Melalui Penerapan Konsep Kota Kompak (*Compact City*) Dan *Transit-Oriented Development (TOD)***

Kode Klasifikasi <i>DDC</i>	363.5.TIM.p
Sektor	Pembangunan Daerah
Sub-Sektor	Perkotaan
Penerbit	Tim Peneliti Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota
Pengarang	Tim Peneliti Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota
Tahun Terbit	-
Tipe File	Jurnal
Deskripsi	Dengan bertambahnya jumlah penduduk perkotaan, negara-negara di dunia akan menghadapi sejumlah tantangan di dalam penyediaan kebutuhan penduduknya, termasuk kebutuhan terhadap perumahan, infrastruktur, transportasi, energi, pelayanan kesehatan dan pendidikan, dan lapangan pekerjaan. Kebutuhan akan ruang di perkotaan tentunya juga akan mengalami peningkatan. Di negara maju, fakta ini telah mendorong munculnya sejumlah konsep pembangunan perkotaan yang menekankan pada efisiensi penggunaan ruang dan energi di perkotaan



***Kementerian PPN  
Bappenas***